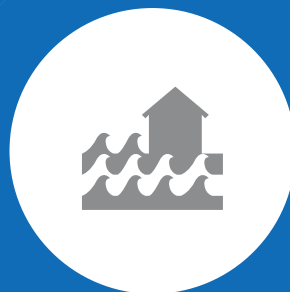




RESPON BENCANA DI ASIA DAN PASIFIK

Panduan Perangkat dan Layanan Internasional



Judul asli:

Disaster Response in Asia and the Pacific:
A Guide to International Tools and Services

OCHA mengucapkan terima kasih kepada para staf atas komitmen dan kontribusi mereka dalam menyusun dan meninjau publikasi ini.

Editor pelaksana: Romano Lasker (OCHA)

Editor: Stacey M. White

Desain, grafis dan tata letak: Anthony John Burke

Publikasi ini dapat terwujud atas bantuan dan umpan balik penting dari para pejabat pemerintah dan organisasi regional dari dalam dan luar kawasan Asia Pasifik:

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Association of South East Asian Nations (ASEAN), Afghanistan, Australia, Bangladesh, Bhutan, Kamboja, China, Republik Demokratik Rakyat Korea, Kantor Bantuan Kemanusiaan Komisi Eropa (ECHO), Fiji, India, Indonesia, Jepang, Republik Korea, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Maladewa, Mongolia, Nepal, Papua Nugini, Filipina, South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), Samoa, Singapura, Kepulauan Solomon, Secretariat of the Pacific Community (SPC), Sri Lanka, Thailand, Amerika Serikat (AS), Vanuatu, Vietnam.

Kami juga berterima kasih atas dukungan dan nasehat yang diberikan oleh rekan-rekan kerja kami dalam masyarakat kemanusiaan yang lebih luas dari PBB/organisasi-organisasi internasional, Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, LSM-LSM lokal dan internasional yang bekerja di kawasan Asia Pasifik:

Asian Development Bank (ADB), Asian Disaster Preparedness Centre (ADPC), Asian Disaster Reduction and Response Network (ADRRN), Community and Family Services International (CFSI), Food and Agriculture Organization (FAO), Humanitarian Forum Indonesia, International Committee of the Red Cross (ICRC), International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), International Organization for Migration (IOM), International Strategy for Disaster Reduction (ISDR), Mercy Malaysia, Muhammadiyah, Norwegian Refugee Council (NRC), Oxfam, Pacific Disaster Centre (PDC), Save the Children, SEEDS-India, UN Development Programme (UNDP), UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UN Children's Fund (UNICEF), UN Population Fund (UNFPA), UN Women, World Food Programme (WFP), World Health Organization (WHO), World Vision International (WVI).

Kami juga berterima kasih kepada tim kami di Kantor Regional OCHA untuk Asia dan Pasifik: Oliver Lacey-Hall, Rajan Gengaje dan Kristen Knutson, serta rekan-rekan kerja di OCHA di kawasan Asia-Pasifik, Markas Besar dan Kantor Regional untuk Amerika Latin dan Karibia.



OCHA

OCHA-ROAP

Regional Office for Asia and the Pacific,
Executive Suite, Second Floor,
UNCC Building, Rajdamnern Nok Avenue,
Bangkok 10200, Thailand.

Tel: +66 2288 1234

E-mail: ocha-roap@un.org

For more information: www.unocha.org/roap

DAFTAR ISI

Akronim

I. PENGANTAR ►	9
II. ARSITEKTUR KEMANUSIAAN INTERNASIONAL ►	12
A. Kegiatan Kemanusiaan Berdasarkan Aturan	12
Kesepakatan-kesepakatan regulasi antar-negara yang mengikat	13
Kesepakatan-kesepakatan regulasi antar-negara yang tidak mengikat	14
Pedoman sukarela yang mengatur aksi kemanusiaan	15
B. Aktor-aktor Kemanusiaan	19
Perserikatan Bangsa-Bangsa	19
Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah	20
Organisasi-organisasi dan forum-forum antar-pemerintah di tingkat regional	22
Organisasi-organisasi nonpemerintah	26
Pemerintah-pemerintah yang memberikan bantuan	27
Sektor swasta	27
C. Mekanisme-mekanisme koordinasi internasional	28
Mekanisme-mekanisme tingkat global	28
Mekanisme-mekanisme tingkat negara	30
Mekanisme-mekanisme “penjembatanan”	32
III. PERANGKAT-PERANGKAT DAN LAYANAN-LAYANAN UNTUK RESPON BENCANA ►	36
A. Mobilisasi Tim Teknis	36
Bilateral	39
Antar-pemerintah	41
Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah	43
B. Mobilisasi Layanan Teknis	45
Aset-aset dan persediaan bantuan darurat	45
Jejaring-jejaring teknis	48
Jadwal siaga dan <i>surge</i>	49

DAFTAR ISI

C. Mobilisasi Sumber Daya Keuangan	51
Mekanisme “dana cepat”	51
Perangkat strategis dan penggalangan dana	55
D. Pengelolaan Informasi dan Pengkajian	57
Pengelolaan informasi keseluruhan	58
Perangkat pelaporan	59
Situs web	60
Citra satelit dan pemetaan	62
Pengkajian-pengkajian	63
IV. PERANGKAT DAN LAYANAN UNTUK KESIAPSIAGAAN RESPON BENCANA ►	65
A. Pelatihan Teknis	65
Pelatihan teknis internasional	66
Pelatihan teknis bilateral	71
B. Perencanaan Kesiapan	72
Kesiapsiagaan secara hukum	72
Paket dan misi kesiapsiagaan terpadu	74
Dukungan untuk Sistem Pengelolaan Insiden Nasional (NIMS)	75
C. Latihan-Latihan Simulasi	76
Latihan-latihan yang diprakarsai organisasi internasional	76
Latihan-latihan yang diprakarsai organisasi regional	78
D. Sistem Peringatan Dini	78
Ramalan cuaca	79
Banjir, tsunami dan multi-ancaman bahaya	79
V. ALAMAT-ALAMAT WEB ►	81

AKRONIM

AADMER	(ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response)	Perjanjian ASEAN tentang Penanggulangan Bencana dan Respon Keadaan Darurat
ACAPS	(Assessment Capacities Project)	Proyek Kapasitas Pengkajian
ACDM	(ASEAN Committee on Disaster Management)	Komite Penanggulangan Bencana ASEAN
ADB	(Asian Development Bank)	Bank Pembangunan Asia
ADMER Fund	(ASEAN Disaster Management and Emergency Relief Fund)	Dana Penanggulangan Bencana dan Bantuan Keadaan Darurat ASEAN
ADPC	(Asian Disaster Preparedness Centre)	Pusat Kesiapsiagaan Bencana Asia
ADRC	(Asian Disaster Reduction Centre)	Pusat Pengurangan Bencana Asia
ADRRN	(Asian Disaster Reduction and Response Network)	Jejaring Pengurangan dan Respon Bencana Asia
AHA Centre	(ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance of disaster management)	Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan untuk Penanggulangan Bencana ASEAN
ALNAP	(Active Learning Network for Accountability and Performance)	Jejaring Pembelajaran Aktif untuk Akuntabilitas dan Kinerja
APC-MADRO	(Asia-Pacific Conferences on Military Assistance to Disaster Relief Operations)	Konferensi Asia Pasifik tentang Bantuan Militer untuk Operasi-Operasi Bantuan Darurat Bencana
APDRF	(Asia-Pacific Disaster Response Fund) (ADB)	Dana Respon Bencana Asia Pasifik (ADB)
APEC	(Asia-Pacific Economic Community)	Masyarakat Ekonomi Asia Pasifik
APEC EPWG	(APEC Emergency Preparedness Working Group)	Kelompok Kerja Kesiapsiagaan Keadaan Darurat APEC
APG	(AADMER Partnership Group) (ASEAN)	Kelompok Kemitraan AADMER (ASEAN)
APHP	(Asia-Pacific Humanitarian Partnership)	Kemitraan kemanusiaan Asia Pasifik
APRSAP	(Asia-Pacific Regional Space Agency Forum)	Forum Badan Keruangan Regional Asia Pasifik
ARDEX	(ASEAN Regional Disaster Emergency Response Simulation Exercises)	Latihan-Latihan Simulasi Respon Keadaan Darurat Bencana ASEAN
ARF	(ASEAN Regional Forum)	Forum Regional ASEAN
ARF-DiREx	(ASEAN Regional Forum (ARF) Disaster Relief Exercise)	Forum Regional ASEAN – Latihan Bantuan Darurat Bencana
ASEAN	(Association of Southeast Asian Nations)	Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara
CADRE	(Community Action for Disaster Response) (ADPC)	Aksi Masyarakat untuk Respon Bencana (ADPC)
CAP	(Consolidated Appeal Process)	Proses Penggalangan Dana Terkonsolidasi
CDAC	(Communicating with Disaster-Affected Communities)	Komunikasi dengan Masyarakat Terdampak Bencana
CERF	(Central Emergency Response Fund)	Dana Respon Keadaan Darurat Pusat
CSR	(Corporate Social Responsibility)	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
DART	(Disaster Assistance Response Team) (USAID)	Tim Respon Bantuan Bencana (USAID)
DFID	(Department for International Development) (UK)	Departemen untuk Pembangunan Internasional (UK)
DMRS	(Disaster Monitoring and Response System) (ASEAN)	Sistem Pemantauan dan Respon Bencana (ASEAN)
DPRK	(Democratic People's Republic of Korea)	Republik Demokratik Rakyat Korea
DREF	(Disaster Relief Emergency Fund) (IFRC)	Dana Keadaan Darurat Bantuan Bencana (IFRC)
DRR	(Disaster risk reduction)	Pengurangan Risiko Bencana (PRB)
EAS	(East Asia Summit)	Pertemuan Tingkat Tinggi Asia Timur
ECB Project	(Emergency Capacity-Building Project)	Proyek Pengembangan Kapasitas Keadaan Darurat
ECHO	(European Commission Humanitarian Office)	Kantor Kemanusiaan Komisi Eropa
ECOSOC	(UN Economic and Social Council)	Dewan Ekonomi dan Sosial PBB
EEC	(Environmental Emergencies Centre) (OCHA/UNEP)	Pusat Keadaan Darurat Lingkungan (OCHA/UNEP)
EOC	(Emergency Operations Centre)	Pusat Operasi Keadaan Darurat
ERAT	(Emergency Rapid Assessment Team) (ASEAN)	Tim Pengkajian Cepat Keadaan Darurat (ASEAN)
ERC	(Emergency Relief Coordinator)	Emergency Relief Coordinator
ERF	(Emergency Response Fund)	Dana Respon Keadaan Darurat
ERU	(Emergency Response Unit) (IFRC)	Unit Respon Keadaan Darurat (IFRC)
EU	(European Union)	Uni Eropa
FACT	(Field Assessment Coordination Team) (IFRC)	Tim Koordinator Pengkajian Lapangan (IFRC)
FAO	(Food and Agriculture Organization)	Organisasi Pangan dan Pertanian
FEAT	(Flash Environmental Assessment Tool)	Perangkat Pengkajian Lingkungan Cepat
FTS	(Financial Tracking Service)	Layanan Pelacakan Keuangan
GDACS	(Global Disaster Alert and Coordination System)	Sistem Peringatan Siaga dan Koordinasi Bencana Global
GenCap	(Gender Standby Capacity Roster)	Penjadwalan Kapasitas Siaga Gender

AKRONIM

GFDRR	<i>(Global Facility for Disaster Risk Reduction) (World Bank)</i>	Fasilitas Global untuk Pengurangan Risiko Bencana (World Bank)
GIS	<i>(Geographic information systems)</i>	Sistem Informasi Geografi
HAP	<i>(Humanitarian Accountability Partnership)</i>	Kemitraan Akuntabilitas Kemanusiaan
HC	<i>(Humanitarian Coordinator)</i>	Humanitarian Coordinator
HCT	<i>(Humanitarian Country Team)</i>	Tim Kemanusiaan Negara
HFA	<i>(Hyogo Framework Agreement)</i>	Kerangka Aksi Hyogo
HIC	<i>(Humanitarian Information Centre)</i>	Pusat Informasi Kemanusiaan
IASC	<i>(Inter-Agency Standing Committee)</i>	Komite Tetap Antar-Lembaga
IASC IAES	<i>(IASC Inter-Agency Emergency Simulation)</i>	Simulasi Keadaan Darurat Antar-Lembaga IASC
ICRC	<i>(International Committee of the Red Cross)</i>	Komite Internasional Palang Merah
ICS	<i>(Incident command system)</i>	Sistem Komando Insiden
ICT	<i>(Information communications technology)</i>	Teknologi komunikasi informasi
ICVA	<i>(International Council of Voluntary Agencies)</i>	Dewan Internasional Lembaga-Lembaga Sukarela
IDPs	<i>(Internally displaced persons)</i>	Pengungsi internal
IDRL	<i>(International Disaster Response Laws, Rules and Principles)</i>	Undang-Undang, Peraturan, dan Prinsip-Prinsip Respon Bencana Internasional
IEC	<i>(INSARAG External Classification)</i>	Klasifikasi Eksternal INSARAG
IFRC	<i>(International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies)</i>	Federasi Internasional Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah
IHL	<i>(International humanitarian law)</i>	Hukum humaniter internasional
IHP	<i>(International Humanitarian Partnership)</i>	Kemitraan Kemanusiaan Internasional
IM	<i>(Information management)</i>	Pengelolaan informasi
INEE	<i>(Inter-Agency Network for Education in Emergencies)</i>	Jejaring Antar-Lembaga untuk Pendidikan dalam Keadaan Darurat
INSARAG	<i>(International Search and Rescue Advisory Group)</i>	Kelompok Penasehatan Pencarian dan Penyelamatan Internasional
IOM	<i>(International Organization for Migration)</i>	Organisasi Internasional untuk Migrasi
JICA	<i>(Japan International Cooperation Agency)</i>	Badan Kerja Sama Internasional Jepang
MCDA	<i>(Military and civil-defence assets)</i>	Aset-aset militer dan pertahanan sipil
MIRA	<i>(Multi-Cluster Initial Rapid Assessment)</i>	Pengkajian Cepat Awal Multi-Cluster
MOU	<i>(Memorandum of understanding)</i>	Nota kesepahaman
MPP	<i>(Minimum Preparedness Package) (OCHA)</i>	Paket Kesiapsiagaan Minimum (OCHA)
NDMO	<i>(National disaster management organization)</i>	Badan Penanggulangan Bencana Nasional
NDRRM	<i>(SAARC Natural Disaster Rapid Response) Mechanism</i>	Mekanisme Respon Bencana Alam SAARC
NDRRMC	<i>(National Disaster Risk Reduction and Management Council) (Philippines)</i>	Dewan Pengurangan dan Manajemen Risiko Bencana Nasional (Filipina)
NGO	<i>(Non-governmental organization)</i>	Organisasi non-pemerintah /Lembaga Swadaya Masyarakat
NOAA	<i>(National Oceanic and Atmospheric Administration) (USA)</i>	Administrasi Kelautan dan Atmosferik Nasional (AS)
NORCAP	<i>(Norwegian Refugee Council's Standby Roster)</i>	Penjadwalan Siaga Norwegian Refugee Council
OCHA	<i>(UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)</i>	Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan
OCHA-FCSS	<i>(OCHA Field Coordination Support Section)</i>	Bagian Bantuan Koordinasi Lapangan OCHA
OCHA-HAT	<i>(Humanitarian Advisory Team)</i>	Tim Penasehatan Kemanusiaan OCHA
OCHA-IMU	<i>(Information Management Unit)</i>	Unit Pengelolaan Informasi OCHA
OCHA-ROAP	<i>(OCHA Regional Office for Asia and the Pacific)</i>	Kantor Regional OCHA untuk Asia Pasifik
OCHA-ROP	<i>(OCHA Regional Office for the Pacific)</i>	Kantor Regional OCHA untuk Pasifik
OHCHR	<i>(UN Office of the High Commissioner for Human Rights)</i>	Kantor Komisiner Tinggi untuk Hak Asasi Manusia PBB
OSOCC	<i>(On-Site Operations Coordination Centre)</i>	Pusat Koordinasi Operasi-Operasi di Tempat
PDC	<i>(Pacific Disaster Center)</i>	Pusat Bencana Pasifik
PDN	<i>(Pacific Disaster Net)</i>	Jejaring Bencana Pasifik
PHT	<i>(Pacific Humanitarian Team)</i>	Tim Kemanusiaan Pasifik
PIF	<i>(Pacific Islands Forum)</i>	Forum Kepulauan Pasifik
ProCap	<i>(Protection Standby Capacity Roster)</i>	Penjadwalan Kapasitas Siaga untuk Perlindungan
PTWS	<i>(Pacific Tsunami Warning System)</i>	Sistem Peringatan Tsunami Pasifik

AKRONIM

RCRC	<i>(International Red Cross and Red Crescent Movement)</i>	Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional
RDRT	<i>(Regional Disaster Response Team) (IFRC)</i>	Tim Respon Bencana Region (IFRC)
RF	<i>(Recovery Framework)</i>	Kerangka Kerja Pemulihan
RFL	<i>(Restoring Family Links) (ICRC)</i>	Pemulihan Hubungan Keluarga (ICRC)
RIMES	<i>(Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System)</i>	Sistem Peringatan Dini Multi-Ancaman Terpadu Regional
SAARC	<i>(South Asian Association for Regional Cooperation)</i>	Asosiasi Asia Selatan untuk Kerja Sama Regional
SADKN	<i>(South Asian Disaster Knowledge Network) (SAARC)</i>	Jejaring Pengetahuan Bencana Asia Selatan (SAARC)
SASOP	<i>(Standby arrangements and standard operating procedures) (ASEAN)</i>	Pengaturan siaga dan standar pelaksanaan baku (ASEAN)
SCHR	<i>(Steering Committee for Humanitarian Response)</i>	Komite Pengarah untuk Respon Kemanusiaan
SDMC	<i>(SAARC Disaster Management Centre)</i>	Pusat Penanggulangan Bencana SAARC
Sitrep	<i>(Situation report)</i>	Laporan situasi
SPC	<i>(Secretariat of the Pacific Community)</i>	Sekretariat Masyarakat Pasifik
UK	<i>(United Kingdom)</i>	Kerajaan Inggris Raya
UN	<i>(United Nations)</i>	Perserikatan Bangsa-Bangsa
UN-CM Coord	<i>(UN Humanitarian Civil-Military Coordination)</i>	Koordinasi Sipil-Militer untuk Kemanusiaan PBB
UNCT	<i>(UN Country Team)</i>	Tim Negara PBB
UNDAC	<i>(UN Disaster Assessment and Coordination)</i>	Pengkajian dan Koordinasi Bencana PBB
UNDP	<i>(UN Development Programme)</i>	Program Pembangunan PBB
UNEP	<i>(UN Environment Programme)</i>	Program PBB untuk Program Lingkungan
UNFPA	<i>(UN Population Fund)</i>	Kantor PBB untuk Dana Kependudukan
UN GA	<i>(UN General Assembly)</i>	Sidang Umum PBB
UNHCR	<i>(UN High Commissioner for Refugees)</i>	Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi Lintas Batas
UNHRD	<i>(UN Humanitarian Response Depot)</i>	Depot Respon Kemanusiaan PBB
UNICEF	<i>(UN Children's Fund)</i>	Dana PBB untuk Anak
UNISDR	<i>(UN International Strategy for Disaster Reduction)</i>	Strategis Internasional PBB untuk Pengurangan Bencana
UNOSAT	<i>(UNITAR's Operational Satellite Applications Programme)</i>	Program Aplikasi Satelit Operasional UNITAR
UN RC	<i>(UN Resident Coordinator)</i>	Resident Coordinator PBB
UN-SPIDER	<i>(UN Platform for Space-based Information for Disaster Management and Emergency Response)</i>	Platform PBB untuk Informasi Berbasis Keruangan untuk Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat
USA	<i>(United States of America)</i>	Amerika Serikat
USAID	<i>(United States Agency for International Development)</i>	Badan Amerika Serikat untuk Pembangunan Internasional
USAID/OFDA	<i>(USAID Office of Foreign Disaster Assistance)</i>	Kantor Bantuan Bencana Luar Negeri USAID
USAR	<i>(Urban search and rescue)</i>	Pencarian dan penyelamatan perkotaan
US\$	<i>(US dollar)</i>	Dollar AS
USG	<i>(Under-Secretary-General) (UN)</i>	Under-Secretary-General (PBB)
USGS	<i>(United States Geological Service)</i>	Layanan Geologis Amerika Serikat
VOSOCC	<i>(Virtual On-Site Operations Coordination Centre)</i>	Pusat Koordinasi Operasi-Operasi di Tempat secara Virtual
WFP	<i>(World Food Programme)</i>	Program Pangan Dunia
WHO	<i>(World Health Organization)</i>	Organisasi Kesehatan Dunia

Apa tujuan panduan ini?

“Respon Bencana di Asia dan Pasifik: Panduan Perangkat dan Layanan Internasional” (*Disaster Response in Asia and the Pacific: A Guide to International Tools and Services*), selanjutnya disebut sebagai “panduan”, dirancang untuk membantu para manajer di bidang bencana di pemerintah-pemerintah nasional untuk mendapatkan pengetahuan dasar tentang bagaimana menggunakan perangkat dan layanan-layanan internasional.

Panduan ini bukan merupakan sebuah resep. Panduan ini bertujuan untuk mendukung makin berkembangnya kemampuan respon dan kesiapsiagaan respon bencana yang ada di tingkat nasional di seluruh Asia dan Pasifik.

Untuk siapa panduan ini ditujukan?

Panduan ini ditujukan untuk badan-badan penanggulangan bencana nasional dan kementerian-kementerian yang terlibat dalam respon dan kesiapsiagaan bencana. Panduan ini juga merupakan dokumen rujukan bagi para wakil organisasi-organisasi antar-pemerintah, para aktor dari masyarakat sipil dan orang-orang yang terdampak bencana.

Apa ruang lingkup panduan ini?

Panduan ini berkonsentrasi pada perangkat dan layanan-layanan kunci yang dapat membantu para manajer bencana selama tahap respon dan kesiapsiagaan respon bencana dalam siklus program bencana. Panduan ini tidak mencakup perangkat dan layanan-layanan yang dijangkau oleh upaya-upaya pengurangan risiko bencana (PRB) ataupun instrumen-instrumen untuk pemulihan bencana berjangka panjang. Panduan ini menyertakan sejumlah perangkat dan layanan yang relevan dalam situasi-situasi konflik. Panduan ini tidak mencakup perangkat atau layanan yang sedang dikembangkan.

Bagaimana panduan ini dapat digunakan?

- ▶ Untuk menciptakan pemahaman yang sama tentang perangkat dan layanan-layanan yang ada di kawasan Asia dan Pasifik.
- ▶ Untuk mendukung pengambilan keputusan darurat di dalam bencana-bencana berskala kecil, menengah dan besar.
- ▶ Untuk membantu dalam mencari ahli teknis internasional sebelum dan pada saat bencana.
- ▶ Untuk memfasilitasi kemitraan-kemitraan antar aktor kemanusiaan.
- ▶ Untuk menjadi masukan dalam kurikulum akademis bagi institusi-institusi pembelajaran di tingkat nasional dan regional.

Bagaimana susunan panduan ini?

Panduan ini mempunyai tiga bagian utama: [I] Arsitektur Kemanusiaan Internasional, [II] Perangkat dan Layanan-Layanan untuk Respon Bencana, dan [III] Perangkat dan Layanan-Layanan Kesiapsiagaan Respon Bencana. Panduan ini sengaja membuat susunan yang terbalik yaitu menempatkan respon sebelum kesiapsiagaan bencana. Profil-profil tentang perangkat dan layanan-layanan respon sengaja ditampilkan

sebelum profil-profil tentang kesiapsiagaan respon bencana untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat aktivitas-aktivitas kesiapsiagaan tertentu dan bagaimana aktivitas-aktivitas tersebut mendukung upaya-upaya respon bencana.

Mengapa panduan ini dikembangkan?

Panduan ini telah dikembangkan dalam rangka menanggapi himbauan Negara-Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan para pemangku kepentingan kemanusiaan lain dalam *Regional Humanitarian Partnership Workshop for the Asia Pacific Region* di tahun 2011 yang diselenggarakan di Shanghai, Cina untuk menyusun satu panduan yang membantu para manajer bencana dalam memahami interaksi antara mekanisme-mekanisme respon kemanusiaan di tingkat nasional, regional, dan internasional.

Panduan versi ini disusun dengan berkonsultasi dengan sejumlah 75 pejabat pemerintah di seluruh Asia dan Pasifik dan lebih dari 50 wakil organisasi antar-pemerintah, Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, LSM-LSM nasional dan internasional, para penyandang dana dan lembaga-lembaga kunci lain di seluruh dunia.

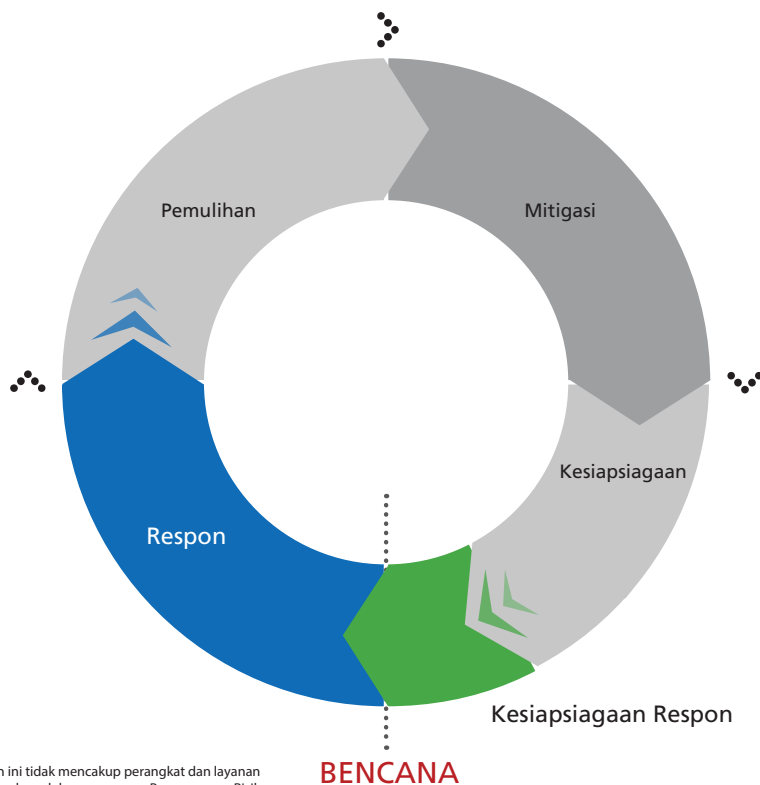
APAKAH DEFINISI RESPON DAN KESIAPSIAGAAN RESPON BENCANA?¹

RESPON BENCANA: penyediaan bantuan atau intervensi selama atau segera setelah bencana untuk menjaga kelangsungan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar bagi orang-orang yang terdampak.

KESIAPSIAGAAN RESPON BENCANA: aktivitas-aktivitas sebelum bencana yang dilakukan untuk meminimalkan hilangnya nyawa, cedera atau kerusakan properti dalam sebuah bencana, dan untuk memastikan bahwa penyelamatan, bantuan darurat, rehabilitasi, dan layanan-layanan lain dapat disediakan menyusul setelah terjadinya bencana tersebut. Kesiapsiagaan untuk melakukan respon pertama dan segera disebut “kesiapsiagaan darurat”

¹ Diadaptasi dari OCHA, Disaster Preparedness for Effective Response: Guidance and Indicator Package for Implementing Priority 5 of the Hyogo Framework, Jenewa, 2008.

Ruang Lingkup Panduan: Respon & Kesiapsiagaan Respon



*Panduan ini tidak mencakup perangkat dan layanan yang dijangkau oleh upaya-upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB), termasuk upaya-upaya kesiapsiagaan yang masuk dalam Aksi Prioritas 5 Kerangka Aksi Hyogo

Bagian ini dibagi lagi menjadi tiga sub bagian sebagai berikut:

- A. KEGIATAN KEMANUSIAAN BERDASARKAN ATURAN
- B. PARA AKTOR KEMANUSIAAN
- C. MEKANISME-MEKANISME KOORDINASI INTERNASIONAL

A. KEGIATAN KEMANUSIAAN BERDASARKAN ATURAN

Orang-orang yang pertama merespon setiap keadaan darurat adalah orang-orang yang terdampak bencana dan pemerintah mereka. Ketika pemerintah yang terdampak bencana meminta dukungan kemanusiaan internasional, sistem-sistem legal nasional merupakan kerangka kerja utama yang harus diikuti dalam memastikan perlindungan terhadap orang-orang yang terdampak bencana.

Aksi kemanusiaan juga diatur oleh hukum kemanusiaan internasional dan hukum hak asasi manusia yang mengikat dan tidak mengikat, serta prinsip-prinsip kemanusiaan yaitu kemanusiaan, netralitas, imparsialitas, dan kemandirian.

KEMANUSIAAN (HUMANITY)	<i>Penderitaan manusia harus diatasi di mana pun berada. Aksi kemanusiaan bertujuan untuk melindungi nyawa dan kesehatan dan memastikan adanya penghargaan terhadap umat manusia.</i>
NETRALITAS (NEUTRALITY)	<i>Para aktor kemanusiaan tidak boleh berpihak dalam perselisihan/ peperangan atau terlibat dalam kontroversi politik, ras, agama atau ideologi</i>
IMPARSIALITAS (IMPARTIALITY)	<i>Aksi kemanusiaan harus dijalankan atas dasar kebutuhan semata tanpa memperdulikan kebangsaan, ras, gender, keyakinan keagamaan, kelas atau pandangan politis</i>
KEMANDIRIAN (INDEPENDENCE)	<i>Aksi kemanusiaan harus bersifat otonom dari tujuan politis, ekonomi, militer atau tujuan-tujuan lain yang mungkin dimiliki oleh aktor-aktor di wilayah dimana aksi kemanusiaan sedang dilaksanakan</i>

Tujuan utama aksi kemanusiaan internasional adalah untuk mendukung upaya-upaya nasional dalam melindungi nyawa, penghidupan, dan martabat orang-orang yang membutuhkan.

APA TUJUAN KESEPAKATAN-KESEPAKATAN ATURAN KEMANUSIAAN?

Aturan terhadap aksi kemanusiaan internasional mempunyai tiga fungsi utama:

- ▶ Melindungi prinsip-prinsip kedaulatan dan integritas territorial
- ▶ Menjamin hak-hak dari dan perlindungan yang paling mendasar terhadap masyarakat-masyarakat yang terdampak bencana
- ▶ Merasionalisasi peran dan tanggung jawab antar para pelaku kemanusiaan

Regulasi aksi kemanusiaan internasional di Asia dan Pasifik dapat dipahami menurut tiga kategori: [a] kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antar-negara, [b] kesepakatan-kesepakatan regulasi yang tidak mengikat antar-negara, dan [c] pedoman sukarela yang mengatur aksi kemanusiaan yang dilakukan aktor-aktor negara dan non-negara.

Panduan ini tidak memuat daftar semua dokumen aturan yang dapat diterapkan dalam sebuah bencana namun fokus pada beberapa yang dipandang paling relevan bagi aksi kemanusiaan di regional.

KESEPAKATAN-KESEPAKATAN ATURAN ANTAR-NEGARA YANG MENGIKAT

Ada dua kesepakatan yang mengikat negara-negara di Asia dan Pasifik yang mengatur kesiapsiagaan dan aksi respon bencana:

1. Perjanjian ASEAN tentang Penanggulangan Bencana dan Respon Bencana (*ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response/AADMER*)
2. Mekanisme Respon Cepat terhadap Bencana Alam (*Natural Disaster Rapid Response Mechanism/NDRRM*) SAARC

Perjanjian ASEAN tentang Penanggulangan Bencana dan Respon Bencana (AADMER) adalah sebuah kerangka kerja multi-ancaman bahaya dan kebijakan regional yang mengikat secara hukum untuk kerja sama, koordinasi, bantuan teknis, dan mobilisasi sumber daya dalam semua aspek penanggulangan bencana di 10 negara Anggota ASEAN². AADMER bertujuan untuk menyediakan satu mekanisme yang efektif untuk terwujudnya pengurangan korban jiwa dan kerugian asset-aset sosial, ekonomi dan lingkungan secara substansial, dan untuk secara bersama-sama melakukan respon keadaan darurat melalui upaya-upaya nasional yang terpadu dan kerja sama regional dan internasional yang ditingkatkan. Program Kerja AADMER untuk periode 2010-2015 merupakan pengejawantahan maksud dan semangat AADMER dalam rencana aksi yang lengkap dan menyeluruh.

Melalui Prosedur Tetap untuk Penyelenggaraan Kesiagaan Regional dan Koordinasi Operasi-Operasi Bantuan Bencana dan Respon Keadaan Darurat Bersama (SASOP), AADMER memungkinkan Negara-negara Anggota ASEAN untuk memobilisasi dan mengirimkan sumber daya untuk respon darurat. SASOP ditandatangani Negara-negara Anggota ASEAN pada 2005 dan mulai diberlakukan pada Desember 2009.

Mekanisme Respon Cepat terhadap Bencana Alam (Natural Disaster Rapid Response Mechanism/NDRRM) dari Asosiasi Asia Selatan untuk Kerjasama Regional (*South Asian Association for Regional Cooperation/SAARC*) adalah sebuah kesepakatan regional dalam penanggulangan bencana yang memperkuat mekanisme-mekanisme yang ada untuk respon cepat terhadap bencana. NDRRM mewajibkan Negara-negara Anggota SAARC³ untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan administratif dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Hal ini termasuk tindakan-tindakan untuk meminta dan menerima bantuan; melakukan pengkajian kebutuhan; memobilisasi peralatan, personil, materi-materi dan fasilitas-fasilitas lain; membuat pengaturan kesiagaan tingkat regional, termasuk persediaan

² Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (Association of South East Asian Nations/ASEAN) beranggotakan negara-negara berikut: Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Viet Nam.

³ Negara-negara Anggota Asosiasi Asia Selatan untuk Kerjasama Regional (SAARC) adalah Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka.

darurat; dan memastikan adanya kendali mutu terhadap barang-barang bantuan darurat. NDRRM ditandatangani oleh Negara-negara Anggota SAARC pada 2011 dan saat ini sedang dalam proses untuk diratifikasi oleh mereka.

KESEPAKATAN-KESEPAKATAN ATURAN ANTAR-NEGARA YANG TIDAK MENGIKAT

Ada sejumlah kesepakatan penting antar negara-negara yang tidak mengikat yang juga mengatur aksi kemanusiaan internasional untuk mewujudkan respon bencana yang efektif, sebagai berikut:

1. Resolusi Sidang Umum PBB 46/182⁴
2. Pedoman Federasi Internasional Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (*International Federation of the Red Cross Red Crescent Societies/IFRC*) untuk Fasilitasi dan Regulasi Dalam Negeri tentang Bantuan Bencana Internasional dan Bantuan Pemulihan Awal
3. Resolusi Organisasi Kepabeanan Dunia (*World Customs Organization*) tentang Peran Pabean dalam Bantuan Darurat Bencana Alam
4. Kesepakatan FRANZ untuk Kawasan Pasifik Selatan

Resolusi Sidang Umum PBB 46/182 menetapkan peran PBB dalam mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan internasional ketika sebuah pemerintah meminta bantuan eksternal. Resolusi tersebut membentuk sejumlah mekanisme PBB untuk memperkuat keefektifan aksi kemanusiaan internasional, yaitu Dana Respon Keadaan Darurat Pusat (*Central Emergency Response Fund/CERF*), Proses Penggalangan Dana Terkonsolidasi (*Consolidated Appeal Process/CAP*), *Emergency Relief Coordinator (ERC)*, dan Komite Tetap Antar-Lembaga (*Inter-Agency Standing Committee/IASC*). Resolusi 46/182 diadopsi secara aklamasi oleh Negara-negara Anggota PBB pada 1991.

APA YANG RESOLUSI 46/182 KATAKANTENTANG KEDAULATAN?

“Kedaulatan, integritas teritorial dan kesatuan nasional negara-negara harus dihargai secara penuh sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam konteks ini, bantuan kemanusiaan harus diberikan atas persetujuan negara yang terdampak dan pada dasarnya atas dasar permintaan dari negara yang terdampak.”

Pedoman Fasilitasi dan Regulasi Dalam Negeri tentang Bantuan Bencana Internasional dan Bantuan Pemulihan Awal (*Guideline for the Domestic Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery Assistance IFRC*), juga dikenal sebagai panduan IDRL, merupakan serangkaian rekomendasi yang berupaya membantu pemerintah-pemerintah dalam menyusun kerangka kerja hukum nasional untuk operasi-operasi internasional dalam memberikan bantuan darurat bencana. Pedoman ini menanggapi isu-isu termasuk perihal meminta dan menerima bantuan internasional; menerbitkan visa dan ijin kerja bagi personel kemanusiaan internasional; mengurus kepabeanan untuk barang-barang bantuan darurat; mengurus perpajakan; dan mendapatkan status personel legal dalam negeri

⁴ Selain resolusi 46/182, ada banyak resolusi Sidang Umum PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council/ECOSOC) dan Dewan Keamanan yang mengatur aksi-aksi kemanusiaan internasional. Resolusi-resolusi ini dapat diakses di www.unocha.org/about-us/publications/flagship.

atau hukum. Pedoman secara aklamasi diadopsi oleh semua negara yang menyepakati Konvensi Jenewa dan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional pada Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang ke-30 pada 2007.

Resolusi Organisasi Kepabeanaan Dunia (WCO) tentang Peran Pabean dalam Bantuan Bencana Alam menyoroti kebutuhan akan kesiapsiagaan bencana dalam administrasi kepabeanaan. Resolusi ini mendorong negara-negara untuk melaksanakan langkah-langkah yang mempercepat dan membantu pengiriman bantuan⁵. Resolusi ini secara aklamasi diadopsi oleh Negara-negara Anggota WCO pada 2011.

Di antara kesepakatan-kesepakatan regional yang tidak mengikat, ada **Perjanjian Perancis, Australia, dan Selandia Baru (France, Australia and New Zealand/ FRANZ)** yang memfasilitasi rasionalisasi operasi-operasi darurat internasional dalam situasi bencana alam di kawasan Pasifik Selatan. Secara khusus, perjanjian ini membuat para penandatangan – yaitu Perancis, Australia dan Selandia Baru – berkomitmen untuk melakukan pertukaran informasi untuk memastikan penggunaan aset dan sumber daya lain dengan sebaik-baiknya untuk operasi bantuan darurat. Perjanjian-perjanjian empat pihak di antara negara-negara donor lain yang menawarkan bantuan juga telah dibuat dengan mengacu pada Perjanjian FRANZ.⁶

PEDOMAN SUKARELA YANG MENGATUR AKSI KEMANUSIAAN

Pedoman-pedoman sukarela ini mengatur hubungan antar aktor-aktor kemanusiaan dan antara aktor-aktor kemanusiaan dengan orang-orang yang terdampak. Pedoman-pedoman ini berlaku bagi berbagai macam aktor dalam masyarakat kemanusiaan internasional. Daftar berikut ini berfokus pada sejumlah pedoman kemanusiaan yang paling penting, namun tidak bersifat menyeluruh.

1. Kode Perilaku untuk Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dan LSM dalam Bantuan Darurat Bencana (*Code of Conduct for the RCRC Movement and NGOs in Disaster Relief*)
2. Proyek Sphere: Piagam Kemanusiaan dan Standar-Standar Minimum dalam Respon Kemanusiaan (Buku Pegangan Sphere) [*Sphere Project: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response (Sphere Handbook)*]
3. Pedoman Operasional IASC tentang Perlindungan Orang-orang dalam Situasi-situasi Bencana Alam (*IASC Operational Guidelines on the Protection of Persons in Situations of Natural Disasters*)
4. Prinsip-Prinsip Panduan tentang Pengungsian Internal (*Guiding Principles on Internal Displacement*)
5. Pedoman Oslo tentang Penggunaan Aset-Aset Militer and Pertahanan Sipil Asing dalam Bantuan Darurat Bencana (*Oslo Guidelines on the Use of Foreign Military and Civil-Defence Assets in Disaster Relief*)

⁵ Seperti tercantum dalam Bab 5 dalam Aneks Khusus J dalam Revisi Konvensi Kyoto.

⁶ Perjanjian FRANZ berlaku untuk Kepulauan Cook, Fiji, Polinesia Perancis, Kiribati, Nauru, Kaledonia Baru, Niue, Papua Nugini, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Tokelau, Tuvalu, Vanuatu, Wallis dan Futuna, dan negara-negara dan teritori-teritori Pasifik Selatan lainnya kasus per kasus

6. Pedoman Regional Asia Pasifik tentang Penggunaan Aset-aset Militer Asing dalam Operasi-operasi Respon Bencana Alam (*Asia-Pacific Regional Guidelines for the Use of Foreign Military Assets in Natural Disaster Response Operations*)
7. Manual Lapangan tentang Pengelolaan Jenazah setelah Bencana (*Management of Dead Bodies after Disasters Field Manual*)
8. Pedoman untuk Tanggap Darurat Lingkungan (*Guidelines for Environmental Emergencies*)
9. Pedoman IASC untuk Intervensi-intervensi Kekerasan Berbasis Gender dalam Situasi Kemanusiaan (*IASC Guidelines for Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Settings*)
10. Buku Pegangan IASC tentang Gender dalam Aksi Kemanusiaan (*IASC Gender Handbook in Humanitarian Action*)

Sebelum menjelaskan masing-masing pedoman sukarela tersebut secara terperinci, penting untuk diingat bahwa sebuah prakarsa sedang dikembangkan untuk mengumpulkan dan mengharmonisasikan begitu banyaknya pedoman dan standar untuk mengatur aksi kemanusiaan. Prakarsa ini disebut Prakarsa Standar-Standar Bersama (*Joint Standards Initiative*) dan diprakarsai bersama oleh Proyek Akuntabilitas Kemanusiaan (*Humanitarian Accountability Project/HAP*), *People in Aid* dan Proyek Sphere.

Kode Perilaku Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dan LSM dalam Bantuan Darurat Bencana adalah kode perilaku sukarela yang dianut oleh Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dan LSM-LSM yang berpartisipasi. Kode perilaku ini berisi 10 prinsip yang menjadi komitmen bagi para lembaga penanda tangan untuk ditaati dalam kerja respon bencana dan menjelaskan hubungan yang harus mereka jalin dengan masyarakat yang terdampak, pemerintah-pemerintah penyandang dan penerima dana, dan sistem PBB. Hingga saat ini, ada 492 organisasi terpisah yang telah menandatangani Kode Perilaku ini. Untuk melihat daftar penanda tangan atau tertarik untuk menjadi penanda tangan Kode Perilaku, silahkan melihat ke www.ifrc.org.

Proyek Sphere: Piagam Kemanusiaan dan Standar-Standar Minimum dalam Respon Kemanusiaan (Buku Pegangan Sphere) adalah serangkaian prinsip-prinsip umum dan standar-standar minimum universal yang diakui secara internasional dalam penyampaian bantuan kemanusiaan. Sphere bertujuan untuk meningkatkan kualitas bantuan yang diberikan kepada penduduk yang terkena dampak bencana, dan untuk meningkatkan akuntabilitas aktor-aktor kemanusiaan terhadap para konstituen mereka, donor dan orang-orang yang terdampak. Standar-standar Sphere memandu aksi kemanusiaan di empat bidang utama: [1] pasokan air, sanitasi dan penyuluhan kebersihan, [2] ketahanan pangan dan gizi, [3] hunian sementara, permukiman, dan barang-barang non pangan, dan [4] aksi kesehatan. Juga ada serangkaian standar pelengkap Sphere, yang diterbitkan terpisah namun disusun melalui semangat dan proses konsultasi yang sama dengan Buku Pegangan Sphere. Buku-buku yang berisi standar-standar pelengkap tersebut antara lain adalah:

- Standar-Standar Minimum untuk Pendidikan dalam Keadaan Darurat, Krisis Kronis, dan Rekonstruksi Dini (*Minimum Standards for Education in Emergencies, Chronic Crises and Early Reconstruction/MSEE*) [2008]⁷ dari Jejaring Antar-Lembaga untuk Pendidikan dalam Keadaan Darurat (*Inter-Agency Network for Education in Emergencies/INEE*)

⁷ MSEE dikembangkan pada 2004. MSEE dikenal sebagai Standar-standar Pendamping Sphere pada 2008.

- Paket Layanan Awal Minimum untuk Kesehatan Reproduksi dalam Situasi-situasi Krisis (*Minimum Initial Service Package for Reproductive Health in Crisis Situations/MISP*) [2010]
- Pedoman dan Standar-standar Penanganan Ternak dalam Keadaan Darurat (*Livestock Emergency Guidelines and Standards/LEGS*) [2011]
- Standar-Standar Minimum untuk Pemulihan Ekonomi setelah Krisis (*Minimum Standards for Economic Recovery after Crisis*) [2011] dari Jejaring Perusahaan Kecil di Bidang Pendidikan dan Penyuluhan (*Small Enterprise Education and Promotion Network/SEEP Network*)

Proyek Sphere bukanlah sebuah organisasi berbasis keanggotaan; Proyek Sphere diatur oleh sebuah Dewan yang terdiri dari para wakil dari jejaring lembaga-lembaga kemanusiaan di tingkat global.

Standar-Standar HAP dalam Akuntabilitas Kemanusiaan (HAP Standards in Humanitarian Accountability) merupakan serangkaian standar sukarela lainnya untuk meningkatkan kualitas aksi kemanusiaan. Rangkaian standar HAP mencakup satu sistem sertifikasi yang bersifat melengkapi bagi lembaga-lembaga kemanusiaan yang memungkinkan mereka menunjukkan kepatuhan melalui pembuktian praktik-praktik baik dalam aksi kemanusiaan. Sertifikasi HAP berlaku untuk tiga tahun. Saat ini ada 87 lembaga di seluruh dunia yang menjadi anggota HAP; 15 diantaranya telah mendapatkan sertifikasi HAP. Untuk mendapatkan daftar lengkap lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan HAP, lihat di <http://www.hapinternational.org/members.aspx>. Proses untuk menjadi anggota HAP memerlukan waktu sekitar 30 hari. Untuk mengajukan permintaan menjadi anggota, lihat <http://www.hapinternational.org/members/how-to-apply.aspx>.

Seperti apa sertifikasi HAP?



Pedoman Operasional IASC tentang Perlindungan Orang-orang dalam Situasi-situasi Bencana Alam mendorong dan memfasilitasi satu pendekatan berbasis hak-hak dalam bantuan darurat bencana. Secara khusus, pedoman ini menghimbau para aktor kemanusiaan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia diintegrasikan ke dalam semua upaya respon dan pemulihan bencana, dan bahwa orang-orang yang terdampak bencana sepenuhnya dimintai pendapat dan dapat berpartisipasi dalam semua tahapan respon bencana. IASC menerbitkan Pedoman Operasional ini pada 2011. Pedoman ini didasarkan pada hukum hak-hak asasi manusia dan standar-standar akuntabilitas kemanusiaan yang sudah ada.

Prinsip-prinsip Panduan tentang Pengungsian Internal mengidentifikasi hak-hak dan jaminan-jaminan yang berkenaan dengan perlindungan bagi orang-orang; dari pengungsian paksa kepada perlindungan serta bantuan untuk mereka selama

pengungsian dan selama pemulangan atau pemukiman kembali dan reintegrasi. Prinsip-prinsip Panduan ini dikembangkan oleh PBB pada 1998.

Pedoman Oslo tentang Penggunaan Aset-aset Militer dan Pertahanan Sipil Asing dalam Bantuan Darurat Bencana mengatur tentang penggunaan aset-aset militer dan pertahanan sipil asing dalam operasi-operasi internasional untuk bantuan darurat bencana. Pedoman ini menekankan prinsip bahwa penggunaan aset-aset militer dan pertahanan sipil asing harus diminta hanya bila tidak ada alternatif sipil yang sepadan. Pedoman ini juga berisi prinsip-prinsip dan prosedur-prosedur untuk meminta dan mengkoordinasikan aset-aset militer dan pertahanan sipil ketika sumber daya-sumber daya ini dipandang perlu dan tepat bagi respon kemanusiaan. Suatu Kelompok Konsultatif tentang Penggunaan Aset-Aset militer dan Pertahanan Sipil Asing mengelola Pedoman Oslo ini.

Pedoman Regional Asia Pasifik tentang Penggunaan Aset-Aset Militer Asing dalam Operasi-Operasi Respon Bencana Alam memperkuat prinsip-prinsip Pedoman Oslo dan memberikan konteks regional untuk Asia dan Pasifik. Pedoman ini dikembangkan pada tahun 2011 dan merupakan hasil dari Konferensi Asia Pasifik tentang Bantuan Militer untuk Operasi Bantuan Bencana (*APC-MADRO*) yang dihadiri 16 negara dari seluruh kawasan Asia Pasifik.

Manual Lapangan tentang Pengelolaan Jenazah setelah Bencana merupakan sebuah panduan teknis yang disusun bersama oleh ICRC, IFRC, Organisasi Kesehatan Pan-Amerika (PAHO) dan WHO, yang berisi garis besar tentang penanganan jenazah secara semestinya dan bermartabat setelah bencana. Manual ini mencakup sejumlah tugas khusus yang berkenaan dengan penanganan jenazah termasuk risiko-risiko penyakit menular, pengambilan, penyimpanan, pengidentifikasian dan penguburan/pembuangan jenazah. Manual Lapangan ini juga menyertakan formulir-formulir identifikasi dan inventarisasi serta sumber daya lain yang bermanfaat.

Pedoman untuk Keadaan Darurat Lingkungan memberikan panduan teknis bagi pemerintah-pemerintah yang berkeinginan untuk memperbaiki kerangka kerja mereka untuk kesiapsiagaan keadaan darurat lingkungan dan untuk para pelaku respon keadaan darurat lingkungan internasional yang memberikan bantuan. Pedoman ini disusun bersama-sama oleh OCHA dan Program Lingkungan PBB (UNEP) dan diterbitkan pada 2009.

Pedoman Kekerasan Berbasis Gender dalam Situasi Kemanusiaan dari IASC memungkinkan pemerintah-pemerintah, organisasi-organisasi kemanusiaan, dan masyarakat untuk mengembangkan dan mengkoordinasikan serangkaian intervensi minimum multisektor untuk mencegah dan menanggapi pada kekerasan berbasis gender selama tahap awal keadaan darurat bencana. Pedoman ini dikembangkan oleh IASC pada 2005.

Buku Pegangan Gender dalam Aksi Kemanusiaan⁸ dari IASC menetapkan standar-standar untuk integrasi isu-isu gender sejak awal keadaan darurat bencana sehingga layanan-layanan kemanusiaan mencapai target sarasannya dan menghasilkan dampak yang maksimal. Buku Pegangan ini diterbitkan pada 2006.

⁸ Daftar lengkap Panduan-Panduan yang telah disetujui oleh IASC bisa dilihat http://www.humanitarianinfo.org/iasc/pagelader.aspx?page=content-subsidi-tf_gender-gbv

INGAT

Negara-negara selalu bertanggung jawab terhadap upaya-upaya respon bencana yang dilakukan di wilayah kedaulatan mereka. Bantuan luar untuk respon bencana diupayakan hanya jika sebuah negara kurang mempunyai kapasitas dan jika negara tersebut meminta dan/atau menerima bantuan internasional.

B. AKTOR KEMANUSIAAN

Jika suatu pemerintah meminta dan atau menerima bantuan luar, berbagai aktor kemanusiaan internasional mungkin dapat diminta untuk membantu respon dan kesiapsiagaan respon bencana, termasuk dari PBB, Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, badan-badan regional antar-pemerintah, organisasi non-pemerintah (LSM), pemerintah-pemerintah lain yang membantu, dan sektor swasta⁹. Berikut ini adalah sebuah penjelasan singkat tentang berbagai kategori aktor-aktor kemanusiaan internasional yang berbeda tersebut.



BAGAIMANA MEMBACA BAGIAN INI

Untuk setiap kategori dan subkategori aktor kemanusiaan, diberikan satu penjelasan singkat tentang siapa mereka dan apa yang dilakukan, diikuti dengan pertanyaan yang ditekankan dalam warna hijau:

BAGAIMANA ENTITAS INI BEKERJA DENGAN PEMERINTAH?

PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

Dana-Dana, Program-Program dan Badan-Badan Khusus PBB (Badan-Badan PBB) memiliki proses-proses keanggotaan, kepemimpinan dan penganggaran yang terpisah dari Sekretariat PBB namun mempunyai komitmen untuk bekerja dengan dan melalui mekanisme-mekanisme koordinasi yang ada di PBB dan melapor kepada negara-negara melalui badan-badan pengatur mereka masing-masing. Badan-badan PBB, yang kebanyakan juga mempunyai hubungan sebelumnya yang berfokus pada pembangunan dengan negara-negara anggota, memberikan dukungan dan keahlian yang sesuai kebutuhan sektor sebelum, selama dan setelah terjadinya bencana. Badan-badan PBB yang utama yang mempunyai mandat kemanusiaan antara lain adalah FAO, IOM, OCHA, UNDP, UNFPA, UNHCR, UN-HABITAT, UNICEF, UN Women, WFP dan WHO, yang membantu pemenuhan berbagai kebutuhan saat respon bencana, dari hunian, perlindungan, ketahanan pangan, kesehatan, gizi, pendidikan, dan penghidupan hingga layanan-layanan umum seperti koordinasi, logistik, dan telekomunikasi.

Pejabat senior PBB di sebuah negara biasanya ditunjuk sebagai UN *Resident Coordinator (UNRC)* – yaitu *focal point* utama untuk keterlibatan sistem PBB dengan

⁹ Karena ruang lingkup panduan ini terbatas pada respons dan kesiapsiagaan respons, tidaklah mungkin bagi Panduan ini untuk memberikan penjelasan penuh tentang masyarakat antar-pemerintah regional dan internasional yang penting yang bekerja dalam mitigasi bencana dan pengurangan risiko bencana. Namun demikian, tiga diantaranya yang perlu disebutkan disini adalah : Strategis Internasional PBB untuk Pengurangan Bencana (*UN International Strategy for Disaster Reduction/UNISDR*), Pusat Pengurangan Bencana Asia (*Asian Disaster Reduction Centre/ADRC*) dan Fasilitas Global untuk Pengurangan Risiko Bencana (*Global Facility for Disaster Risk Reduction/GFDRR*) dari World Bank.

pemerintah. Dalam beberapa kasus, penunjukan *Humanitarian Coordinator* (HC) juga dapat dilakukan pada seorang pejabat PBB sehingga orang tersebut menjadi *focal point* utama untuk interaksi antara pemerintah, PBB dan para aktor non-pemerintah di bidang kemanusiaan. PBB juga membentuk sejumlah mekanisme koordinasi dan respon yang saling terkait yang dirancang untuk mendukung pemenuhan tanggung jawab-tanggung jawab kemanusiaan. Hal ini dijelaskan terperinci dalam bagian mekanisme-mekanisme koordinasi.

BAGAIMANA SEBUAH BADAN PBB BEKERJA DENGAN PEMERINTAH-PEMERINTAH?

Di tingkat negara, organisasi-organisasi PBB bekerja dalam kemitraan dengan organisasi-organisasi penanggulangan bencana nasional dan dengan kementerian-kementerian terkait masing-masing.

GERAKAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH

Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah merupakan jejaring kerja kemanusiaan terbesar di dunia, yang terdiri dari hampir 100 juta anggota, tenaga sukarela dan pendukung dari 187 Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di tingkat Nasional. Struktur Gerakan ini terdiri dari tiga komponen inti:

1. 187 Gerakan Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah
2. Federasi Internasional Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC)
3. Komite Palang Merah Internasional (ICRC)

Bersama-sama, ketiga komponen tersebut beroperasi di seluruh dunia dengan misi untuk mencegah dan memberantas penderitaan manusia di mana pun ditemukan, untuk melindungi nyawa dan kesehatan, dan untuk memastikan adanya penghargaan terhadap manusia, khususnya pada saat konflik bersenjata dan keadaan darurat-keadaan darurat lain. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang paling mendasar yaitu kemanusiaan, imparialistas, netralitas dan kebebasan, layanan sukarela, kesatuan dan universalitas.

Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Nasional (Masyarakat Nasional) mempunyai tempat yang unik sebagai pendukung otoritas di negara-negara mereka. Masyarakat Nasional ini melakukan bantuan bencana, mendukung program-program kesehatan dan sosial, dan menggalakkan hukum humaniter internasional dan nilai-nilai kemanusiaan.

BAGAIMANA MASYARAKAT PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH NASIONAL BEKERJA DENGAN PEMERINTAH?

Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Nasional biasanya merupakan kontak pertama yang dapat dihubungi pemerintah yang meminta bantuan tambahan dari IFRC (dalam situasi bencana alam) and ICRC (dalam situasi konflik bersenjata). Masyarakat Nasional bukanlah LSM dan mempunyai hubungan yang berbeda dengan pemerintah dan otoritas publik dibandingkan LSM yang terdaftar. Masyarakat Nasional bekerja bersama otoritas-otoritas publik nasional dan lokal dalam situasi-situasi bencana. Di Asia dan Pasifik, 37 negara mempunyai Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Nasional.

APA YANG DIMAKSUD DENGAN ISTILAH “PERAN PENDUKUNG”?

Peran pendukung (*auxiliary*) adalah sebuah istilah teknis yang mengacu pada kemitraan yang unik antara sebuah Masyarakat Nasional dengan pemerintahnya dalam menyediakan layanan-layanan kemanusiaan kepada masyarakat. Meskipun Masyarakat Nasional bekerja berdampingan dengan pemerintah dan otoritas publik, mereka bersifat independen dan kerja mereka tidak diatur atau diarahkan oleh pemerintah nasional. Setiap pemerintah harus mengakui Masyarakat Nasional di dalam wilayahnya sebagai satu entitas hukum dan mengijinkannya untuk beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang paling mendasar dalam Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.

Federasi Internasional Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) mengkoordinasikan dan mengarahkan bantuan di situasi bencana alam dalam membantu Masyarakat Nasional. IFRC dan Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Nasionalnya juga melaksanakan aktivitas-aktivitas kesiapsiagaan, respon, dan pembangunan, termasuk kesiapsiagaan bencana, kesehatan dalam keadaan darurat, undang-undang bencana, air dan sanitasi, dan diplomasi kemanusiaan. Kantor IFRC untuk kawasan Asia Pasifik berada di Kuala Lumpur, Malaysia.

BAGAIMANA IFRC BEKERJA DENGAN PEMERINTAH?

IFRC berinteraksi dengan para pemerintah secara langsung dan melalui 187 Masyarakat Nasional yang menjadi anggotanya.

Komite Palang Merah Internasional (ICRC) merupakan sebuah organisasi yang imparial, netral dan independen dengan mandat untuk melindungi nyawa dan martabat para korban perang dan dalam situasi-situasi kekerasan serta memberikan bantuan kepada mereka. Selama konflik bersenjata, ICRC bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas bantuan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di tingkat internasional. ICRC menggalakkan pentingnya Hukum Humaniter Internasional dan mengarahkan perhatian kepada prinsip-prinsip kemanusiaan universal. ICRC telah mendapatkan status sebagai pengamat dalam Sidang Umum PBB. Markas besar ICRC berada di Jenewa dan kantor-kantor tingkat negara dan regionalnya tersebar di Asia dan Pasifik.

BAGAIMANA ICRC BEKERJA DENGAN PEMERINTAH?

Dalam sebuah negara yang terkena dampak konflik, ICRC dan Masyarakat Nasional di negara bersangkutan memusatkan sumber daya-sumber daya operasional mereka untuk membantu para korban perang dan situasi-situasi kekerasan lainnya.

ORGANISASI-ORGANISASI DAN FORUM-FORUM ANTAR-PEMERINTAH DI TINGKAT REGIONAL

Kawasan Asia Pasifik mempunyai banyak organisasi antar pemerintah yang menawarkan beragam perangkat dan layanan kepada negara-negara anggota dan negara-negara yang berpartisipasi. Sejumlah organisasi dan forum antar-pemerintah di tingkat regional yang aktif dalam kesiapsiagaan dan respon keadaan darurat dijelaskan disini:

1. Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN), Pusat ASEAN untuk Koordinasi Bantuan Kemanusiaan (AHA Centre) tentang penanggulangan bencana dan Forum Regional ASEAN (ARF)
2. Asosiasi Asia Selatan untuk Kerjasama Regional (SAARC)
3. Forum Kepulauan Pasifik (PIF)¹⁰
4. Sekretariat Masyarakat Pasifik (SPC)¹¹
5. Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur (EAS)
6. Masyarakat Ekonomi Asia Pasifik (APEC)

Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) membentuk Komite ASEAN untuk Penanggulangan Bencana (*ASEAN Committee on Disaster Management/ACDM*) pada 2003¹². ACDM bertanggung jawab penuh untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan aktivitas-aktivitas penanggulangan bencana di tingkat regional untuk 10 Negara Anggota ASEAN. Komite ini terdiri dari para ketua organisasi-organisasi penanggulangan bencana di negara-negara anggota ASEAN. Sebagai bagian dari tujuannya untuk mewujudkan negara-negara di kawasan ASEAN yang tangguh terhadap bencana dan rakyat yang lebih aman, komite ini mengadopsi AADMER pada 2005. Saat ini ACDM melakukan pengawasan dan supervisi kebijakan dalam proses pelaksanaan Program Kerja AADMER.

BAGAIMANA ACDM ASEAN BEKERJA DENGAN PEMERINTAH-PEMERINTAH ASEAN?

ACDM ASEAN terdiri dari organisasi-organisasi dari seluruh 10 negara anggota ASEAN. Para anggotanya juga menjadi focal point AADMER di tingkat Nasional. ACDM melapor kepada Konferensi Para Pihak yang terdiri dari para menteri yang bertanggung jawab atas penanggulangan bencana.

Dibentuk pada 2011, **Pusat ASEAN untuk Koordinasi Bantuan Kemanusiaan (AHA Centre)** bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi operasional terhadap semua aktivitas di bawah AADMER. AHA Centre memfasilitasi kerjasama dan koordinasi antar Negara-negara Anggota ASEAN, dan dengan organisasi-organisasi PBB dan internasional terkait, dalam mendorong kerjasama regional. AHA Centre mempunyai beragam perangkat dan layanan, termasuk pelatihan dan pengembangan kapasitas organisasi-organisasi ASEAN yang bergerak dalam penanggulangan bencana dan pengiriman tim-tim respon keadaan darurat.

¹⁰ Para anggota PIF adalah Australia, Kepulauan Cook, Negara-negara Federasi Mikronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Selandia Baru, Niue, Palau, Papua Nugini, Republik Kepulauan Marshall, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu. Selain SPC dan PIF, negara-negara kepulauan Pasifik juga berjejaring melalui sekretariat Program Lingkungan Regional Pasifik (*Pacific Regional Environment Programme/SPREP*), yang fokus pada perubahan iklim dan keberlanjutan sumber daya

¹¹ Keanggotaan SPC merupakan negara-negara PIF serta teritori Samoa Amerika, Polinesia Perancis, Guam, Kaledonia Baru, Kepulauan Mariana Utara, Kepulauan Pitcairn, Tokelau dan Wallis dan Futuna, serta Perancis dan Amerika Serikat.

¹² ACDM telah ada sejak 1970-an namun diperkuat secara signifikan pada 2003.

Sistem Pemantauan dan Respon Bencana (*Disaster Monitoring and Response System/DMRS*) dan Jejaring Informasi Bencana (*ADINet*) ASEAN memberikan layanan-layanan pemantauan dan informasi bencana kepada organisasi-organisasi penanggulangan bencana nasional melalui fasilitas-fasilitas berbasis web. AHA Centre juga mengelola kerangka kerja kemitraan antar-lembaga antara ASEAN dan tujuh LSM internasional besar¹³, yang disebut sebagai Kelompok Kemitraan AADMER (APG) untuk mendorong suatu pendekatan masyarakat sipil dalam pelaksanaan AADMER. Sekretariat AHA Centre terletak di Jakarta, Indonesia.

BAGAIMANA AHA CENTRE BEKERJA DENGAN PEMERINTAH?

AHA Centre merupakan kontak pertama negara-negara ASEAN apabila terjadi bencana. AHA Centre dikelola oleh para perwakilan badan-badan nasional penanggulangan bencana dari 10 negara anggota ASEAN dalam kapasitas mereka sebagai perwakilan ACDM dan *focal point* ASEAN di tingkat nasional.

Dengan keanggotaan yang meluas di luar 10 negara anggota ASEAN sehingga mencakup 26 negara (dan Uni Eropa), **Forum Regional ASEAN (ARF)** merupakan sebuah platform kerja sama politik dan keamanan berbasis luas untuk mendorong dialog tentang isu-isu yang menjadi kepentingan bersama. ARF juga berperan dalam membangun kepercayaan dan diplomasi pencegahan di dalam kawasan. Selain 10 negara ASEAN, anggota ARF saat ini termasuk Australia, Bangladesh, Kanada, Cina, Republik Rakyat Demokratik Korea, Uni Eropa, India, Jepang, Republik Korea, Mongolia, Selandia Baru, Pakistan, Papua Nugini, Rusia, Sri Lanka, Timor-Leste, dan Amerika Serikat.

BAGAIMANA ARF BEKERJA DENGAN PEMERINTAH?

ARF menyediakan satu platform dialog melalui serangkaian pertemuan tahunan. Pertemuan yang paling senior diselenggarakan setiap tahun di tingkat Menteri Luar Negeri bersamaan dengan Pasca Konferensi Kementerian ASEAN (*ASEAN Post-Ministerial Conference*).¹⁴

Asosiasi Asia Selatan untuk Kerjasama Regional (SAARC) mengadopsi Kerangka Kerja Menyeluruh SAARC tentang Penanggulangan Bencana (*SAARC Comprehensive Framework on Disaster Management*) pada 2006 yang membentuk Pusat Penanggulangan Bencana SAARC (*SAARC Disaster Management Centre/SDMC*). SDMC mempunyai mandat untuk membentuk dan memperkuat sistem penanggulangan bencana di tingkat regional Asia Selatan sebagai satu perangkat untuk mengurangi risiko dan meningkatkan respon dan pemulihan. SDMC dirancang untuk berada di bawah naungan traktat NDRRM dari SAARC untuk meningkatkan dan mempertahankan kesepakatan pengaturan kesiagaan di tingkat regional, antara lain mekanisme-mekanisme kerja sama untuk bantuan dan respon bencana darurat. SDMC berlokasi di sekretariat SAARC di New Delhi.

¹³ LSM-LSM yang ikut berpartisipasi antara lain Global Movement for Children, Help Age, Mercy Malaysia, Oxfam, Plan International, Save the Children, dan World Vision.

¹⁴ Untuk mendukung ini, setiap tahun diselenggarakan dua pertemuan Para Pejabat Senior ARF pada Mei/Juni. Pada akhirnya pertemuan-pertemuan tersebut mendapat masukan dari Pertemuan-Pertemuan Kelompok Dukungan Antar-Sesi (*Inter-Sessional Support Group*) dari ARF tentang Langkah-Langkah Pengembangan Kepercayaan dan Diplomasi Pencegahan dan oleh empat Pertemuan Antar-Sesi (*Inter-Sessional Meeting/ISM*) tentang Kontra-Terrorisme dan Kejahatan Trans-Nasional, Bantuan Bencana, Keamanan Maritim, dan Nonproliferasi dan Pelucutan Senjata.

BAGAIMANA SDMC SAARC BEKERJA DENGAN PEMERINTAH?

SDMC SAARC bekerja melalui *focal point* nasional di negara-negara anggota, dan dengan kementerian-kementerian, departemen-departemen, dan asosiasi-asosiasi di dalam pemerintah-pemerintah.

Forum Kepulauan Pasifik (PIF) merupakan sebuah organisasi internasional yang dibentuk oleh traktat 16 negara anggota di seluruh kawasan Pasifik. PIF mempunyai mandat untuk memperkuat koordinasi dan integrasi regional melalui penasehatan kebijakan dan untuk mendukung pelaksanaan keputusan-keputusan para pemimpin PIF dalam suatu kerangka kerja strategis yang disebut Rencana Pasifik. Sekretariat PIF terdapat di Suva, Fiji.

BAGAIMANA PIF BEKERJA DENGAN PEMERINTAH?

PIF menyelenggarakan pertemuan tahunan yang diikuti oleh serangkaian dialog pasca-forum dengan para mitra utama pemerintah dalam satu tahun untuk membahas aspek-aspek Rencana Pasifik yang dapat mencakup respon dan kesiapsiagaan respon bencana.

Sekretariat Masyarakat Pasifik (SPC) mendukung 22 negara kepulauan dan teritori Pasifik dalam menangani risiko-risiko yang ditimbulkan oleh kerentanan iklim dan bencana alam. SPC terlibat dalam semua ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan bumi, termasuk proses-proses geologi, fisik, kimia, dan biologi. SPC melaksanakan kerja-kerjanya sesuai tiga bidang program teknis: kelautan dan kepulauan, air dan sanitasi, dan pengurangan bencana. Markas besarnya berlokasi di Suva, Fiji.

BAGAIMANA SPC BEKERJA DENGAN PEMERINTAH?

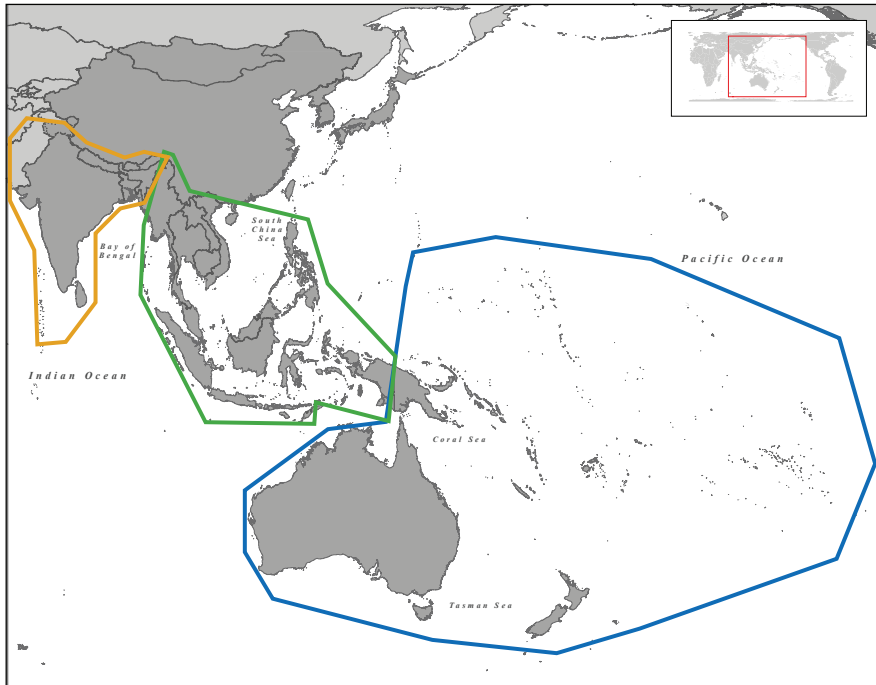
Negara-negara anggota Kepulauan Pasifik menerima pengetahuan geologi dasar untuk mendukung kemampuan dalam kesiapsiagaan respon bencana dari SPC. SPC tidak terlibat dalam respon bencana.

Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur (EAS) adalah sebuah forum regional untuk dialog tentang isu-isu strategis, politik dan ekonomi yang luas yang menjadi kepentingan dan perhatian bersama. EAS mempertemukan para pemimpin dari 10 Negara Anggota ASEAN, serta Australia, China, Jepang, India, Korea, Federasi Rusia, dan Amerika Serikat. Respon bencana dan bantuan kemanusiaan juga menjadi perhatian diantara berbagai perhatian regional yang dicakup dalam agenda EAS. Pada 2012, India menjadi penyelenggara pertemuan EAS yang pertama yang khusus membahas tentang pengelolaan risiko bencana.

BAGAIMANA EAS BEKERJA DENGAN PEMERINTAH?

Diselenggarakan di tingkat pimpinan negara, pertemuan-pertemuan EAS diselenggarakan setiap tahun menyusul pertemuan tahunan para pemimpin ASEAN. Kerangka kerja khusus tentang isu-isu penanggulangan bencana yang akan dibahas oleh negara-negara peserta belum dikembangkan namun ada proposal oleh Pemerintah Australia dan Indonesia yang menciptakan satu kerangka kerja koordinasi melalui keanggotaan ACDM yang lebih luas.

Peta organisasi-organisasi sub-regional: ASEAN, SAARC, SPC



Negara Anggota ASEAN:
Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia,
RDR Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina,
Singapura, Thailand, Vietnam

Negara Anggota SAARC:
Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa,
Nepal, Pakistan, Sri Lanka

Negara Anggota SPC:
Australia, Kepulauan Cook, Federasi
Negara-Negara Mikronesia, Fiji, Kiribati,
Kepulauan Marshall, Nauru,
Selandia Baru, Niue, Palau, Papua Nugini,
Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga,
Tuvalu, Vanuatu

Masyarakat Ekonomi Asia Pasifik (APEC) merupakan sebuah forum yang terdiri dari ekonomi 21 negara di lingkaran luar Pasifik yang berupaya untuk mendorong kerja sama perdagangan bebas dan ekonomi. APEC terdiri dari sebuah Kelompok Kerja Kesiapsiagaan Keadaan Darurat (EPWG) yang mempunyai mandat untuk mengkoordinasikan dan mendorong kesiapsiagaan keadaan darurat dan bencana di dalam APEC. EPWG difokuskan untuk pengurangan risiko bencana dan membangun ketangguhan dunia usaha dan masyarakat melalui pertukaran pengetahuan dan kolaborasi diantara 21 ekonomi negara-negara anggota. EPWG telah mengembangkan satu Strategis untuk Pengurangan Risiko Bencana dan Kesiapsiagaan dan Respon Keadaan Darurat di Kawasan Asia Pasifik 2009-2015, yang memandu aktivitas-aktivitas di bidang ini.

BAGAIMANA EPWG APEC BEKERJA DENGAN PEMERINTAH?

EPWG APEC diwakilketuai oleh dua ekonomi negara anggota selama dua tahun. Kelompok kerja bertemu setahun sekali dengan para kepala badan-badan pengelolaan keadaan darurat dan menyelenggarakan lokakarya-lokakarya tambahan jika diperlukan.

ORGANISASI-ORGANISASI NON-PEMERINTAH¹⁵

Aktor-aktor masyarakat sipil dapat dibagi menjadi dua kategori: organisasi-organisasi non-pemerintah dan berbasis masyarakat (LSM) nasional, dan LSM internasional. Selain hubungan yang independen dengan pemerintah, LSM-LSM ini bergabung bersama sesuai dengan jejaring dan konsorsium di tingkat global, regional dan negara.

LSM-LSM nasional dan berbasis masyarakat merupakan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang berfungsi hanya di dalam perbatasan nasional. LSM-LSM ini bekerja secara independen untuk mendukung aktivitas-aktivitas kesiapsiagaan dan respon keadaan darurat yang dilakukan pemerintah-pemerintah, badan-badan PBB dan LSM-LSM internasional yang lebih besar. Mereka umumnya mempunyai jejaring berbasis masyarakat yang kuat yang sangat penting untuk menjangkau masyarakat yang terkena dampak bencana. LSM-LSM nasional dapat berupa entitas-entitas yang sekuler ataupun berbasis keyakinan.

Di Asia dan Pasifik, terdapat 48 LSM nasional dari 18 negara yang bergabung dalam satu konsorsium yang disebut Jejaring Pengurangan dan Respon Bencana Asia (ADRRN). ADRRN bertujuan untuk mendorong koordinasi dan pertukaran informasi antar LSM dan para pemangku kepentingan lain untuk pengurangan dan respon bencana yang efektif.

BAGAIMANA LSM-LSM NASIONAL DAN BERBASIS MASYARAKAT BEKERJA DENGAN PEMERINTAH?

LSM-LSM nasional secara resmi terdaftar sebagai organisasi nasional di pemerintah-pemerintah penerima. LSM-LSM nasional, serta kadang-kadang dengan LSM internasional, mengatur diri mereka sendiri sesuai dengan konsorsium yang menghubungkan dengan pemerintah berdasarkan sektor-sektor tertentu.

LSM-LSM internasional yang bekerja dalam kesiapsiagaan dan respon bencana meliputi organisasi-organisasi kemanusiaan dan organisasi-organisasi dengan berbagai mandat yang beroperasi secara independen untuk memberikan bantuan kemanusiaan. LSM-LSM internasional yang terbesar, dalam hal pengeluarannya per tahun, biasanya ada di Amerika Utara dan Eropa dengan kantor-kantor regional dan negara yang tersebar di Asia dan Pasifik dan tempat-tempat lain di dunia.¹⁶ Di Asia dan Pasifik juga mulai banyak LSM-LSM yang mempunyai program-program dengan jangkauan internasional. LSM-LSM internasional juga dapat berupa organisasi yang sekuler atau berbasis keyakinan. LSM-LSM internasional menerima pendanaan secara rutin dari pemerintah-pemerintah, yayasan-yayasan swasta dan perusahaan-perusahaan, namun sumber daya-sumber daya mereka mulai banyak yang berasal dari masyarakat umum di negara-negara asal mereka atau di negara-negara tempat mereka beroperasi.

LSM-LSM internasional diwakili dalam platform-platform koordinasi global oleh konsorsium seperti Dewan Badan-Badan Sukarela Internasional (ICVA), Komite Pengarah untuk Respon Kemanusiaan (SCHR) dan Interaction. Konsorsium-konsorsium lain dapat dibentuk untuk memenuhi prioritas-prioritas LSM di tingkat global; misalnya *CARE*, *Catholic Relief Services*, *Mercy Corps*, *Oxfam*, *Save the Children*, *International Rescue*

¹⁵ Penjelasan-penjelasan tentang subbagian dari panduan ini antara lain berdasarkan pada kerja ALNAP. *The State of the Humanitarian System*, edisi 2012, Overseas Development Institute, 2012.

¹⁶ Menurut ALNAP, lima LSM internasional terbesar, yang diukur dari pengeluarannya untuk program kemanusiaan pada 2010, adalah *Médecins sans Frontières*, *Catholic Relief Services*, *Oxfam International*, *International Save the Children Alliance*, dan *World Vision International*.

Commitee, dan *World Vision* bergabung dalam sebuah prakarsa global bernama Proyek Pengembangan Kapasitas Keadaan Darurat (ECB), yang fokus untuk mengembangkan ketrampilan staf nasional, memfasilitasi kolaborasi dan mengembangkan perangkat dan pendekatan-pendekatan yang praktis untuk pengembangan program-program kesiapsiagaan bencana dan pengurangan risiko.¹⁷

BAGAIMANA LSM-LSM INTERNASIONAL BEKERJA DENGAN PEMERINTAH?

Kehadiran LSM-LSM internasional di negara-negara penerima difasilitasi oleh adanya pendaftaran secara resmi di pemerintah penerima, dan dipandu oleh nota kesepakatan dengan organisasi-organisasi nasional penanggulangan bencana dan kementerian-kementerian yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas kemanusiaan dan pembangunan.

PEMERINTAH-PEMERINTAH YANG MEMBERIKAN BANTUAN

Pemerintah-pemerintah yang memberikan bantuan sangat menentukan dalam respon bencana. Pemerintah-pemerintah dapat membantu respon bencana internasional dengan memberikan bantuan melalui sumbangan-sumbangan langsung bilateral kepada negara-negara yang terkena dampak, termasuk dengan menggerakkan bantuan non-keuangan MCDA. Mereka juga dapat menyalurkan pendanaan melalui badan-badan multilateral seperti badan-badan PBB, organisasi-organisasi regional, Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, atau LSM. Ada sejumlah pemerintah yang secara rutin merespon pada kebutuhan negara-negara yang terkena dampak bencana, baik dari dalam kawasan Asia Pasifik maupun dari Eropa dan Amerika.

BAGAIMANA PEMERINTAH-PEMERINTAH YANG MEMBERIKAN BANTUAN BEKERJA DENGAN PEMERINTAH?

Banyak pemerintah-pemerintah yang memberikan bantuan telah membentuk struktur-struktur kerja sama bantuan yang sering kali melekat dalam kementerian luar negeri masing-masing. Pengelolaan kerja sama sehari-hari dilaksanakan melalui kedutaan-kedutaan besar di negara-negara yang terkena dampak.

SEKTOR SWASTA

Perusahaan-perusahaan swasta semakin terlibat dalam respon bencana dan seringkali merupakan bagian dari komitmen mereka untuk menjalankan strategi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Keterlibatan ini dapat dalam banyak bentuk, termasuk sebagai penyandang dana untuk PBB, Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, dan LSM-LSM, dan sebagai penyedia layanan bantuan secara langsung. Perusahaan-perusahaan seperti DHL dan Ericsson telah bekerja untuk membantu logistik dan telekomunikasi kemanusiaan selama bertahun-tahun dan saat ini semakin banyak pelaku sektor swasta yang bergabung untuk terlibat dalam respon bencana. Mayoritas utama perusahaan-perusahaan swasta terlibat dalam bantuan bencana secara mandiri.

BAGAIMANA SEKTOR SWASTA BEKERJA DENGAN PEMERINTAH?

¹⁷ Kemitraan ECB dilaksanakan oleh sebuah konsorsium antarlembaga di empat negara, dua diantaranya ada di kawasan Asia-Pasifik. Empat negara ECB tersebut adalah Bangladesh, Indonesia, Bolivia dan Nigeria. ECB dapat diakses melalui salah satu organisasi yang berpartisipasi atau melalui informasi kontak di situs webnya.

Pemerintah dapat didekati oleh perusahaan sektor swasta yang berkeinginan untuk memberikan bantuan dan harus memeriksa tawaran-tawaran tersebut berdasarkan manfaatnya. Jenis-jenis bantuan sektor swasta yang beragam dan mungkin lebih mudah untuk menjangkau spektrum perusahaan yang lebih luas yang tertarik untuk menyumbang dalam bantuan bencana melalui kamar dagang tingkat nasional atau lokal (atau yang setara).

C ■ MEKANISME-MEKANISME KOORDINASI INTERNASIONAL

Untuk mewujudkan respon bencana yang efektif diperlukan koordinasi yang seksama di tingkat global, regional dan nasional. Seperti disampaikan di atas, PBB telah membentuk sejumlah mekanisme koordinasi yang saling berkaitan yang dirancang untuk memandu hubungan antar para aktor kemanusiaan dan antara para aktor kemanusiaan, pemerintah dan penduduk yang terkena dampak bencana untuk memastikan penyampaian bantuan yang utuh dan berprinsip.

Bagian ini menjelaskan struktur dan protokol-protokol yang berlaku tentang kerangka kerja koordinasi internasional yang utama, dengan disertai rincian tentang bagaimana mekanisme-mekanisme bekerja selama tahap respon bencana dan tahap kesiapsiagaan respon bencana. Bagian ini juga menyediakan informasi yang jelas tentang bagaimana mekanisme-mekanisme koordinasi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan bagaimana mereka bekerja dengan pemerintah. Mekanisme-mekanisme yang akan dijelaskan antara lain:

MEKANISME TINGKAT GLOBAL

1. *Emergency Relief Coordinator (ERC)*
2. Komite Tetap Antar-Lembaga (IASC)

MEKANISME TINGKAT NEGARA

1. *Resident and Humanitarian Coordinator (RC/HC)*
2. Tim Kemanusiaan tingkat Negara (HCT)

MEKANISME “PENJEMBATAN”

1. Pendekatan *Cluster*
2. Kantor Koordinasi untuk Urusan-Urusan Kemanusiaan (OCHA)

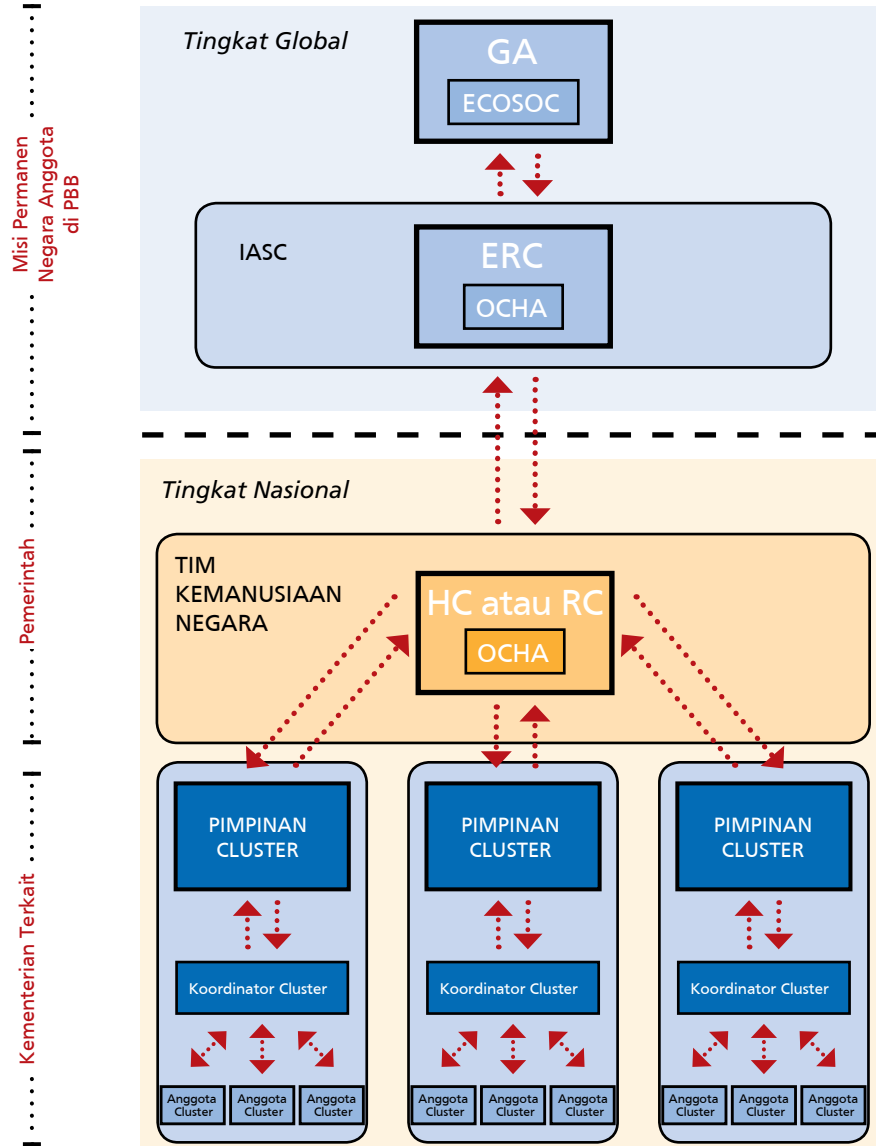
MEKANISME TINGKAT GLOBAL

Emergency Relief Coordinator (ERC) merupakan pejabat PBB paling senior yang menangani urusan-urusan kemanusiaan, yang mendapat mandat dari Sidang Umum PBB untuk mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan internasional selama respon keadaan darurat, baik yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintah, antar-pemerintah maupun non-pemerintah. Pejabat ini melapor langsung kepada Sekjen PBB, dengan tanggung jawab khusus untuk memproses permintaan Negara-negara Anggota PBB dan mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan; memastikan pengelolaan dan pertukaran informasi untuk mendukung peringatan dini dan respon; memudahkan akses ke wilayah-wilayah keadaan darurat; mengelola pengkajian-pengkajian kebutuhan, menyiapkan penggalangan dana gabungan, dan menggerakkan sumber daya untuk mendukung respon kemanusiaan; serta mendukung kelancaran transisi dari operasi-operasi bantuan ke operasi-operasi pemulihan.

BAGAIMANA ERC BEKERJA DENGAN PEMERINTAH?

ERC bertanggung jawab untuk memantau semua keadaan darurat yang memerlukan bantuan kemanusiaan internasional dan mengawasi semua tindakan di tingkat negara oleh para RC/HC. ERC juga memegang peran utama dalam advokasi dan penggalangan dana untuk aksi kemanusiaan.

Arsitektur Koordinasi Kemanusiaan IASC *



HC	Humanitarian Coordinator
RC	Resident Coordinator
ERC	Emergency Relief Coordinator
ECOSOC	Dewan Ekonomi dan Sosial
GA	Sidang Umum

* Diadaptasi dari IASC, Handbook for RCs and HCs on Emergency Preparedness and Response, 2010

Komite Tetap Antar-Lembaga (IASC) dikepalai oleh ERC. Komite ini merupakan sebuah forum antarlembaga untuk koordinasi, pengembangan kebijakan dan pengambilan keputusan yang melibatkan para mitra kemanusiaan utama PBB dan non-PBB. Para anggota IASC adalah FAO, OCHA, UNDP, UNFPA, UN-HABITAT, UNHCR, UNICEF, WFP, dan WHO. Para undangan tetap IASC adalah ICRC, ICVA, IFRC, InterAction, IOM, OHCHR, SCHR, *Office of the Special Rapporteur on the Human Rights of Internally Displaced Persons* dan World Bank. IASC terus berupaya untuk meningkatkan keefektifan sistem kemanusiaan secara menyeluruh. Saat ini komite ini terlibat dalam melaksanakan perubahan-perubahan untuk meningkatkan sistem kemanusiaan internasional khususnya untuk mewujudkan koordinasi yang lebih efektif, akuntabilitas yang lebih baik, dan kepemimpinan yang lebih kokoh, melalui yang disebut "Agenda Perubahan" IASC.

BAGAIMANA IASC BEKERJA DENGAN PEMERINTAH?

IASC and badan-badan subsidiernya merupakan mekanisme-mekanisme global. Di tingkat negara, HCT memegang fungsi yang sama dan mempunyai anggota yang sama dengan IASC yaitu organisasi-organisasi kemanusiaan yang telah ada atau yang bekerja di dalam negara penerima.

IASC - Komite Tetap Antar-Lembaga

ANGGOTA PENUH



UNDANGAN TETAP



ANGGOTA PENUH:

FAO, OCHA, UNDP, UNFPA, UNHABITAT, UNHCR, UNICEF, WFP, WHO

UNDANGAN TETAP:

ICRC, ICVA, IFRC, InterAction, IOM, OHCHR, SCHR, SR on HR of IDPs*, World Bank

*Wakil Khusus Sekjen PBB untuk hak-hak asasi manusia para pengungsi internal

MEKANISME TINGKAT NEGARA

UN Resident Coordinator (UN RC) merupakan wakil yang ditunjuk oleh Sekjen PBB di satu negara tertentu dan kepala Tim Negara PBB (UNCT). Fungsi UN RC biasanya dijalankan oleh Wakil *Resident* UNDP. Ia diakreditasi melalui surat Sekjen PBB kepada kepala negara atau pemerintah.

Humanitarian Coordinator (HC) ditunjuk oleh ERC melalui konsultasi dengan IASC jika dibutuhkan satu bantuan kemanusiaan internasional yang berskala besar dan/atau berkelanjutan di sebuah negara. Keputusan untuk menunjuk seorang HC untuk suatu negara seringkali dibuat pada awal sebuah krisis dan setelah berkonsultasi dengan pemerintah yang terkena dampak. Dalam beberapa kasus, ERC dapat memilih untuk menetapkan UN RC sebagai HC, di kasus lain Kepala Badan (PBB dan/atau LSM internasional yang bergabung dalam sistem respon yang terkoordinasikan) dapat ditunjuk dan/atau seorang HC khusus dapat dipilih dari para kandidat HC yang sudah diseleksi sebelumnya untuk ditugaskan. HC mengemban kepemimpinan HCT selama krisis. Apabila tidak ada HC, UN RC bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi strategis dan operasional terhadap upaya-upaya respon yang dilakukan lembaga-lembaga anggota UNCT dan aktor-aktor kemanusiaan lain yang relevan.

BAGAIMANA RC DAN/ATAU HC BEKERJA DENGAN PEMERINTAH?

UN RC merupakan pejabat senior PBB di sebuah negara dan kontak pertama PBB yang dihubungi pemerintah. RC bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan semua aktivitas operasional PBB dan mengepalai UNCT. Meski demikian, jika ditunjuk, HC mengemban kepemimpinan respon kemanusiaan dan mendukung koordinasi semua organisasi kemanusiaan yang relevan (PBB dan non-PBB). HC kemudian menjadi kontak pertama yang dihubungi pemerintah terkait respon bencana. Dalam sebuah situasi kemanusiaan dimana tidak ada HC yang ditunjuk, UN RC tetap menjadi kontak pertama untuk pemerintah dan dapat menjadi Ketua tim kemanusiaan di tingkat negara serta UNCT.

Tim Kemanusiaan Tingkat Negara (HCT) merupakan sebuah forum pengambil keputusan dalam negeri yang fokus untuk memberikan arahan strategis dan kebijakan secara umum tentang isu-isu yang berkenaan dengan aksi kemanusiaan. Keanggotaan HCT biasanya sama persis dengan IASC di tingkat negara, yang terdiri dari organisasi-organisasi kemanusiaan PBB dan non-PBB yang berada (residen) dan/atau bekerja di dalam satu negara. HCT diketuai oleh HC atau oleh RC jika tidak ada HC yang ditunjuk. Komponen-komponen dalam Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dapat bergabung dalam HCT, yang ditentukan oleh mandat masing-masing. Sejumlah HCT juga telah memutuskan untuk menyertakan para wakil pemerintah-pemerintah yang memberikan bantuan (penyandang dana) sebagai anggota mereka.

BAGAIMANA HCT BEKERJA DENGAN PEMERINTAH?

Sebuah HCT mempunyai fungsi utama untuk memberikan arahan strategis dan kebijakan kepada para aktor kemanusiaan. Namun demikian, HCT juga dapat berfungsi sebagai penghubung utama di tingkat senior dengan pemerintah.

TIM KEMANUSIAAN PASIFIK – PENGADAPTASIAN HCT DI KAWASAN PASIFIK

Tim Kemanusiaan Pasifik (Pacific Humanitarian Team/PHT) merupakan HCT khusus di Pasifik Selatan yang beranggotakan 14 negara Kepulauan Pasifik. Negara-negara ini juga dicakup oleh UN RC dan UNCT yang berbasis di Fiji dan Samoa. PHT bertujuan untuk mendukung Pemerintah-pemerintah Pasifik untuk mengembangkan dan melaksanakan respon yang tepat waktu, konsisten dan terkoordinasikan. PHT telah diakui sebagai satu badan koordinasi oleh IASC dan terorganisasikan melalui cluster regional yang mendukung mekanisme-mekanisme koordinasi di tingkat nasional.

MEKANISME “PENJEMBATAN”

Cluster merupakan pengelompokan IASC terhadap badan-badan operasional, baik PBB maupun non-PBB, sesuai sektor masing-masing dalam aksi kemanusiaan. *Cluster* beroperasi di tingkat global dan negara untuk mendukung pemerintah-pemerintah nasional dalam mengelola bantuan internasional.

Di tingkat global, *cluster* bertanggung jawab untuk memperkuat kesiapsiagaan seluruh sistem dan mengkoordinasikan kapasitas teknis untuk merespon pada keadaan-keadaan darurat kemanusiaan di masing-masing sektor. Di tingkat negara, *cluster* memastikan aktivitas-aktivitas organisasi kemanusiaan dikoordinasikan dan bertindak sebagai kontak pertama untuk dihubungi pemerintah, UN RC dan HC. Sedapat mungkin, *cluster* memiliki struktur respon yang sama dengan struktur respon nasional¹⁸, menggunakan terminologi yang mendekati atau sama persis dengan yang digunakan oleh sektor-sektor nasional, dan diwakilketuai oleh wakil-wakil dari pemerintah. Apabila perlu, *cluster* tingkat negara dapat dibentuk pada awal bencana dan mungkin tetap dilanjutkan atau tidak setelah tahap awal respon dengan didasarkan pada pengkajian di dalam negeri tentang kebutuhan yang berkesinambungan.

MEKANISME KOORDINASI INTERNASIONAL: BEBERAPA PERBEDAAN PENTING

1. HC vs. RC

HC membantu koordinasi operasi-operasi kemanusiaan yang dilakukan semua aktor internasional, baik PBB maupun non-PBB. RC membantu koordinasi operasi-operasi pembangunan yang dilaksanakan oleh aktor-aktor PBB saja.

2. HCT vs. UNCT

UNCT terdiri dari semua kepala badan-badan PBB ditambah IOM, sedangkan HCT hanya terdiri dari para kepala badan-badan kemanusiaan PBB serta para aktor kemanusiaan non-PBB (yaitu LSM-LSM dan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah). UNCT berfokus pada bantuan PBB untuk program-program pembangunan nasional, sementara HCT menangani isu-isu strategis dalam masyarakat kemanusiaan yang lebih luas.

Catatan: Seperti HC dan RC, UNCT dan HCT berfungsi saling melengkapi dan tidak saling menggantikan satu sama lain. RC atau HC bertanggung jawab untuk memastikan sifat saling melengkapi antara dua entitas ini.

3. HCT vs. Cluster

HCT memberikan arahan strategis dan kebijakan dalam semua upaya respon, sementara cluster di tingkat negara melaksanakan strategi tersebut dengan mengkoordinasikan upaya-upaya respon operasional di bidang-bidang keahlian masing-masing. Badan-badan yang memimpin *cluster* di tingkat negara merupakan anggota HCT.

Di tingkat global, telah dibentuk sembilan *cluster* dengan Badan-Badan yang ditunjuk untuk mengetuai *cluster* yang bertanggung jawab kepada IASC. Di tingkat negara, *cluster* diketuai oleh para wakil tingkat negara yang bertanggung jawab kepada UN RC atau HC. Meskipun demikian, badan-badan yang mengetuai *cluster* di tingkat negara tidak harus sama dengan Ketua *Cluster* sektor di tingkat Global. Sebaliknya, kepemimpinan *cluster* harus didasarkan pada konteks dan kapasitas badan-badan setempat yang sudah beroperasi. Struktur *cluster* di tingkat negara juga harus

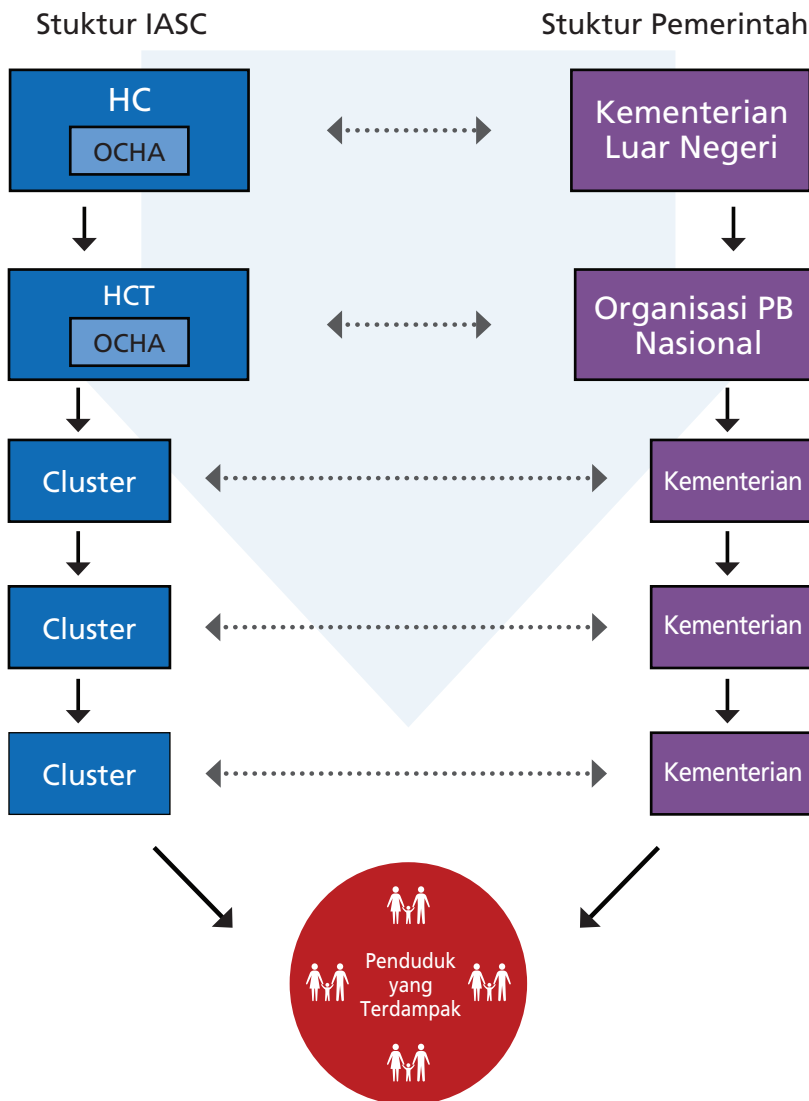
¹⁸ Beberapa *cluster* yang dibentuk untuk mengkoordinasikan layanan-layanan bersama seperti logistik dan telekomunikasi dalam keadaan darurat mungkin tidak memiliki mitra di tingkat nasional sebagai pendamping.

disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan setempat. Demikian pula halnya, *cluster* subnasional dapat dibentuk apabila perlu, dan sekali lagi, para ketua *cluster* di tingkat lokal tidak harus sama dengan para ketua yang ditunjuk di tingkat negara. Yang unik di Pasifik, PHT merupakan sistem penyelenggaraan *cluster* tingkat regional yang mendukung penyelenggaraan koordinasi di tingkat nasional.

BAGAIMANA *CLUSTER* BEKERJA DENGAN PEMERINTAH?

Cluster tingkat negara memenuhi kebutuhan-kebutuhan pemerintah dalam respon dengan memberikan bantuan bersama-sama kepada kementerian-kementerian terkait. *Cluster* ini diakses melalui HC, HCT atau organisasi-organisasi ketua *cluster*. *Cluster* tingkat regional dan global diakses melalui OCHA-ROAP melalui ocha-roap@un.org.

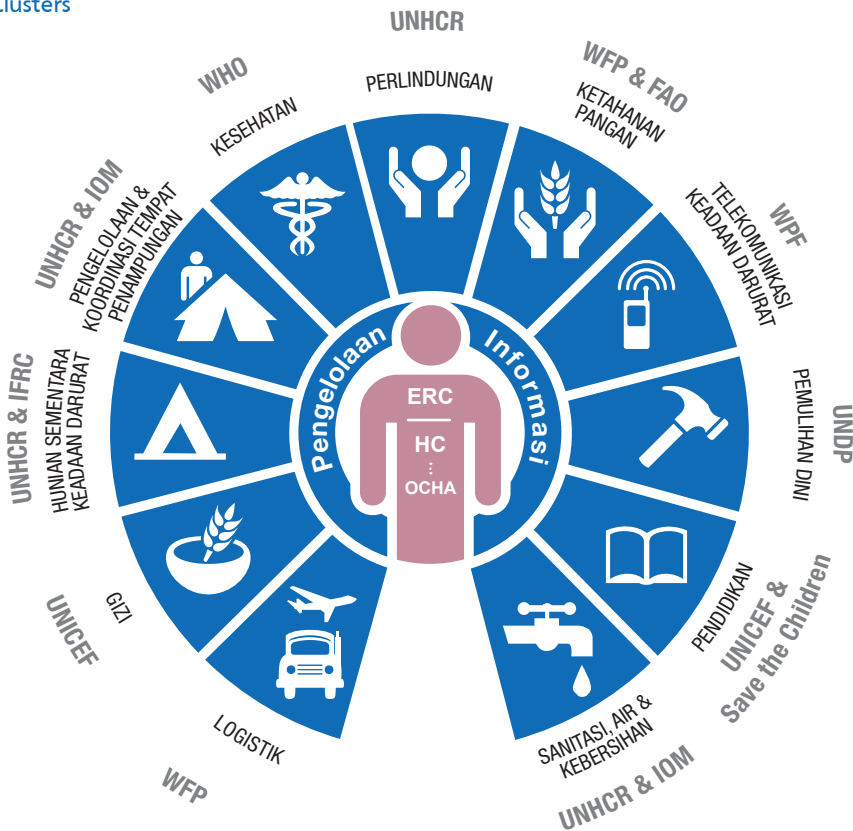
Koordinasi dan Hubungan HCT dengan Pemerintah



HC Humanitarian Coordinator
HCT Tim Kemanusiaan Negara

Di Kawasan Asia Pasifik, *cluster* dan struktur-struktur yang seperti *cluster* saat ini aktif di Bangladesh, Republik Demokrasi Rakyat Korea, Indonesia, Republik Demokrasi Rakyat Laos, Myanmar, Nepal, Papua Nugini, Filipina, dan Sri Lanka.

Clusters



APAKAH CLUSTER SELALU SAMA DI SETIAP NEGARA?

Ada beragam cara aktivasi dan de-aktivasi *cluster* di tingkat negara. Sudah tersedia Catatan Panduan tentang *Penggunaan Pendekatan Cluster untuk Memperkuat Respon Kemanusiaan* namun tidak mengarahkan aktivasi *cluster* dalam semua situasi. Dalam situasi keadaan darurat tertentu, hanya sejumlah *cluster* yang diaktifkan; dalam situasi-situasi yang lain, diperlukan *subcluster* tambahan untuk mencakup luasnya kebutuhan koordinasi. Meskipun PBB dan LSM-LSM ditunjuk sebagai ketua *cluster* di tingkat global, *cluster* dapat diketuai oleh organisasi lain, termasuk badan pemerintah, di tingkat negara dan lokal.

Cluster tingkat negara biasanya diaktifkan pertama kali dalam situasi keadaan darurat namun *cluster* dapat saja sudah ada dalam berbagai bentuk sebelum, selama dan setelah sebuah bencana. Sebagai contoh, di Filipina, *cluster* dibentuk untuk merespon banjir besar pada 2006. Namun demikian, karena terus berulangnya bencana di negara ini dan maraknya kembali konflik bersenjata di Mindanao pada 2008, pemerintah didorong untuk melembagakan pendekatan koordinasi melalui satu peraturan nasional. Hasilnya, *cluster* sekarang menjadi satu mekanisme koordinasi yang permanen

di Filipina, yang dikelola oleh Dewan Pengurangan dan Pengelolaan Risiko Bencana Nasional (*National Disaster Risk Reduction and Management/ NDRRM*). Dewan NDRRM terdiri dari kementerian-kementerian pemerintah, namun akan segera mencakup lima LSM nasional dan Masyarakat Palang Merah Nasional Filipina. Para wakil badan-badan pemerintah berfungsi sebagai ketua *cluster* di tingkat negara.¹⁹

Kantor untuk Koordinasi Urusan-Urusan Kemanusiaan (OCHA) merupakan sebuah kantor dari Sekretariat PBB yang menyediakan bantuan kelembagaan bagi ERC di tingkat lokal dan kepada UN RC dan HC di tingkat negara untuk mengkoordinasikan aksi kemanusiaan, melakukan advokasi hak-hak orang-orang yang membutuhkan bantuan, menyusun kebijakan dan analisis kemanusiaan, mengelola sistem informasi kemanusiaan dan mengawasi himpunan dana-dana kemanusiaan. OCHA bermarks besar di Jenewa dan New York dengan kehadiran kuat di tingkat regional dan negara di Asia dan Pasifik:

1. **Kantor Regional OCHA di Asia dan Pasifik (ROAP)** terletak di Bangkok. ROAP memberikan dukungan kepada 36 negara di Asia Selatan, Asia Timur, Asia Tenggara dan Pasifik.
2. **Kantor Regional OCHA untuk Pasifik (ROP)** berlokasi di Fiji. ROP mendukung 14 negara Kepulauan Pasifik di bawah kepemimpinan dua UN RC di Fiji dan Samoa. Selain itu, ROP juga memberikan dukungan kepada PHT.
3. OCHA mempunyai **Kantor-Kantor Negara** di Sri Lanka, Myanmar, Indonesia, Pakistan, dan Filipina, memberikan dukungan kepada para *Humanitarian Coordinator* dan HCT setempat.
4. **Tim Penasehatan Kemanusiaan (Humanitarian Advisory Team/HAT)** merupakan kehadiran OCHA skala kecil untuk mendukung *Resident Coordinator* dan *Humanitarian Coordinator*, dan berlokasi di Nepal, Bangladesh, dan Jepang.

BAGAIMANA OCHA BEKERJA DENGAN PEMERINTAH?

UN RC dan HC merupakan kontak penghubung pertama dengan sistem kemanusiaan internasional. OCHA biasanya mendukung UN RC melalui kantor-kantor regional dan HC melalui kantor Negara, atau melalui HAT dalam beberapa kasus. Secara meningkat, OCHA juga bekerja langsung dengan mitra-mitra pemerintah yang relevan, khususnya organisasi-organisasi penanggulangan bencana nasional, dalam memberikan dukungan untuk koordinasi keadaan darurat yang diprakarsai pemerintah, aktivitas-aktivitas kesiapsiagaan, dan/atau pengembangan kapasitas. OCHA juga memberikan bantuan kepada organisasi-organisasi regional yang mempunyai mandat kemanusiaan.

INGAT

Mekanisme-mekanisme koordinasi yang dijelaskan disini bekerja lebih efektif dalam satu konteks koordinasi yang sudah diatur sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah-pemerintah dianjurkan untuk menghubungi mitra-mitra potensial sebelum terjadinya satu keadaan darurat.

Bagian ini menjelaskan beberapa perangkat dan layanan internasional yang paling penting yang ada untuk respon bencana di Asia dan Pasifik.

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, para pelaku respon keadaan darurat yang paling utama adalah masyarakat yang terkena dampak bencana itu sendiri dan pemerintah-pemerintah mereka. Perangkat dan layanan-layanan internasional hanya diaktifkan apabila kebutuhan-kebutuhan respon bencana melampaui kemampuan nasional dan sebuah pemerintah yang terkena dampak bencana meminta dan/atau menerima bantuan internasional.

Bagian ini meliputi perangkat dan layanan internasional di empat bidang:

- A. MOBILISASI TIM TEKNIS
- B. MOBILISASI LAYANAN TEKNIS
- C. MOBILISASI SUMBER DAYA KEUANGAN
- D. PENGELOLAAN INFORMASI DAN PENGKAJIAN



BAGAIMANA MEMBACA BAGIAN INI

Ada penjelasan singkat tentang tiap perangkat dan layanan, diikuti dengan dua penjelasan lebih lanjut yang disajikan dalam warna hijau: Untuk siapa perangkat/layanan ini? Bagaimana mengaksesnya?

UNTUK SIAPA PERANGKAT/LAYANAN INI?

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

A. MOBILISASI TIM TEKNIS

Berbagai tim teknis internasional dapat digerakkan dalam waktu beberapa jam setelah terjadinya bencana untuk membantu upaya-upaya bantuan bencana oleh pemerintah. Yang dijelaskan disini adalah tujuan, komposisi, dan modalitas aktivasi dari (a) bilateral, (b) antar-pemerintah, dan (c) Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Tim-tim ini biasanya ditempatkan di bencana-bencana berskala besar dan kadang-kadang dalam bencana-bencana berskala menengah. Tim-tim ini melengkapi tim-tim teknis per sektor yang ditempatkan oleh pemerintah, *cluster-cluster*, dan badan-badan terpisah lainnya dan dirancang untuk melengkapi kerja-kerja mereka.

BILATERAL

1. Tim-tim Pencarian dan Penyelamatan Perkotaan
2. Tim-tim respon teknis bilateral

ANTAR-PEMERINTAH

1. *UN Disaster Assessment and Coordination* (UNDAC)
2. *Emergency Rapid Assessment Team* (ERAT) ASEAN
3. Unit Lingkungan gabungan OCHA/UNEP



- ▶ Pernyataan keadaan darurat oleh pemerintah yang terdampak
- ▶ Permintaan akan dan/atau penerimaan bantuan internasional oleh pemerintah yang terdampak
- ▶ Kemungkinan pengiriman tim-tim FACT, RDRT, dan ERU
- ▶ Kemungkinan pengiriman tim-tim USAR, ERAT dan UNDAC
- ▶ Kemungkinan pengiriman MCDA
- ▶ Kemungkinan pengiriman modul APHP dan IHP jika diminta
- ▶ Dana awal dari IFRC, DREF dan LSM internasional tersedia
- ▶ Laporan situasi dari PBB dihasilkan

12 jam 24 36 48

..... 12-48 jam

- ▶ Kemungkinan Penunjukan HC
- ▶ Perencanaan Respon *Cluster* dimulai
- ▶ Pembentukan HIC
- ▶ MIRA Tahap I: Definisi Skenario Awal (*Preliminary Scenario Definition/PSD*) selesai disusun
- ▶ Jejaring Hubungan Keluarga ICRC dibentuk

60 72

..... 72 jam

- ▶ Pengiriman dari UNHRD
- ▶ Alokasi awal CERF
- ▶ Peluncuran Penggalangan Dana Cepat (*Flash Appeal*)
- ▶ Keluarnya tim USAR menengah dan berat antara 7 hingga 10 hari setelah penugasan

1 minggu

.....▶ 1 minggu

- ▶ Hibah tunai untuk Keadaan Darurat (*Emergency Cash Grant*) dari UNOCHA dapat disalurkan dalam waktu 10 hari
- ▶ MIRA Tahap II: Laporan diselesaikan
- ▶ Keluarnya tim-tim FACT antara 2-4 minggu setelah penugasan
- ▶ Tim-tim UNDAC keluar 3 minggu setelah penugasan

2-3 minggu

..... 2-3 minggu

- ▶ Alokasi CERF yang kedua
- ▶ Dokumen Penggalangan Dana Cepat direvisi

4-6 minggu

.....▶ 4-6 minggu

Perangkat dan layanan yang tersedia sesuai skala bencana
(atas permintaan Pemerintah yang terdampak)

Skala Keadaan Darurat			
	Kecil	Menengah	Besar
MOBILISASI TIM TEKNIS	<ul style="list-style-type: none"> ▶ USAR "Ringan" ▶ RDRT 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ USAR "Menengah" ▶ ERAT ▶ UNDAC ▶ RDRT ▶ ERU 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ USAR "Berat" ▶ ERAT ▶ UNDAC ▶ FACT ▶ RDRT ▶ ERU
MOBILISASI LAYANAN TEKNIS		<ul style="list-style-type: none"> ▶ MCDA ▶ APHP ▶ Jejaring UNHRD ▶ Modal awal dari LSM internasional 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ MCDA ▶ IHP ▶ Jejaring UNHRD ▶ Modal awal dari LSM internasional
MOBILISASI SUMBER DAYA KEUANGAN	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Hibah Tunai Keadaan darurat UN OCHA ▶ DREF dari IFRC sebagai hibah ▶ Modal awal dari LSM internasional 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Penggalangan Dana Cepat oleh PBB ▶ CERF ▶ Hibah Tunai Keadaan darurat UN OCHA ▶ DREF dari IFRC sebagai pinjaman modal awal 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ UN <i>Flash Appeal</i> ▶ CERF ▶ Hibah Tunai Keadaan darurat UN OCHA ▶ DREF dari IFRC sebagai pinjaman modal awal
MANAJEMEN INFORMASI & PENGAJIAN		<ul style="list-style-type: none"> ▶ <i>Humanitarian Coordinator</i> ▶ <i>Cluster-cluster</i> ▶ MIRA 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ <i>Humanitarian Coordinator</i> ▶ <i>Cluster-cluster</i> ▶ HIC ▶ MIRA ▶ PDNA-RF ▶ Laporan Situasi UN OCHA ▶ CDAC

GERAKAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH

1. *Regional Disaster Response Team* (RDRT) dari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah
2. *Field Assessment and Coordination Teams* (FACT) dari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah
3. *Emergency Response Units* (ERU) dari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah

BILATERAL

Urban Search and Rescue (USAR) terdiri dari para ahli yang terlatih yang melakukan penyelamatan dan bantuan medis dalam sebuah keadaan darurat. Tim-tim USAR yang ditugaskan secara internasional terdiri dari personel tenaga ahli, perlengkapan khusus dan anjing pelacak. Mereka dapat diturunkan dalam waktu 24 hingga 48 jam setelah terjadinya satu bencana. Tim-tim USAR ditawarkan dan diterima secara bilateral dan/atau dengan dukungan koordinasi dari *International Search and Rescue Advisory Group* (INSARAG) yang dikelola OCHA. Kelebihan yang diperoleh dengan bekerja dengan INSARAG untuk menerima tim-tim USAR internasional adalah bahwa kapasitas dan kemampuan mereka yang pasti dijelaskan melalui satu Klasifikasi Eksternal INSARAG (IEC) dan tim-tim bekerja sesuai standar-standar dan modalitas yang disepakati di tingkat internasional.

Selain itu ada dua mekanisme koordinasi yang melengkapi yang mendukung penugasan USAR dari INSARAG:

Virtual On-Site Operations Coordination Centre (Virtual OSOCC) merupakan sebuah jejaring global daring dan portal informasi yang mendorong pertukaran data antara para pelaku respon bencana dan negara-negara yang terdampak sebelum, selama, dan setelah bencana-bencana yang terjadi secara tiba-tiba. Ini merupakan tempat pertama untuk melihat apakah sebuah pemerintah meminta bantuan pencarian dan penyelamatan, dan untuk melacak kedatangan dan posisi berbagai tim USAR.

On-Site Operations Coordination Center (OSOCC) merupakan sebuah fasilitas fisik yang dibentuk di negara yang meminta USAR untuk menerima Tim USAR yang datang dan mendukung koordinasi antar tim USAR. Di OSOCC, tim-tim bantuan internasional mendaftar dan menerima informasi dasar tentang situasi, operasi-operasi para pelaku respon tingkat nasional dan internasional, dan pengaturan logistik.

UNTUK SIAPA TIM-TIM TERSEBUT?

Tim-tim USAR membantu upaya-upaya pemerintah-pemerintah nasional, khususnya di wilayah-wilayah perkotaan dimana ada bangunan-bangunan yang runtuh.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

Sebuah pemerintah yang mencari bantuan untuk mengaktifkan tim-tim USAR internasional melalui INSARAG dapat melakukannya melalui *Focal Point* INSARAG di tingkat nasional atau secara langsung melalui sekretariat INSARAG di insarag@un.org. Akun untuk dapat mengakses Virtual OSOCC dapat dikirim ke <http://ocha.unog.ch/virtualosoc>. Informasi lebih lanjut tentang OSOCC dapat diperoleh melalui OCHA-ROAP di ocha-roap@un.org.

Tim-tim respon teknis bilateral adalah tim-tim keadaan darurat yang diterjunkan untuk membantu pemerintah untuk membuat pengkajian awal tentang kebutuhan-kebutuhan bantuan bagi pemerintah yang terdampak dan/atau badan-badan PBB, Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, dan LSM. Beberapa tim respon teknis bilateral utama yang aktif di Asia dan Pasifik antara lain adalah *Disaster Assistance Response Team* (DART) dari *United States Agency for International Development/USAID*, *Conflict, Humanitarian, and Security Department* (CHASE) dari *Department for International Development* (DFID) Kerajaan Inggris, *Japan Disaster Relief* (JDR) dari *Japan International Cooperation Agency* (JICA), *Civil Protection Team* dan *Rapid Response Team* dari *European Community Humanitarian Office* (ECHO).

UNTUK SIAPA TIM-TIM TERSEBUT?

Mayoritas tim-tim respon teknis bilateral ini dirancang untuk mendukung pemerintah pemberi bantuan (penyandang dana) dalam mengambil keputusan tentang jenis bantuan apa yang akan diberikan selama respon keadaan darurat. Beberapa tim, misalnya JDR, juga menyediakan bantuan pencarian dan penyelamatan, bantuan medis, dan bantuan teknis lain.

BAGAIMANA MENAKSESNYA?

Informasi lebih banyak tentang tim-tim respon teknis bilateral ini dapat diperoleh dari kedutaan-kedutaan besar masing-masing negara.

APA BEDA ANTARA TIM USAR YANG “RINGAN”, “MENENGAH” DAN “BERAT”?

Menurut sistem klasifikasi INSARAG, tim-tim USAR dapat digolongkan menjadi tiga kategori yaitu ringan, menengah dan berat.

1. **TIM USAR RINGAN** mempunyai kemampuan operasional untuk membantu pencarian dan penyelamatan permukaan segera setelah terjadinya suatu bencana. Tim-tim USAR Ringan biasanya tidak direkomendasikan untuk penugasan internasional.
2. **TIM USAR MENENGAH** mempunyai kemampuan operasional untuk melakukan operasi-operasi pencarian dan penyelamatan di dalam kejadian-kejadian runtuhnya struktur. Tim USAR menengah diperlukan untuk mencari orang-orang yang terjebak di reruntuhan. Tim-tim USAR Menengah Internasional yang bertugas ke satu negara yang terdampak harus beroperasi dalam waktu 32 jam setelah berita tentang bencana dimuat di OSOCC Virtual. Sebuah tim menengah harus dilengkapi dengan staf yang memadai agar dapat beroperasi 24 jam terus menerus di suatu tempat hingga tujuh hari.
3. **TIM USAR BERAT** mempunyai kemampuan operasional untuk operasi-operasi pencarian dan penyelamatan teknis yang sulit dan rumit. Tim-tim USAR berat dibutuhkan untuk mencari orang-orang yang terjebak dan menggunakan sistem K-9 dan teknis. Mereka juga diperlukan untuk memberikan bantuan internasional dalam bencana-bencana yang mengakibatkan runtuhnya banyak struktur, khususnya di situasi perkotaan, ketika kapasitas respon di tingkat nasional sudah kewalahan atau tidak memiliki kemampuan yang diperlukan. Tim-tim USAR berat internasional yang ditugaskan ke satu negara yang terdampak harus beroperasi di negara tersebut dalam waktu 48 jam setelah berita tentang bencana dimuat di OSOCC Virtual. Sebuah tim USAR berat harus dilengkapi dengan sumber daya agar dapat beroperasi 24 jam terus menerus di dua lokasi yang berbeda hingga 10 hari.

Sumber: Pedoman INSARAG

ANTAR-PEMERINTAH

UN Disaster Assessment and Coordination (UNDAC) merupakan tim-tim siaga yang terdiri dari para profesional yang khusus terlatih dalam penanggulangan bencana internasional dari Negara-Negara Anggota PBB, badan-badan PBB dan organisasi-organisasi respon bencana lain yang dapat ditugaskan dalam waktu 12 hingga 48 jam setelah bencana. Elemen-elemen utama dalam tim UNDAC adalah kemandirian dalam telekomunikasi, kantor dan perlengkapan pribadi. Sebuah tim UNDAC biasanya berada di satu wilayah yang terdampak untuk tahap respon awal, yang dapat berlangsung hingga tiga minggu.

UNTUK SIAPA TIM-TIM TERSEBUT?

Tim-tim UNDAC ditugaskan untuk membantu pemerintah-pemerintah dan organisasi-organisasi bantuan internasional. Penugasan tim-tim UNDAC tidak dikenakan biaya. Para anggota tim didanai melalui kesepakatan-kesepakatan yang sudah diatur sebelumnya dengan lembaga-lembaga anggota UNDAC dan pemerintah-pemerintah.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

Sebuah tim UNDAC ditugaskan atas permintaan satu pemerintah yang terdampak, UN RC atau HC. Sebuah tim UNDAC dapat diminta untuk dikirimkan melalui OCHA di nomor +41 22 917 1600, undac_alert@un.org, atau melalui OCHA-ROAP di nomor +66 2288 2611 atau di ocha-roap@un.org.

SATU TIM UNDAC DAPAT DITUGASKAN BAHKAN JIKA PEMERINTAH TIDAK MENGELUARKAN SATU PERMINTAAN UMUM UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN INTERNASIONAL: KASUS JEPANG

Menyusul Gempa Bumi Dahsyat Jepang Timur pada 2011, Pemerintah Jepang meminta satu tim UNDAC khusus meskipun negara ini tidak meminta bantuan internasional yang lebih umum.

Dikirimkan dalam waktu 48 jam, tujuh anggota tim UNDAC melakukan operasi bantuan keadaan darurat dengan berbasis di kantor JICA di Tokyo selama 10 hari. Kerangka acuan tim UNDAC yang diminta oleh Pemerintah Jepang adalah sebagai berikut:

1. Untuk melaporkan kepada masyarakat internasional tentang situasi keadaan darurat
2. Untuk memberikan penasehatan kepada Kementerian Luar Negeri tentang bagaimana merespon pada berbagai tawaran bantuan
3. Untuk membantu, dari Tokyo, dalam mengkoordinasikan tim-tim USAR internasional yang dikirimkan ke Jepang.

TENTANG KEMITRAAN TEKNIS UNDAC

Tim-tim UNDAC bekerja dengan sejumlah LSM teknis dan mitra-mitra lain untuk memastikan penugasan secara cepat dan kecukupan tim secara mandiri. Contoh antara lain adalah kemitraan UNDAC dengan [Télécoms Sans Frontières](#) untuk telekomunikasi, dengan [MapAction](#) untuk layanan pemetaan di lokasi, dengan [DHL](#) untuk logistik bandara dan dengan [UNOSAT](#) untuk citra satelit.

Emergency Rapid Assessment Team (ERAT) ASEAN merupakan pusat sumber daya tenaga ahli tentang pengkajian keadaan darurat yang terlatih dan siap ditugaskan di bencana-bencana yang terjadi di negara-negara ASEAN. ERAT dari ASEAN bertujuan untuk membantu organisasi-organisasi penanggulangan bencana nasional dalam tahap paling awal dalam satu keadaan darurat dalam berbagai bidang termasuk (a) melakukan pengkajian cepat, (b) membuat perkiraan tentang skala, keparahan dan dampak sebuah bencana melalui satu pengkajian kerusakan dan analisis kebutuhan, (c) mengumpulkan informasi dan melaporkan tentang kebutuhan-kebutuhan mendesak dari orang-orang yang terdampak bencana, dan (d) berkoordinasi dengan AHA Centre untuk mobilisasi, respon dan pengiriman aset-aset dan pasokan regional dalam penanggulangan bencana, dan barang-barang dan bantuan kemanusiaan ke wilayah-wilayah yang terdampak bencana.

Para anggota ERAT terdiri dari badan-badan penanggulangan bencana nasional yang terlatih dan staf kementerian-kementerian terkait dari 10 Negara Anggota ASEAN yang memperkuat kolaborasi dengan pemerintah-pemerintah dan masyarakat-masyarakat Negara Anggota ASEAN yang terdampak.

UNTUK SIAPA TIM-TIM TERSEBUT?

ASEAN-ERAT ditugaskan untuk membantu Negara-negara Anggota ASEAN yang terdampak bencana.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

Penugasan ASEAN-ERAT tidak dikenakan biaya. ERAT ditugaskan atas permintaan kepada AHA Centre ASEAN di info@ahacentre.org atau di +62 21 2305006 atau melalui *focal point* ASEAN di tingkat nasional.

Joint OCHA/UNEP Environment Unit (JEU) merupakan satu mekanisme respon keadaan darurat PBB yang memberikan bantuan internasional kepada negara-negara yang mengalami keadaan darurat lingkungan. Para tenaga ahli khusus keadaan darurat lingkungan, seperti ahli kimia, tenaga ahli tentang pengolahan air, ahli geologi, dan ahli teknik, dapat ditugaskan secara terpisah atau sebagai bagian dari tim UNDAC. Para tenaga ahli khusus ini bekerja dengan badan-badan nasional dan sering kali dengan militer untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan risiko-risiko lingkungan dengan menggunakan *Flash Environmental Assessment Tool* (FEAT). Perlengkapan khusus untuk mendeteksi zat-zat berbahaya dan melakukan pemetaan dan analisis di lokasi dapat dimobilisasi melalui *HazMat Module* (Singapura) dan *Mobile Laboratory* (Belanda).

UNTUK SIAPA UNIT INI?

Joint OCHA/UNEP Environment Units ditugaskan untuk membantu pemerintah-pemerintah.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

Bantuan dalam keadaan darurat lingkungan dan/atau bencana alam dengan dampak sekunder pada lingkungan dapat diminta oleh satu pemerintah melalui focal point JEU di tingkat Nasional yang sudah dibentuk terlebih dahulu, atau melalui *Environmental Emergency Notification/Request for International Assistance* yang dapat diunduh dari situs web OCHA/UNEP yaitu <http://www.unocha.org/unep>.

GERAKAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH

Regional Disaster Response Teams (RDRT) merupakan tim-tim respon regional yang terlatih yang terdiri dari staf Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Nasional dan para tenaga sukarela yang dapat ditugaskan 24 hingga 48 jam setelah terjadinya satu bencana untuk memberikan bantuan kepada Masyarakat-masyarakat Nasional di negara-negara tetangga. RDRT bertujuan untuk meningkatkan pengembangan kapasitas regional dalam penanggulangan bencana. Fungsi utama para anggota RDRT adalah:

1. Untuk melakukan pengkajian-pengkajian utama
2. Untuk menyusun perencanaan operasional
3. Untuk melaksanakan manajemen bantuan darurat

Field Assessment Coordination Teams (FACT) merupakan tim-tim yang dapat ditugaskan dengan segera yang terdiri dari para manajer bidang pengkajian bencana dari Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang membantu Masyarakat-Masyarakat Nasional dan kantor-kantor lapangan IFRC. Para anggota FACT mempunyai keahlian teknis dalam bidang bantuan darurat, logistik, gizi, kesehatan masyarakat, dan epidemiologi, bantuan psikologis, air dan sanitasi, dan keuangan dan administrasi. FACT selalu siaga dan dapat ditugaskan di mana pun di belahan dunia ini dalam 12 hingga 24 jam setelah bencana dan beroperasi hingga selama empat minggu.

Emergency Response Units (ERU) merupakan tim-tim yang terdiri dari para ahli teknis khusus yang terlatih yang mempunyai mandat untuk memberikan bantuan segera kepada Masyarakat-Masyarakat Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di negara-negara yang terdampak bencana. Mereka memberikan bantuan khusus atau layanan langsung jika fasilitas-fasilitas hancur, kewalahan memenuhi kebutuhan atau tidak ada. ERU bekerja erat dengan FACT. Tim-tim ERU menggunakan perlengkapan standar yang sudah disiapkan sebelumnya dan dirancang untuk dapat memenuhi kebutuhan sendiri hingga satu bulan. ERU dapat ditugaskan dalam 24 hingga 72 jam dan dapat beroperasi hingga empat bulan.

UNTUK SIAPA TIM-TIM TERSEBUT?

Semua tiga tim teknis tersebut ditugaskan untuk memmbantu Masyarakat-Masyarakat Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, IFRC, dan pemerintah-pemerintah negara-negara yang terdampak bencana.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

Informasi tentang tim-tim ini dapat diperoleh melalui Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Nasional dan IFRC.

BAGAIMANA PEMERINTAH MENGELOLA PENUGASAN TIM TEKNIS INTERNASIONAL?

Salah tantangan utama yang dihadapi pemerintah-pemerintah yang terdampak bencana pada jam-jam dan hari-hari pertama satu keadaan darurat adalah dalam mengelola berbagai tawaran bantuan, termasuk tawaran pengiriman USAR dan tim-tim respon teknis lain. Di tengah krisis, akan sulit bagi pemerintah untuk mengevaluasi apa yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. Juga akan sulit untuk menolak tawaran bantuan.

Penting bagi negara-negara untuk mengingat bahwa meskipun tim-tim USAR “menengah” dan “berat” sangat penting dalam upaya pencarian dan penyelamatan dalam bencana-bencana berskala besar, tim yang “ringan” biasanya bertanggung jawab untuk persentase terbesar dalam aktivitas-aktivitas penyelamatan nyawa dalam sebuah keadaan darurat. Ini karena tim-tim ringan ditempatkan di lokasi kejadian dan mereka dapat segera mulai beroperasi ketika bencana melanda. Secara umum, tim-tim USAR internasional (tim “menengah” dan “berat”) hanya boleh diterima apabila mereka dapat beroperasi dalam 36 jam setelah bencana, yang merupakan waktu yang sangat menentukan dimana hampir sebagian besar nyawa dapat betul-betul diselamatkan.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah nasional untuk berpikir ke depan tentang jenis-jenis risiko bencana yang mereka hadapi dan dengan demikian mengevaluasi jenis-jenis bantuan teknis yang mungkin dapat mereka terima, dari siapa dan dalam bagaimana urutan prioritasnya. Sejumlah tim dapat diminta untuk tiba untuk mengantisipasi kebutuhan yang diperkirakan akan muncul, misalnya jika diketahui bahwa akan terjadi topan yang berdampak pada satu wilayah atau penduduk tertentu.

Juga akan bermanfaat jika pemerintah-pemerintah meminta tim-tim UNDAC (atau ERAT dari ASEAN) untuk mengelola proses penerimaan atau penolakan tawaran-tawaran bantuan internasional atas nama mereka. Dengan cara ini, para pejabat pemerintah dapat fokus untuk memberikan bantuan pada penduduk yang terdampak dengan menggunakan sumber daya-sumber daya respon di tingkat nasional.

INGAT

- Negara-negara yang terdampak bencana seharusnya menyusun rencana-rencana kesiapsiagaan terperinci sehingga mereka mengetahui jumlah dan jenis tim USAR dan tim respon teknis lainnya yang kemungkinan dapat mereka terima dalam situasi bencana.
- Negara-negara yang terdampak bencana didorong untuk bekerja dengan entitas-entitas teknis internasional untuk menyepakati komposisi, kerangka acuan dan periode aktivasi tim-tim teknis
- Selain tim-tim yang dijelaskan disini, beberapa *cluster* global mempunyai tim-tim respon cepat yang terdiri dari para ahli di tingkat regional seperti para penasihat tentang perlindungan anak dan kekerasan berbasis gender, yang dapat dikirimkan dengan cepat.

B. MOBILISASI LAYANAN-LAYANAN TEKNIS

Selain tim-tim teknis yang dapat ditugaskan dalam keadaan darurat, ada layanan-layanan teknis yang dapat digunakan untuk membantu pemerintah-pemerintah nasional dan organisasi-organisasi internasional dalam respon mereka. Untuk tujuan panduan ini, layanan-layanan teknis yang dimaksud disini meliputi semua hal mulai dari pasokan yang disiapkan sebelumnya hingga paket teknologi komunikasi dan penjadwalan *surge* untuk keadaan darurat. Layanan-layanan teknis dalam bagian ini dikelompokkan berdasarkan tiga bidang (a) aset-aset dan pasokan bantuan darurat, (b) jejaring teknis, dan (c) penjadwalan siaga dan penjadwalan *surge*

ASET-ASET DAN PASOKAN BANTUAN DARURAT

1. *Military and Civil Defence Assets* (MCDA)
2. *International Humanitarian Partnership* (IHP)
3. *Asia-Pacific Humanitarian Partnership* (APHP)
4. *UN Humanitarian Response Depot Network* (UNHRD)

JEJARING TEKNIS

1. *Family Links Network* ICRC

JADWAL SIAGA DAN JADWAL SURGE

1. *Emergency Response Roster* dan *Associate Surge Pool* OCHA (ERR+ASP)
2. Penjadwalan *surge Cluster* Telekomunikasi Keadaan darurat dan *Cluster* Logistik
3. NORCAP, ProCAP, GenCAP dan ACAPS

ASET DAN PASOKAN BANTUAN DARURAT

Military and Civil Defence Assets (MCDA) merupakan aset-aset dan layanan-layanan yang seragam yang dikontribusikan oleh organisasi-organisasi militer dan pertahanan sipil asing untuk bantuan kemanusiaan. Termasuk disini adalah personel bantuan darurat, perlengkapan (misalnya transportasi udara, darat dan laut, perlengkapan komunikasi), dan pasokan dan layanan (misalnya bantuan medis, layanan keamanan). MCDA diberikan tanpa pembebanan biaya pada negara yang terdampak dan/atau pada PBB, kecuali ditentukan berbeda menurut perjanjian internasional.

MCDA yang ditugaskan melalui permintaan pusat untuk membantu badan-badan PBB disebut UN MCDA. MCDA dan UN MCDA diatur menurut Status Kesepakatan Angkatan Bersenjata antara dua negara dan/atau oleh *Oslo Guidelines on the Use of Foreign Military and Civil Defence Assets in Disaster Relief*.

UNTUK SIAPA ASET-ASET TERSEBUT?

MCDA ditujukan untuk negara-negara yang terdampak. UN MCDA adalah untuk badan-badan PBB yang beroperasi dalam mendukung negara-negara yang terdampak.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

Dengan pernyataan ijin dari negara yang terdampak, MCDA juga dapat dimintakan melalui UN RC atau HC.

PENGUNAAN ASET-ASET MILITER DALAM BENCANA DI ASIA DAN PASIFIK: SEJUMLAH PRINSIP UTAMA

MCDA juga harus dilihat sebagai perangkat yang melengkapi mekanisme-mekanisme bantuan darurat yang sudah ada untuk mengisi kesenjangan kemanusiaan antara kebutuhan-kebutuhan yang dimintakan untuk dipenuhi oleh masyarakat bantuan dan dengan sumber daya yang tersedia untuk memenuhinya.

MCDA dapat dimobilisasi dan ditugaskan berdasarkan perjanjian bilateral atau perjanjian aliansi regional atau internasional sebagai “penugasan angkatan bersenjata lain” atau sebagai bagian dari operasi PBB yang disebut “UN MCDA”. Semua bantuan bencana, termasuk MCDA, harus diberikan atas permintaan atau dengan persetujuan negara yang terdampak dan, pada dasarnya, berdasarkan pada satu penggalangan bantuan internasional.

Sebuah negara yang membantu yang memutuskan untuk mengirimkan MCDA-nya harus memperhatikan rasio biaya/manfaat operasi-operasi seperti itu dibandingkan dengan alternatif-alternatif lain, jika ada. Pada prinsipnya, MCDA harus diminta hanya sebagai pilihan terakhir, dan biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan MCDA dalam misi-misi bantuan bencana tidak boleh diambil dari yang anggaran yang tersedia untuk aktivitas-aktivitas bantuan dan pembangunan internasional.²⁰

International Humanitarian Partnership (IHP) adalah sebuah jejaring informal yang terdiri dari tujuh organisasi pemerintah di Eropa yang bekerja secara harian untuk membantu operasi-operasi keadaan darurat. IHP mempunyai kapasitas yang kuat untuk mendukung PBB, Uni Eropa, dan organisasi-organisasi internasional lainnya. Banyak modul IHP yang sudah dibakukan – mulai dari modul-modul kecil tentang Teknologi Komunikasi Informasi (ICT) dan bantuan Pengelolaan Informasi (IM) di kamp-kamp besar dan kompleks-kompleks kemanusiaan. Contoh lain modul IHP adalah bantuan kendaraan atau perlengkapan keamanan, serta bantuan untuk membentuk Humanitarian Information Centre (HIC). IHP terbuka terhadap permintaan-permintaan untuk mendapatkan dukungan di luar sistem modular. Negara-negara yang ikut berperan antara lain adalah Denmark, Estonia, Finlandia, Jerman, Norwegia, Swedia, dan Kerajaan Inggris.

Asia-Pacific Humanitarian Partnership (APHP) adalah sebuah penyelenggaraan teknis multinasional yang berbasis kawasan yang dirancang untuk memperkuat respon badan-badan kemanusiaan. Seperti IHP, APHP diperuntukkan badan-badan PBB dan tim-tim UNDAC, serta IFRC dan ASEAN. Modul-modul dasar (misalnya laptop, perlengkapan telekomunikasi, tenda dan generator) dapat dimobilisasi dalam enam jam dan beroperasi selama dua hingga empat minggu dan dilengkapi dengan staf pendukung yang sangat terlatih. Modul-modul yang lebih besar dan kompels (seperti kamp kecil dan bantuan lingkungan) dapat dimobilisasi dalam waktu satu hingga dua hari. Negara-negara di Asia dan Pasifik yang berperan dalam APHP dengan modul-modul bantuan yang terletak di tingkat nasional adalah Australia, China, Jepang, Selandia Baru, Singapura, dan Korea Selatan. Télécoms Sans Frontières adalah satu LSM mitra.

UNTUK SIAPA KEMITRAAN TERSEBUT?

²⁰ Seperti disampaikan dalam Pedoman Oslo dan APC-MADRO.

IHP dan APHP terutama diperuntukkan badan-badan PBB dan tim-tim UNDAC namun juga dapat digunakan oleh Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, organisasi-organisasi regional dan pemerintah-pemerintah, sesuai permintaan.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

IHP dan APHP dapat diakses melalui sekretariat IHP di Jenewa di nomor +41 79 477 0812 atau melalui OCHA-ROAP di ocha-roap@un.org

Contoh bantuan modul terkini IHP/APHP di Asia dan Pasifik		
Negara	Bencana	Jenis
Nepal	Banjir Sungai Koshi 2008	Modul dukungan ICT
Indonesia	Gempa bumi Sumatra 2009	Modul dukungan ICT; kamp kecil; Modul OOSS
Pakistan	Banjir 2010	Kamp kerja; Pemurnian Air
Filipina	Topan Bopha 2012	Modul dukungan ICT

UN Humanitarian Response Depot (UNHRD) mendukung upaya-upaya penyimpanan pasokan darurat strategis yang dilakukan badan-badan PBB dan organisasi-organisasi kemanusiaan lain untuk merespon pada keadaan darurat. UNHRD di Asia dan Pasifik terletak di Subang, Malaysia, dan dikelola oleh WFP. Ia menjadi bagian dari satu jejaring *focal point* UNHRD di tingkat global.

UNHRD Subang mempunyai cadangan strategis berupa barang-barang bantuan non-pangan untuk keadaan darurat, termasuk perlengkapan medis, barang-barang untuk hunian sementara, perlengkapan IT dan material-material lain yang dirancang untuk membantu respon keadaan darurat. Pengiriman UNHRD biasanya dilakukan dalam waktu lima hingga tujuh hari menyusul adanya permintaan. Pergudangan, penyimpanan, dan pemeriksaan serta penanganan barang-barang bantuan tidak mengenakan biaya pada pengguna. UNHRD juga memberikan layanan tambahan yang dibayar sesuai harga riil, seperti pengadaan, transportasi, bantuan teknis, asuransi, pengemasan kembali dan penggabungan.

AHA Centre, melalui penyimpanan pasokan keadaan darurat yang dibentuk di bawah Sistem Logistik Keadaan Darurat Bencana untuk ASEAN yang terletak di Subang, Malaysia memberikan barang-barang bantuan kepada negara-negara anggota yang terdampak selama keadaan darurat. Negara-negara Anggota ASEAN dapat meminta barang-barang bantuan melalui AHA Centre di Jakarta, Indonesia.

UNTUK SIAPA JEJARING TERSEBUT?

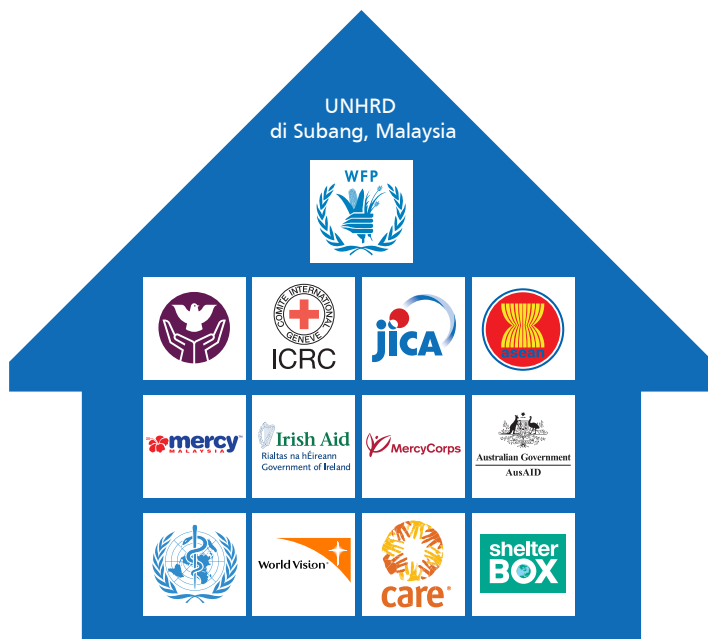
Saat ini ada 11 pengguna fasilitas UNHRD Subang: *ASEAN, AusAID, CARE, Irish Aid, JICA, Mercy Corps, MERCY Malaysia, Norwegian Church Aid, Swiss Red Cross dan Shelterbox. WFP, WHO dan World Vision International* diharapkan menyimpan pasokan barang-barang untuk kebutuhan darurat di fasilitas ini pada 2013.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

Barang-barang dari jejaring UNHRD dapat diminta untuk dikirimkan oleh UN RC atau HC, atau oleh badan-badan PBB, organisasi-organisasi internasional lain, pemerintah-

pemerintah, dan LSM-LSM yang telah menandatangani kesepakatan teknis dengan UNHRD. Informasi lebih lanjut tentang UNHRD di Subang dapat diakses melalui Koordinator WFP di wfp.subang@wfp.org.

UNHRD di Subang, Malaysia



*ASEAN dijadwalkan untuk menyimpan pasokan barang-barang bantuan darurat di UNHRD sebelum Maret 2013; AusAID juga sedang mempersiapkan untuk melakukan penyimpanan pasokan di UNHCR pada 2012

JEJARING TEKNIS

Family Links Network ICRC merupakan kerangka kerja utama di tingkat global untuk memulihkan hubungan keluarga setelah bencana. *Restoring Family Links* (RFL) merupakan istilah umum yang diberikan untuk beragam aktivitas yang bertujuan untuk mencegah terpisahnya keluarga dan hilangnya anggota keluarga, untuk memulihkan dan menjalin hubungan antar keluarga dan untuk mencari kejelasan tentang nasib orang-orang yang telah dilaporkan hilang. RFL terdiri dari *Central Tracing Agency* (CTA) ICRC, layanan-layanan pelacakan oleh Masyarakat-Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Nasional, dan badan-badan pelacakan dari pemerintah.

UNTUK SIAPA JEJARING TERSEBUT?

FLN ICRC ditujukan untuk keluarga-keluarga yang terdampak bencana yang kehilangan anggota keluarga/sanak saudara.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

Dukungan jejaring keluarga dalam negeri dapat diakses melalui Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Nasional. ICRC juga mempunyai situs web di <http://familylinks.icrc.org>.

JADWAL SIAGA DAN JADWAL *SURGE*

Selain tim-tim teknis eksternal yang dikelolanya, OCHA mempunyai beragam mekanisme meningkatnya kebutuhan staf internal dimana staf dapat ditugaskan untuk menangani kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan baru atau yang tidak terduga yang sangat penting di lapangan. Penugasan biasanya melibatkan kehadiran kantor baru OCHA atau memperkuat kantor-kantor yang sudah ada selama meningkatnya konflik.

Dalam keadaan darurat skala kecil dan menengah, dukungan *surge* biasanya diberikan oleh staf kantor regional, yang mempunyai pengetahuan setempat, beragam ketrampilan (yaitu pengelolaan informasi, informasi publik, koordinasi sipil-militer dan pelaporan) dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk mendukung mereka di lapangan. Dalam keadaan darurat yang lebih besar, penjadwalan yang dikelola markas besar akan digunakan untuk memastikan adanya transisi dari *surge* awal tingkat regional ke bantuan menengah hingga jangka panjang.

1. **Emergency Response Roster (ERR):** adalah mekanisme internal OCHA yang utama untuk penugasan jangka pendek staff ke keadaan darurat skala lebih besar. Saat ini ada 35 staf OCHA yang masuk dalam penjadwalan pada satu waktu bersamaan dan dapat ditugaskan dalam hitungan hari untuk bertugas hingga selama enam minggu.²¹ Semua profil rutin yang ada di kantor lapangan OCHA dapat diakses melalui ERR.
2. **Associate Surge Pool (ASP):** dibentuk untuk menjembatani kesenjangan antara meningkatnya kebutuhan staf yang mendesak dan tibanya staf reguler. ASP terdiri dari para “eksternal” yang telah disiapkan sebelumnya yang dapat direkrut dan diterjunkan dengan cepat. Rata-rata penugasan ASP adalah tiga hingga enam bulan.

WFP mengelola dua *cluster* layanan umum yang memberikan kapasitas teknis siaga dan *surge* untuk organisasi-organisasi kemanusiaan sejak awal terjadinya satu keadaan darurat. Dua *cluster* tersebut adalah *Cluster Telekomunikasi dalam Keadaan Darurat* dan *Cluster Logistik*.

1. **Cluster Telekomunikasi Keadaan Darurat** menyediakan infrastruktur, layanan, dan keahlian telekomunikasi antarlembaga di dalam negara untuk organisasi-organisasi kemanusiaan dalam satu keadaan darurat.
2. **Cluster Logistik** menerjunkan tim-tim logistik ke keadaan darurat-keadaan darurat untuk mengemban peran koordinasi logistik awal untuk organisasi-organisasi kemanusiaan.

UNTUK SIAPA DUKUNGAN TERSEBUT?

Bantuan telekomunikasi dan logistik dalam negara melalui *cluster-cluster* global yang diketuai oleh WFP ditujukan untuk organisasi-organisasi kemanusiaan. Para wakil dari organisasi-organisasi bantuan yang tertarik untuk bergabung dalam koordinasi dan pertukaran informasi ICT atau logistik dapat menghadiri pertemuan-pertemuan kelompok kerja setempat.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

Informasi tentang kedua *cluster* tersebut dapat diperoleh melalui Kantor Regional WFP di wfp.bkk@wfp.org atau melalui situs web *cluster* tersebut.

²¹ Dalam situasi luar biasa, penugasan bisa diperpanjang hingga maksimal tiga bulan

PBB dan Kementerian Luar Negeri Norwegia telah mengembangkan kapasitas-kapasitas siaga dan *surge* untuk memperkuat keahlian teknis dalam keadaan darurat. Jadwal *surge* umum yang terbesar disebut sebagai *Norwegian Refugee Council's Standby Roster* (NORCAP). NORCAP menyediakan keahlian dalam segala hal mulai dari perlindungan dan pendidikan dalam keadaan darurat, hingga logistik dan rekayasa teknik melalui penugasan cepat para profesional dan personil yang berpengalaman. Selain NORCAP, Norwegian Refugee Council (NRC) juga mengelola personil dalam kondisi siaga dan *surge* tematik berikut ini:

1. **Protection Standby Capacity Roster (ProCap)** merespon pada kesenjangan dalam pemenuhan prioritas dan kebutuhan dalam respon perlindungan dalam keadaan darurat di tingkat negara.
2. **Gender Standby Capacity Roster (GenCap)** mengembangkan kapasitas aktor-aktor kemanusiaan di tingkat negara untuk mengarusutamakan program kesetaraan gender, termasuk pencegahan dan respon pada kekerasan berbasis gender dalam semua sektor respon kemanusiaan.
3. **Assessment Capacities Project (ACAP)** merupakan kapasitas siaga dalam pengkajian yang menyediakan keahlian, data yang tepat waktu dan analisis untuk menjadi bahan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah-pemerintah dan HCT IASC.

UNTUK SIAPA KAPASITAS-KAPASITAS TERSEBUT?

Tim-tim NORCAP, ProCap, GenCap, dan ACAPS biasanya ditugaskan sebagai sumber daya untuk HCT setempat dan untuk mendukung HC. Mereka seringkali berada di UNHCR, UNICEF, OHCHR, OCHA dan/atau badan-badan lain. Keahlian ACAPS dalam pengkajian juga dapat disediakan untuk mendukung pemerintah.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

NORCAP, ProCap, GenCap dan ACAPS dikelola oleh Norwegian Refugee Council (NRC) atas nama Pemerintah Norwegia dan PBB. Informasi tentang penjadwalan dapat diakses di NORCAP (<http://norcapweb.no/>) dan semua pertanyaan dapat dikirimkan ke scs@un.org.

INGAT

Banyak layanan teknis dirancang untuk memperkuat kapasitas respon PBB dan badan-badan internasional lain dalam melakukan respon keadaan darurat. Meskipun demikian, paket-paket ini bersifat fleksibel dan pemerintah-pemerintah nasional didorong untuk berhubungan dengan entitas-entitas teknis untuk menelaah penyelenggaraan kesiapsiagaan untuk bantuan langsung.

C ■ MOBILISASI SUMBER DAYA KEUANGAN

“Dana cepat (*fast money*)” merupakan satu perangkat menentukan untuk betul-betul memulai respon ketika terjadi bencana. Bagian ini menjelaskan perangkat sumber daya-sumber daya keuangan internasional yang dapat dimobilisasi untuk mendukung upaya-upaya penyelamatan nyawa dan bantuan darurat dengan segera. Mekanisme-mekanisme ini bertujuan untuk menyebarkan dana dengan cepat berdasarkan pada pengkajian awal dan rencana-rencana respon, sementara pengkajian mendalam dan perencanaan strategis dilakukan untuk memobilisasi dana yang lebih besar untuk pemulihan berjangka panjang.

Bagian ini juga menjelaskan tentang perencanaan strategis internasional dan perangkat mobilisasi sumber daya yang digunakan dalam krisis yang terjadi dengan cepat dan yang berkepanjangan, yaitu Penggalangan Dana Cepat (*Flash Appeal*) dan Proses Penggalangan Dana Terkonsolidasi (*Consolidated Appeal Process*).

Mekanisme yang dijelaskan disini merupakan mekanisme-mekanisme multilateral. Pendanaan bencana di tingkat nasional, sumbangan bilateral dan donasi swasta juga penting untuk respon bencana yang cepat.

MEKANISME “DANA CEPAT”

1. *Central Emergency Response Fund* (CERF)
2. *Disaster Relief Emergency Fund* (DREF) IFRC
3. *Emergency Cash Grant* OCHA
4. Sumber Daya TRAC 1.1.3 Kategori II UNDP
5. *Emergency Response Fund* (ERF)
6. *ASEAN Disaster Management and Emergency Relief Fund* (ADMER Fund)
7. *Asia Pacific Disaster Response Fund* (APDRF)

PERANGKAT PENGGALANGAN DANA STRATEGIS

1. *Flash Appeal* PBB
2. *Consolidated Appeal Process* (CAP)

MEKANISME-MEKANISME “DANA CEPAT”

Central Emergency Response Fund (CERF) merupakan dana PBB yang dikelola OCHA yang dimaksudkan untuk memulai bantuan kemanusiaan dalam keadaan darurat. CERF terdiri dari US\$ 450 juta elemen hibah dan US\$ 30 juta fasilitas pinjaman. Elemen hibah dibagi menjadi bagian respon cepat dan bagian keadaan darurat yang kurang mendapat pendanaan. Hibah-hibah untuk respon cepat diberikan untuk membantu pelaksanaan aktivitas-aktivitas penyelamatan nyawa yang sangat penting dalam bencana-bencana yang terjadi secara tiba-tiba dan situasi-situasi dimana ada kebutuhan yang sangat berat, serta intervensi-intervensi lain yang sangat ditentukan oleh waktu yang tidak mendapat pendanaan dari sumber-sumber lain.²²

Sebagai patokan, pendanaan respon cepat CERF tidak melebihi US\$ 30 juta per negara per satu keadaan darurat, meskipun ERC dapat menawarkan pendanaan melebihi

²² Untuk tujuan Panduan ini, fasilitas respon merupakan yang paling relevan. Alokasi dari bagian keadaan-keadaan darurat yang kurang mendapatkan pendanaan dilakukan dua kali setahun dan menargetkan aktivitas-aktivitas di negara-negara yang mengalami keadaan darurat yang sedang berlangsung yang belum mendapat pendanaan dari donor lain. Sekitar sepertiga dari fasilitas hibah CERF dicadangkan untuk bagian keadaan-keadaan darurat yang kurang mendapatkan pendanaan. Fasilitas pinjaman CERF digunakan oleh badan-badan PBB sebelum masuknya dana yang sudah menjadi komitmen donor.

jumlah ini apabila ERC meyakini itu diperlukan. Dalam banyak contoh, penyediaan dana CERF untuk respon cepat ditargetkan sebesar sekitar 10 persen dari total dana yang dimintakan dalam *Flash Appeal*. Namun, CERF tidak tergantung pada penggalangan dana apa pun.

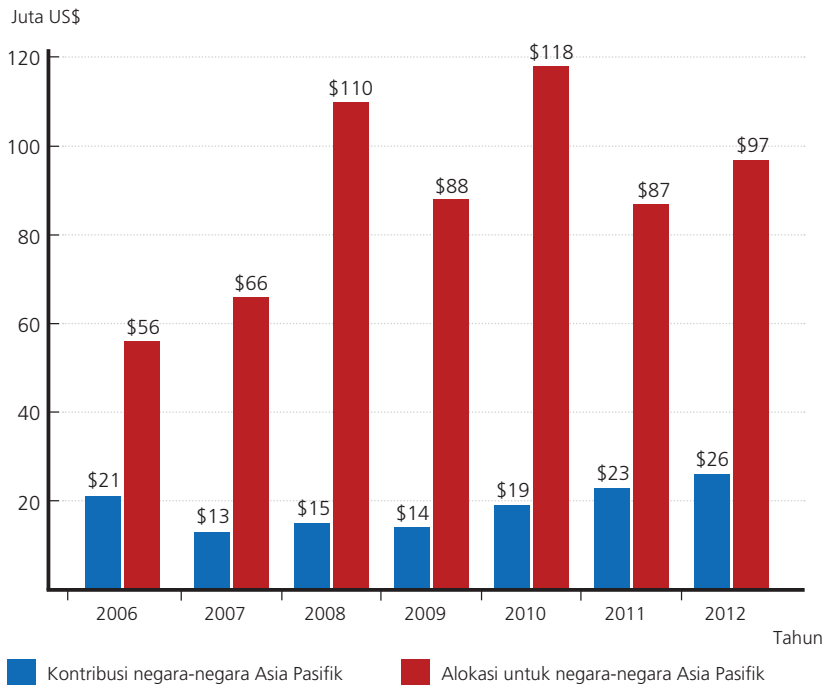
UNTUK SIAPA DANA TERSEBUT?

Sidang Umum PBB hanya mengizinkan dana CERF diberikan kepada badan-badan PBB dan IOM saja. Para mitra kemanusiaan non-PBB, termasuk LSM-LSM dan para mitra teknis pemerintah, dapat mengakses pendanaan CERF secara tidak langsung melalui subhibah dari para penerima hibah CERF.

BAGAIMANA MENGAksesNYA?

Dana hibah CERF untuk respon cepat diminta oleh UN RC atau HC atas nama Tim Kemanusiaan Negara. Meskipun demikian, begitu sudah dialokasikan, perjanjian kontrak dilakukan antara CERF dan badan penerima secara langsung. Dana CERF untuk respon cepat biasanya disalurkan dalam waktu dua minggu setelah adanya permintaan.

Kontribusi dan alokasi CERF di Asia dan Pasifik pada 2006-2012



Disaster Relief Emergency Fund (DREF) IFRC merupakan dana respon keadaan darurat yang menyediakan bantuan keuangan segera kepada Masyarakat-Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Nasional sehingga memungkinkan mereka untuk melaksanakan peran mereka yang unik sebagai pelaku respon pertama setelah terjadinya bencana. Alokasi dapat dibuat sebagai pinjaman untuk mengawali aktivitas

dalam kasus bencana-bencana berskala besar, sebagai hibah untuk memenuhi biaya-biaya operasi-operasi bantuan keadaan darurat skala kecil, atau untuk melakukan persiapan apabila bencana dalam waktu dekat akan terjadi.

UNTUK SIAPA DANA TERSEBUT?

DREF tersedia untuk semua 187 Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Nasional.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

IFRC meninjau permintaan-permintaan akan alokasi DREF kasus per kasus. Dana dapat diotorisasi dan dikeluarkan dalam 24 jam.

Emergency Cash Grant OCHA merupakan hibah untuk bantuan keadaan darurat yang dapat dengan segera disalurkan dalam satu bencana yang terjadi tiba-tiba. Hibah ini merupakan sumber daya dengan jumlah yang relatif kecil yang berasal dari anggaran rutin PBB dan disalurkan untuk aktivitas-aktivitas bantuan darurat yang mendesak segera setelah terjadinya satu bencana. Jumlah per alokasi tidak boleh melebihi US\$ 100.000 meskipun dapat diberikan lebih dari satu alokasi per keadaan darurat. Dana disalurkan dalam 10 hari dan dapat digunakan untuk mendanai aktivitas-aktivitas penyelamatan nyawa yang spesifik dan mendesak seperti pengadaan setempat, bantuan logistik dan/atau pengangkutan barang-barang bantuan.

UNTUK SIAPA DANA TERSEBUT?

Hibah tunai dalam keadaan darurat biasanya diterima oleh UN RC atau HC. UN RC atau HC dapat menggunakan dana tersebut secara langsung atau meminta persetujuan dari OCHA untuk mengirimkannya kepada kewenangan nasional atau LSM-LSM setempat.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

Dana diminta oleh UN RC atau HC, atau oleh kantor lapangan atau kantor regional OCHA. Sebuah pemerintah juga dapat meminta *Emergency Cash Grant* OCHA melalui Misi Permanen untuk PBB di Jenewa atau New York.

*Emergency Response Fund (ERF)*²³ merupakan dana yang dipusatkan di tingkat negara yang dikelola oleh HC dengan bantuan OCHA. Besarnya hibah biasanya antara US\$ 100.000 dan US\$ 250.000. Saat ini ada 12 ERF yang beroperasi di seluruh dunia, dua diantaranya berada di kawasan Asia Pasifik: Indonesia dan Myanmar. Kriteria untuk mendapatkan dana ERF cukup ketat dan Panduan dapat dilihat dalam situs.

UNTUK SIAPA DANA TERSEBUT?

Hibah ERF dapat diberikan kepada badan-badan PBB dan LSM-LSM.²⁴

²³ Dana Kemanusiaan Umum (*Common Humanitarian Fund/CHF*) adalah juga sebuah pengumpulan dana tingkat negara yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan dalam krisis-krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Saat ini ada 5 CHF, kesemuanya untuk benua Afrika.

²⁴ Pengelolaan dalam negeri sebuah ERF – termasuk siapa yang memenuhi syarat untuk menerima hibah dan prioritas pendanaan – ditentukan oleh strategi suatu negara dan oleh karenanya dapat berbeda dari satu negara ke yang lain.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

Dana ERF dikelola oleh HC dengan bantuan kantor OCHA dan di bawah arahan satu *Advisory Board* terpilih, yang dapat terdiri dari badan-badan PBB, IOM, LSM dan komponen dalam Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.

Sumber daya TRAC 1.1.3 Kategori II UNDP tersedia untuk mengkoordinasikan respon yang efektif terhadap krisis yang terjadi tiba-tiba (bencana atau konflik), melakukan pengkajian kebutuhan, memprakarsai penyusunan kerangka kerja pemulihan dini dan membentuk landasan yang kokoh untuk pemulihan yang berkelanjutan. Dana umumnya tidak melebihi US\$ 100.000 dan harus digunakan dalam 12 bulan.

UNTUK SIAPA DANA TERSEBUT?

Sumber daya TRAC 1.1.3 Kategori II UNDP tersedia secara internal untuk program-program UNDP di tingkat negara.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

Permintaan dilakukan oleh UN RC dalam sebuah proposal sederhana, disertai dengan satu laporan situasi. Ini kemudian harus disetujui oleh Ketua *Bureau for Crisis Prevention and Recovery* (BCPR) dalam 48 jam setelah adanya permintaan.

ASEAN Disaster Management and Emergency Relief Fund (ADMER Fund). ADMER Fund bertindak sebagai pusat sumber daya untuk mendukung pelaksanaan Program Kerja AADMER, untuk respon-respon keadaan darurat di Negara-negara Anggota ASEAN, serta untuk aktivitas-aktivitas operasional AHA Centre. Dana ini terbuka terhadap sumbangan sukarela oleh Negara-negara Anggota ASEAN, sumber daya publik dan swasta lain seperti Mitra Dialog ASEAN dan pemerintah-pemerintah yang membantu (penyandang dana). ADMER Fund dikelola oleh Sekretariat ASEAN melalui ACDM. ADMER Fund merupakan dana yang perlu diisi kembali dan bukan dana yang menjadi pendapatan.

UNTUK SIAPA DANA TERSEBUT?

Dana ini untuk Negara-negara Anggota ASEAN

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

Informasi lebih lanjut tersedia di AHA Centre ASEAN di info@ahacentre.org.

Asia Pacific Disaster Response Fund (APDRF) merupakan dana khusus *Asian Development Bank* (ADB) yang dirancang untuk memberikan sumber daya hibah inkremental kepada negara-negara berkembang yang menjadi anggota ADB yang terdampak bencana alam besar. APDRF menyediakan hibah yang dapat cepat disalurkan untuk membantu negara-negara menutupi pengeluaran-pengeluaran yang harus segera dilakukan untuk memulihkan layanan-layanan yang menyelamatkan nyawa orang-orang yang terdampak menyusul diumumkannya suatu bencana. Hibah diberikan dalam jumlah hingga US\$ 3 juta kepada pemerintah nasional. Setelah itu, pemerintah dapat mengalokasikan dana kepada pemerintah daerah, badan-badan

pemerintah, dan entitas-entitas nasional dan internasional lain yang sesuai, termasuk LSM.

UNTUK SIAPA DANA TERSEBUT?

APDRF diperuntukan negara-negara berkembang anggota ADB.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

Bantuan diberikan secara langsung oleh ADB kepada pemerintah-pemerintah nasional dan didasarkan pada kriteria berikut:

- 1. Satu bencana alam telah terjadi di satu negara berkembang yang menjadi anggota ADB
- 2. Satu keadaan darurat telah secara resmi diumumkan dan dalam skala yang melampaui kapasitas negara dan badan-badannya untuk memenuhi pengeluaran-pengeluaran yang mendesak yang diperlukan untuk memulihkan layanan-layanan yang menyelamatkan nyawa kepada penduduk yang terdampak.
- 3. UN RC telah menegaskan skala bencana dan mengindikasikan jumlah dana secara umum yang akan diperlukan.

Mekanisme sumber daya keuangan. Apa yang tersedia untuk siapa? Tabel rangkuman			
Dana	Disalurkan dalam	Untuk siapa dana tersebut?	Siapa yang mengawali proses?
CERF	10 hari hingga 2 minggu	Hanya badan-badan PBB dan IOM saja	UN RC dan/atau HC
IFRC DREF	24 jam	Masyarakat Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah	Masyarakat Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dan IFRC
Emergency Cash Grants OCHA	10 hari	UN RC atau HC, namun dapat disalurkan kepada kewenangan nasional atau LSM setempat	UN RC atau HC, kantor lapangan atau kantor regional OCHA, atau pemerintah yang terdampak (melalui Misi Permanen)
TRAC 1.1.3 UNDP	7 hari	UNDP	UN RC
ERF	5 hari hingga 2 minggu	Badan-badan PBB dan LSM-LSM	HC
APDRF	4 hingga 5 hari setelah kriteria eligibilitas dipenuhi	Negara-negara berkembang anggota ADB	ADB dan pemerintah terdampak

PERANGKAT STRATEGIS DAN PENGALANGAN DANA

Flash Appeal PBB merupakan sebuah strategi respon kemanusiaan awal antar-lembaga dan perangkat mobilisasi sumber daya yang didasarkan pada penilaian cepat terhadap situasi bencana. *Flash Appeal* mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan umum para aktor kemanusiaan akan pendanaan untuk tahap paling dini dalam respon, biasanya untuk 3 - 6 bulan pertama. Dalam kasus dimana respon keadaan darurat diperlukan untuk lebih dari enam bulan atau dalam keadaan darurat yang berkepanjangan, *Flash Appeal* diperpanjang dan dialihkan menjadi CAP.

UNTUK SIAPA PENGGALANGAN DANA TERSEBUT?

Penggalangan *Flash Appeal* dapat mencakup proyek-proyek dari badan-badan PBB, organisasi-organisasi internasional lainnya, dan LSM-LSM. Ia juga dapat mencakup kemitraan-kemitraan proyek dengan Gerakan dan/atau Masyarakat Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di negara yang terdampak. Kementerian-kementerian pemerintah tidak dapat menggalang dana secara langsung melalui mekanisme *Flash Appeal* ini namun dapat diidentifikasi sebagai mitra dalam proyek-program PBB atau LSM.

PENGGALANGAN DANA DI FILIPINA

Menyusul Badai Topis Washi di Filipina pada 2011, PBB dan para mitra kemanusiaan mengeluarkan *Flash Appeal*²⁵ untuk menggalang dana sebesar US\$ 28,6 juta untuk membantu Pemerintah Filipina untuk merespon kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan yang sangat besar yang disebabkan oleh badai tersebut. Penggalangan Dana ini ditujukan untuk penyediaan air bersih untuk minum dan mandi, makanan, bantuan darurat, hunian sementara, dan barang-barang rumah tangga penting untuk 471.000 orang yang paling terdampak parah oleh badai di kota Cagayan de Oro dan Iligan untuk selama tiga bulan.²⁶

BAGAIMANA MENAKSESNYA?

Flash Appeal dilakukan oleh UN RC atau HC dengan berkonsultasi dengan HCT dan dengan bantuan tim UNDAC, jika memang ada penugasan tim ini. Di negara-negara dimana tidak ada OCHA, kantor regional terdekat dan/atau Markas Besar OCHA membantu penyusunan *Flash Appeal*.

Consolidated Appeal Process (CAP) merupakan sebuah perangkat advokasi dan pendanaan yang mempertemukan organisasi-organisasi bantuan bersama-sama untuk merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan memantau respon bencana. CAP terdiri dari sebuah rencana aksi kemanusiaan dan sebuah portofolio tentang proyek-proyek konkret yang diperlukan untuk melaksanakan rencana tersebut. CAP berfungsi sebagai sebuah kerangka acuan yang berkesinambungan dan rencana kerja terperinci untuk aksi kemanusiaan yang berskala besar dan berkelanjutan. Sebuah CAP biasanya diluncurkan ketika kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan melebihi dari waktu *Flash Appeal* (biasanya enam bulan).

UNTUK SIAPA PENGGALANGAN DANA TERSEBUT?

CAP mencakup proyek-proyek yang dilaksanakan oleh badan-badan PBB, Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, IOM, dan LSM. Pemerintah-pemerintah tidak dapat menggalang dana melalui CAP meskipun jelas mendorong kerja sama antara para penyandang dana, organisasi kemanusiaan, dan pemerintah tempatan. Seperti halnya dengan *Flash Appeal*, pemerintah dapat diidentifikasi sebagai mitra dalam pelaksanaan proyek-proyek tertentu.

²⁵ Resminya dikenal sebagai Emergency Revision of the Philippines Humanitarian Action Plan 2012

²⁶ OCHA-ROAP, Humanitarian Funding Update, Fourth Quarter, 2011.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

CAP diakses melalui HC dan HCT dan biasanya dikelola di dalam negeri melalui kantor OCHA.

INGAT

- Meskipun mekanisme-mekanisme “dana cepat” tidak secara langsung tersedia untuk negara-negara yang terdampak, pemerintah-pemerintah perlu bekerja erat dengan PBB, Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dan LSM untuk memastikan penggunaan dana bantuan darurat ini secara semestinya.
- Dana-dana cepat bilateral juga merupakan sumber pendanaan yang sangat penting yang tersedia untuk pemerintah-pemerintah yang terdampak untuk aktivitas-aktivitas penyelamatan nyawa awal. Jumlah dan perincian pendanaan dapat berbeda-beda dan umumnya dapat dirundingkan sesuai kasus per kasus oleh pemerintah yang membantu (penyandang dana) dengan pemerintah yang terdampak.

D. PENGELOLAAN INFORMASI DAN PENGKAJIAN

■ Pengelolaan informasi menyusul terjadinya suatu bencana merupakan satu bagian penting dalam respon kemanusiaan mana pun. Untuk mewujudkan pengelolaan informasi yang kuat diperlukan proses-proses yang disepakati dan personel yang terlatih untuk mengumpulkan, menganalisis dan berbagi informasi tentang situasi bencana. Penduduk yang terdampak, pemerintah yang terdampak, organisasi-organisasi kemanusiaan dan media semuanya merupakan sumber dan pengguna informasi dalam satu keadaan darurat.

Pemerintah mempunyai mekanisme-mekanisme mereka sendiri untuk berbagi dan mengelola informasi antar badan-badan dan kementerian-kementerian yang bekerja di respon keadaan darurat. Bagian ini menjelaskan bagaimana masyarakat kemanusiaan internasional mengelola informasi dalam satu keadaan darurat dengan tujuan untuk membantu pemerintah untuk dapat mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana masyarakat internasional befrungsi, dan untuk mengidentifikasi bidang-bidang kunci yang dapat menjadi kerja sama dan untuk pertukaran informasi antara pemerintah-pemerintah dan organisasi-organisasi internasional.

Layanan-layanan dan perangkat yang dijelaskan disini dikelompokkan sesuai dengan kategori berikut: (a) pengelolaan informasi keseluruhan, (b) citra satelit dan pemetaan, (c) dan perangkat pengkajian.

LAYANAN PENGELOLAAN INFORMASI

1. *Information Management Unit (IMU) OCHA dan Humanitarian Information Centre (HIC)*

PERANGKAT PELAPORAN

1. Laporan Situasi OCHA

SITUS WEB KEMANUSIAAN

1. ReliefWeb
2. HumanitarianResponse.info
3. *Financial Tracking Service* (FTS)
4. *ASEAN Disaster Information Network* (ADInet)
5. *South Asian Disaster Knowledge Network* (SADKN)
6. *Pacific Disaster Net* (PDN)

PENYEDIA LAYANAN CITRA SATELIT DAN PEMETAAN

1. UNOSAT
2. UN-SPIDER
3. Sentinel Asia
4. International Space Charter
5. MapAction
6. iMMAP

PERANGKAT PENGKAJIAN

1. *Multi-Cluster Initial Rapid Assessment* (MIRA)
2. *Post-Disaster Needs Assessment and Recovery Framework*

LAYANAN PENGELOLAAN INFORMASI

Information Management Unit (IMU) OCHA dan *Humanitarian Information Centre* (HIC). Di kebanyakan negara di mana respon-respon keadaan darurat sedang berlangsung, biasanya ada kantor OCHA tingkat negara yang juga mempunyai kapasitas khusus dalam pengelolaan informasi, khususnya dalam bentuk sebuah IMU. Kapasitas ini meliputi staf teknis yang bertindak sebagai layanan informasi untuk masyarakat kemanusiaan dengan mengembangkan dan menggalakkan standar-standar umum yang memungkinkan pertukaran data antar organisasi. Mereka mengkonsolidasikan informasi ini untuk memberikan satu gambaran umum tentang respon kemanusiaan. Mereka juga memberikan bantuan teknis untuk inisiatif-inisiatif seperti pengkajian kebutuhan, dan menerbitkan produk-produk informasi seperti daftar kontak, jadwal pertemuan dan peta. OCHA-IMU bekerja erat dengan *focal point* pengelolaan informasi di pemerintah dan di badan-badan yang mengetuai *Cluster* untuk mengumpulkan semua informasi dan memberikan satu gambaran menyeluruh tentang respon keadaan darurat. Untuk mendorong pertukaran data ini, sebuah Jejaring Pengelolaan Informasi sering kali dibentuk yang meliputi staf pengelolaan informasi dari OCHA, badan-badan pemerintah utama (organisasi penanggulangan bencana nasional, badan statistik nasional, dll.) dan badan-badan ketua *cluster*.

Dalam kasus respon bencana yang sangat besar dan kompleks, dan jika kapasitas pengelolaan informasi yang memadai tidak tersedia dalam *cluster*, kapasitas teknis dapat ditingkatkan dengan menugaskan sebuah HIC. HIC akan ditugaskan dengan sumber daya manusia tambahan, perangkat keras seperti pencetak peta skala besar, dan mengatur satu ruang fisik yang besar dimana organisasi-organisasi bantuan dapat mengelola dan berbagai informasi tentang satu keadaan darurat.

APA YANG DIMAKSUD DENGAN “PENGELOLAAN INFORMASI”?

Pengelolaan informasi kemanusiaan diartikan sebagai pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyebaran informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan koordinasi dalam sebuah keadaan darurat.

1. **PENGUMPULAN:** Pengumpulan data dapat dalam banyak bentuk, mulai dari pengkajian kebutuhan hingga penginderaan jauh untuk meninjau satu data dasar.
2. **PENGOLAHAN:** Waktu yang cukup dan staf yang terampil harus dialokasikan agar data dapat diolah. Misalnya, sebelum 200 kuesioner pengkajian dapat dianalisis dan digunakan untuk perencanaan, semuanya harus diperiksa dan dimasukkan ke dalam data dasar.
3. **ANALISIS:** Dalam sebuah keadaan darurat, analisis biasanya terbatas pada perangkuman informasi, penetapan prioritas dan pembelajaran dari sesuatu yang baru. Para pengambil keputusan memerlukan analisis yang merangkum informasi yang banyak dan menunjukkan aspek-aspek yang penting dalam situasi kemanusiaan.
4. **PENYEBARAN:** Informasi perlu disampaikan dengan jelas dan secara efektif kepada audiens yang luas dengan menggunakan media yang tepat, baik dalam sebuah surat elektronik (*email*), sebuah laporan, sebuah peta, sebuah briefing atau sebuah situs web.

Kesiapsiagaan dalam pengelolaan informasi sangat menentukan keefektifan sebuah keadaan darurat. Langkah-langkah kesiapsiagaan dapat meliputi: pengumpulan data dasar kunci, pengembangan jejaring pengelolaan informasi – termasuk badan penanggulangan bencana nasional, kantor statistik nasional, badan pemetaan nasional, OCHA dan badan-badan ketua *cluster*, memastikan pengelolaan informasi dicakup dalam rencana kontinjensi, dan mengembangkan satu metodologi pengkajian kebutuhan yang lengkap.

UNTUK SIAPA LAYANAN PENGELOLAAN INFORMASI TERSEBUT?

OCHA-IMU, serta HIC, ditujukan untuk pemerintah-pemerintah dan organisasi-organisasi kemanusiaan. Kapasitas Pengelolaan Informasi di badan-badan yang mengetuai *cluster* mendukung para anggota *cluster* dan kementerian-kementerian terkait.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

Layanan tersebut diakses dalam negeri melalui OCHA.

PERANGKAT PELAPORAN

Laporan Situasi (*Situation Report/Sitrep*) OCHA adalah sebuah dokumen yang dihasilkan oleh OCHA yang memberikan gambaran singkat tentang kebutuhan yang ada, upaya-upaya respon yang sedang dilakukan dan kesenjangan dalam satu keadaan darurat. Laporan situasi hanya dikeluarkan selama tahap akut satu keadaan darurat (yaitu pada awal krisis baru atau menyusul memburuknya satu keadaan darurat yang sedang berlangsung.) Laporan situasi tidak digunakan untuk melaporkan keadaan darurat-keadaan darurat kronis.²⁷ Kepala Kantor OCHA, setelah berkonsultasi

²⁷ Seiring dengan transisi respons dari tahap akut, OCHA akan mengubah *Sitrep* menjadi *Humanitarian Bulletin*, yang merupakan produk mingguan dan/atau bulanan yang biasanya dihasilkan oleh OCHA yang sudah ada di dalam satu negara (termasuk dalam keadaan darurat kronis).

dengan UN RC dan/atau HC, memutuskan apakah sebuah peristiwa bencana tertentu memerlukan dikeluarkannya Laporan Situasi. Produk-produk pelaporan OCHA lainnya juga dapat dihasilkan untuk mendukung pengambilan keputusan kemanusiaan. *Humanitarian Snapshot* dalam sebuah laporan situasi adalah sebuah informasi-grafis (meliputi peta satu halaman penuh, grafis-grafis dan rangkuman narasi) yang memberikan masukan visual yang tepat waktu tentang situasi yang ada. *Humanitarian Dashboard* merupakan perangkat IASC untuk membantu *cluster* dan HCT untuk memantau pelaksanaan rencana respon selama berjalannya krisis.

UNTUK SIAPA LAPORAN SITUASI TERSEBUT?

Pembaca laporan Situasi adalah para aktor kemanusiaan yang operasional yang bekerja di dalam dan di luar satu negara yang terdampak, serta para penyandang dana, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, media dan masyarakat umum.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

Laporan Situasi dapat diakses oleh umum di ReliefWeb dan www.unocha.org/roap. Para aktor yang berminat juga dapat berlangganan untuk mendapatkan Laporan Situasi yang dikeluarkan oleh OCHA di tingkat global (email ke ochareporting@un.org untuk dimasukkan dalam daftar berlangganan) dan/atau di Kawasan Asia-Pasifik (email ke ocha-roap@un.org untuk dimasukkan dalam daftar berlangganan).

SITUS WEB

ReliefWeb adalah sebuah situs web kemanusiaan yang dikelola oleh OCHA yang memberikan informasi yang tepat waktu, dapat diandalkan dan relevan dan analisis (dokumen dan peta) tentang keadaan darurat kemanusiaan dan bencana. Situs web ini berisi kumpulan informasi yang sudah dikonsolidasikan dari sumber-sumber terpercaya, termasuk organisasi-organisasi internasional dan nonpemerintah. Pemerintah, lembaga penelitian, dan media antara lain menghasilkan artikel, laporan umum, *press release*, seruan penggalangan dana, dokumen kebijakan, analisis dan peta yang berkaitan dengan keadaan darurat kemanusiaan di seluruh dunia. Untuk memastikan ReliefWeb dimutakhirkan setiap waktu, ia mempunyai kantor-kantor di tiga zona waktu: New York, Bangkok, dan Nairobi.

UNTUK SIAPA SITUS WEB TERSEBUT?

ReliefWeb dapat diakses siapa saja.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

ReliefWeb dapat diakses melalui web dan melalui RSS, email, Twitter dan Facebook

Financial Tracking Service (FTS) merupakan sebuah database global yang dikelola oleh OCHA yang mencatat sumbangan-sumbangan kemanusiaan (tunai dan nontunai) untuk keadaan darurat. FTS merupakan database yang bersifat *real time* dan dapat ditelusuri yang berisi tentang semua bantuan kemanusiaan internasional yang dilaporkan, dengan fokus khusus pada CAP. FTS hanya dapat mencatat sumbangan yang dilaporkan kepada FTS oleh para penyandang dana dan entitas-entitas penerima dana.

UNTUK SIAPA LAYANAN TERSEBUT?

FTS dapat diakses siapa saja.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

Para pemerintah penyandang dana dan yang terdampak dapat melaporkan kontribusi/sumbangan melalui fts@un.org atau melalui sebuah formulir yang tersedia di situs web FTS. Laporan-laporan sumbangan ditriangulasi dengan laporan-laporan dari badan-badan penerima untuk menunjukkan bagaimana sumbangan-sumbangan digunakan (yaitu apakah sumbangan sudah digunakan khusus untuk satu CAP, *Flash Appeal* atau penggalangan dana lain).

[HumanitarianResponse.info](http://www.humanitarianresponse.info) merupakan sebuah platform kemanusiaan berbasis web untuk mendukung koordinasi antar-*cluster* dan pengelolaan informasi, yang sejalan dengan Panduan Operasional IASC tentang Tanggung Jawab Ketua *Cluster*/Sektor dan Pengelolaan Informasi OCHA. Situs web yang utama menyediakan fitur-fitur inti untuk semua negara, namun juga memungkinkan *cluster-cluster* untuk meluncurkan situs-situs yang khusus ditujukan untuk bencana-bencana khusus dan/atau negara-negara apabila mereka mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus yang tidak dapat dipenuhi oleh situs utama. Situs ini diharapkan akan melengkapi kemampuan pengelolaan informasi pihak-pihak berwenang di tingkat nasional dan para aktor kemanusiaan dan pembangunan di dalam negeri.

UNTUK SIAPA PLATFORM TERSEBUT?

Sumber daya ini khusus dibuat untuk memenuhi kebutuhan *cluster* namun dapat diakses umum.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

Platform ini dapat diakses di www.humanitarianresponse.info

[ASEAN Disaster Info Network \(ADInet\)](http://adinet.ahacentre.org) merupakan sebuah portal web bencana dan sistem database untuk negara-negara ASEAN yang dikelola oleh AHA Centre. Jejaring ini menyediakan kumpulan informasi yang terkonsolidasi tentang bencana di subkawasan.

UNTUK SIAPA JEJARING TERSEBUT?

Jejaring ini terutama dimaksudkan untuk negara-negara anggota ASEAN namun dapat diakses umum.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

Portal ini dapat diakses di <http://adinet.ahacentre.org>

[South Asian Disaster Knowledge Network \(SADKN\)](http://sadkn.org) adalah sebuah portal web untuk pertukaran pengetahuan dan informasi tentang pengelolaan risiko bencana di Asia Selatan. SADKN merupakan sebuah jejaring dari jejaring-jejaring, dengan satu portal regional dan delapan portal nasional, yang melibatkan semua pemangku kepentingan dari negara-negara anggota SAAR.

UNTUK SIAPA JEJARING TERSEBUT?

Jejaring ini untuk negara-negara anggota SAARC namun dapat diakses umum.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

Jejaring ini dapat diakses melalui situs web SDMC SAARC di <http://www.saarc-sadkn.org/about.aspx>

Pacific Disaster Net (PDN) merupakan sebuah portal web tentang bencana dan sistem database untuk negara-negara Kepulauan Pasifik yang menyediakan informasi tentang tata kelola pemerintahan, pengkajian risiko, peringatan dini dan pemantauan, pengelolaan risiko bencana dan pelatihan.

UNTUK SIAPA JEJARING TERSEBUT?

Jejaring ini untuk negara-negara Kepulauan Pasifik namun dapat diakses umum.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

Jejaring ini diakses melalui SPC di info@sopac.org

CITRA SATELIT DAN PEMETAAN

Citra satelit dapat menjadi perangkat yang kuat untuk menganalisis dampak-dampak sebuah bencana dengan cepat di sebuah wilayah yang luas. Pemetaan merupakan sarana yang efektif untuk menganalisis dan berbagi informasi tentang dampak-dampak sebuah keadaan darurat. Banyak organisasi, termasuk OCHA, mempunyai kapasitas untuk memetakan data dan menggunakan citra satelit. Perangkat dan layanan berikut tersedia untuk pemerintah-pemerintah.

Layanan citra satelit dan pemetaan di Asia dan Pasifik			
Nama	Penyelenggara	Tujuan Utama	Akses melalui
UNITAR's Operational Satellite Applications Programme (UNOSAT)	PBB	Menyediakan analisis kecitraan dan solusi satelit untuk PBB dan organisasi-organisasi kemanusiaan non-PBB	www.unitar.org/unosat
UN Platform for Space-based Information for Disaster Management & Emergency Response (UN-SPIDER)	PBB	Menghubungkan masyarakat penanggulangan bencana dengan masyarakat keruangan; membantu Pemerintah dalam menggunakan informasi berbasis keruangan untuk kesiapsiagaan bencana	www.un-spider.org
Sentinel Asia	Asia-Pacific Regional Space Agency Forum (APRSF)	Membantu aktivitas-aktivitas penanggulangan bencana dengan menerapkan teknologi GIS & informasi berbasis keruangan	www.aprsaf.org
International Charter for Space and Major Disasters)	Konsorsium badan-badan keruangan nasional	Menyediakan satu sistem yang seragam dalam perolehan data keruangan dan penyampaian data kepada penduduk yang terdampak bencana-bencana alam atau dipicu manusia melalui pengguna yang berwenang	www.disasterscharter.org/web/charter/activate

Layanan citra satelit dan pemetaan di Asia dan Pasifik			
Nama	Penyelenggara	Tujuan Utama	Akses melalui
MapAction	MapAction	Menyampaikan informasi dalam bentuk peta untuk membantu pengambilan keputusan & penyampaian bantuan	www.mapaction.org
iMMAP	iMMAP	Menyediakan layanan untuk membantu pengambilan keputusan untuk aktor-aktor nasional & internasional melalui pemetaan & perangkat khusus untuk kesadaran tentang bencana yang disebut Kerangka kerja Common Operating Picture (COP)	http://immap.org

PERANGKAT PENGAJIAN

Multi-Cluster Initial Rapid Assessment (MIRA) adalah sebuah metodologi pengkajian multi-sektor yang dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan kemanusiaan kunci selama dua minggu pertama menyusul satu bencana yang terjadi tiba-tiba. Metodologi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang paling mendasar tentang kebutuhan penduduk yang terdampak dan prioritas-prioritas untuk bantuan internasional. Pendekatan MIRA menghasilkan satu definisi skenario awal dalam 72 jam pertama menyusul terjadinya satu bencana dan satu laporan final dalam dua minggu. MIRA diarahkan oleh Panduan IASC tentang Pengkajian Terkoordinasi dalam Krisis Kemanusiaan (*IASC Operational Guidance on Coordinated Assessments in Humanitarian Crises*) yang yang dihasilkan pada 2011.

UNTUK SIAPA PENDEKATAN TERSEBUT?

MIRA terutama untuk digunakan HCT dalam membantu Pemerintah yang terdampak.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

Informasi tentang MIRA tersedia di dalam negeri melalui OCHA, UN HC atau RC.

Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) dan Recovery Framework (RF) merupakan prakarsa yang dilaksanakan pemerintah dengan bantuan terpadu dari PBB, European Commission, World Bank dan aktor-aktor nasional dan internasional lainnya. Keduanya digabungkan menjadi satu informasi laporan tunggal yang terkonsolidasi tentang dampak-dampak fisik sebuah bencana, nilai ekonomi kerusakan dan kerugian, dampak-dampak pada sumber daya manusia seperti yang dialami oleh penduduk yang terdampak, dan kebutuhan-kebutuhan dan prioritas-prioritas pemulihan dini dan jangka panjang yang muncul.

Kerangka Kerja Pemulihan merupakan sebuah keluaran utama sebuah PDNA. Kerangka kerja ini memberikan landasan untuk menetapkan prioritas, merancang dan melaksanakan serangkaian program pemulihan yang koheren. Ada berbagai tahapan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan sebuah PDNA, termasuk satu misi perencanaan, satu pertemuan orientasi dengan semua pemangku kepentingan, pelatihan/orientasi sektoral selain pelaksanaan pengkajian itu sendiri.

PDNA lebih berfungsi melengkapi daripada mengulangi pengkajian cepat awal yang dilakukan oleh aktor-aktor kemanusiaan. PDNA ini menganalisis pengkajian-pengkajian untuk menghasilkan data yang berkenaan dengan pemulihan.

UNTUK SIAPA PENGKAJIAN DAN KERANGKA KERJA TERSEBUT?

Keduanya untuk pemerintah-pemerintah yang terdampak.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

Informasi tentang PDNA-RF dapat diakses melalui *Global Facility for Disaster Risk Reduction* (GFDRR) dari World Bank.

INGAT

Selain pengkajian-pengkajian multisektor yang dijelaskan disini, ada banyak metodologi dan perangkat pengkajian yang sesuai *cluster* dan bersifat tematis yang dapat digunakan dalam sebuah keadaan darurat. Salah satu contohnya adalah *Flash Environment Assessment Tool* (FEAT) yang digunakan untuk mengidentifikasi isu-isu lingkungan yang akut segera setelah terjadinya satu bencana.

IV.

PERANGKAT DAN LAYANAN UNTUK KESIAPSIAGAAN RESPON BENCANA

Dengan adanya pemahaman yang jelas tentang perangkat dan layanan-layanan internasional utama yang tersedia dalam respon bencana, saat ini dimungkinkan untuk meninjau beragam layanan kesiapsiagaan respon bencana internasional yang tersedia untuk membantu pemerintah-pemerintah dalam menyusun perencanaan dan membangun kapasitas teknis mereka.

Perangkat tersebut tersedia melengkapi semakin banyaknya perangkat kesiapsiagaan respon nasional yang telah dikembangkan oleh pemerintah-pemerintah di kawasan untuk mendukung pemerintah-pemerintah setempat dan masyarakat sipil di teritori yang menjadi kedaulatan mereka. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya dalam panduan ini, contoh-contoh yang diberikan disini terbatas pada perangkat dan layanan kesiapsiagaan respon dan tidak mencakup upaya-upaya pengurangan risiko bencana yang lebih luas yang dimaksudkan oleh Kesepakatan Kerangka Kerja Hyogo atau rubrik kesiapsiagaan yang umum.

Bagian ini mencakup perangkat dan layanan di empat bidang kesiapsiagaan respon bencana:

- A. PELATIHAN TEKNIS
- B. PERENCANAAN KESIAPAN
- C. LATIHAN SIMULASI
- D. SISTEM PERINGATAN DINI



BAGAIMANA MEMBACA BAGIAN INI

Diberikan penjelasan singkat untuk setiap perangkat dan layanan, yang diikuti dengan dua pertanyaan yang ditekankan dalam warna hijau: Untuk siapa perangkat dan layanan tersebut? Bagaimana mengaksesnya?

UNTUK SIAPA PERANGKAT DAN LAYANAN TERSEBUT?

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

A.

PELATIHAN TEKNIS

Ada sembilan peluang pelatihan teknis yang dimasukkan dalam bagian ini.²⁸ Kesemuanya dikelompokkan sebagai berikut: (a) pelatihan teknis internasional, dan (b) pelatihan teknis bilateral

PELATIHAN TEKNIS INTERNASIONAL

1. Pelatihan UNDAC
2. Kursus pembekalan ERAT
3. Pelatihan INSARAG

²⁸ Pelatihan-pelatihan lain di seluruh dunia secara rutin dimuat di dalam ReliefWeb. Untuk informasi lebih lanjut, lihat <http://reliefweb.int/training%20>

4. Pelatihan koordinasi UN-CMCoord
5. Pelatihan EEC
6. Pelatihan eCentre UNHCR
7. Pelatihan teknis RedR
8. PEER

PELATIHAN TEKNIS BILATERAL

1. Bantuan dan pelatihan teknis *Incident Command System AS*

PELATIHAN TEKNIS INTERNASIONAL

Pelatihan UNDAC diberikan melalui dua kursus: Kursus Pembekalan UNDAC dan Kursus Penyegaran UNDAC. Kursus Pembekalan merupakan pelatihan dua minggu yang memberikan para peserta pengetahuan tentang aktivitas-aktivitas kunci UNDAC: pengkajian, koordinasi dan pengelolaan informasi. Kursus Penyegaran merupakan kursus pelatihan empat hingga lima hari yang harus diikuti oleh para anggota UNDAC setiap dua tahun untuk mempertahankan tingkat ketrampilan mereka. Setahun sekali, sebuah kursus UNDAC khusus tentang keadaan darurat lingkungan juga ditawarkan.

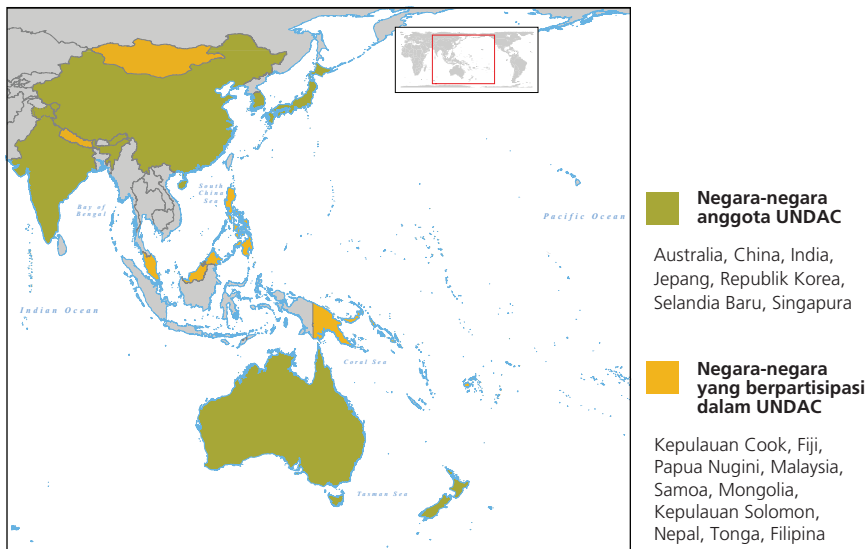
UNTUK SIAPA PELATIHAN TERSEBUT?

Pelatihan UNDAC tersedia untuk para wakil anggota UNDAC dan negara-negara yang bergabung dalam UNDAC. Para wakil biasanya berasal dari entitas-entitas Pemerintah, OCHA dan badan-badan PBB namun juga dapat berasal dari LSM. Begitu kursus selesai dilakukan, para peserta berhak untuk menandatangani kontrak dan masuk dalam jadwal respon keadaan darurat UNDAC. Para peserta UNDAC diharapkan dapat bertugas paling tidak dua hingga tiga kali setahun dalam misi-misi keadaan darurat.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

Pelatihan UNDAC dapat diakses melalui *Field Coordination Support Services* (OCHA-FCSS) di OCHA-fcss@un.org atau melalui kantor OCHA-ROAP di ocha-roap@un.org.

Peta Negara-Negara Anggota dan yang Berpartisipasi dalam UNDAC di Asia dan Pasifik



Kursus Pembekalan ERAT ASEAN melatih para manajer bencana dari Negara-negara Anggota ASEAN tentang bagaimana membantu pemerintah-pemerintah yang terdampak dan AHA Centre dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan regional dan/atau internasional dalam koordinasi, dan untuk informasi dini yang berkualitas pada tahap awal suatu keadaan darurat yang terjadi tiba-tiba. Pelatihan-pelatihan ERAT dilakukan selama empat atau lima hari dan fokus pada pengkajian, koordinasi, pengelolaan informasi dan penggunaan perlengkapan di dalam kerangka kerja operasional AADMER. Kursus-kursus awal juga telah mencakup metodologi UNDAC dengan bantuan OCHA.

UNTUK SIAPA KURSUS TERSEBUT?

Kursus-kursus pembekalan ERAT tersedia untuk para tenaga ahli bidang bencana dari Negara-negara ASEAN. Para tenaga ahli ERAT terdiri dari para wakil dari badan-badan penanggulangan bencana nasional, kementerian-kementerian kesehatan, dan layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

Para peserta dinominasikan oleh *focal point* ASEAN di tingkat nasional. Informasi lebih lanjut tersedia dari AHA Centre ASEAN di info@ahacentre.org.

Pelatihan tentang Panduan dan Metodologi INSARAG memberikan keahlian dalam respon USAR Internasional sesuai dengan tahapan berikut: kesiapsiagaan, mobilisasi, operasi, demobilisasi, dan pasca-misi. Pelatihan INSARAG dirancang untuk membagikan prosedur-prosedur dan sistem-sistem yang diterima di tingkat internasional untuk mempertahankan kerja sama antar tim-tim USAR dalam keadaan darurat.

Selain keterlibatan dalam Panduan INSARAG, Negara-negara Anggota INSARAG yang mempunyai tim-tim USAR yang ditugaskan di tingkat internasional didorong untuk mengajukan permohonan untuk masuk dalam klasifikasi IEC. IEC merupakan sebuah proses tinjauan ahli yang independen terhadap tim-tim USAR internasional yang digunakan oleh INSARAG sejak 2005.²⁹ IEC mengklasifikasikan tim-tim sebagai “Menengah” dan “Berat” untuk memastikan hanya sumber daya USAR yang berkualitas dan tepat yang ditugaskan dalam sebuah keadaan darurat.³⁰

Seperti apakah emblem klasifikasi IEC dari INSARAG?



²⁹ Perlu dicatat bahwa Klasifikasi IEC merupakan proses bertahun-tahun dan untuk mendapatkan sertifikasi IEC perlu masuk daftar tunggu. Tim-tim IEC diharapkan untuk diklasifikasi ulang setiap lima tahun sekali.

³⁰ Tim USAR “Ringan” juga sangat penting karena kecepatan dan kesigapan mereka dalam menjangkau masyarakat-masyarakat yang terdampak bencana, namun mereka khususnya dirancang untuk ditugaskan di tingkat nasional

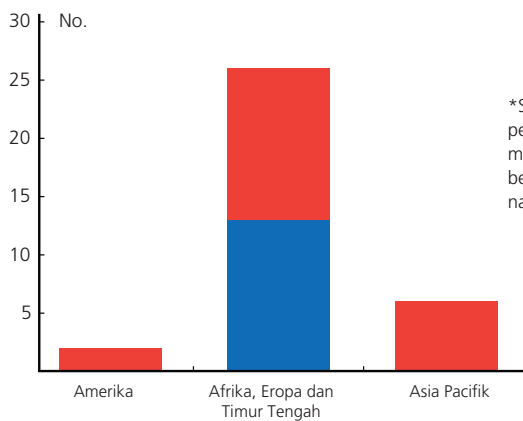
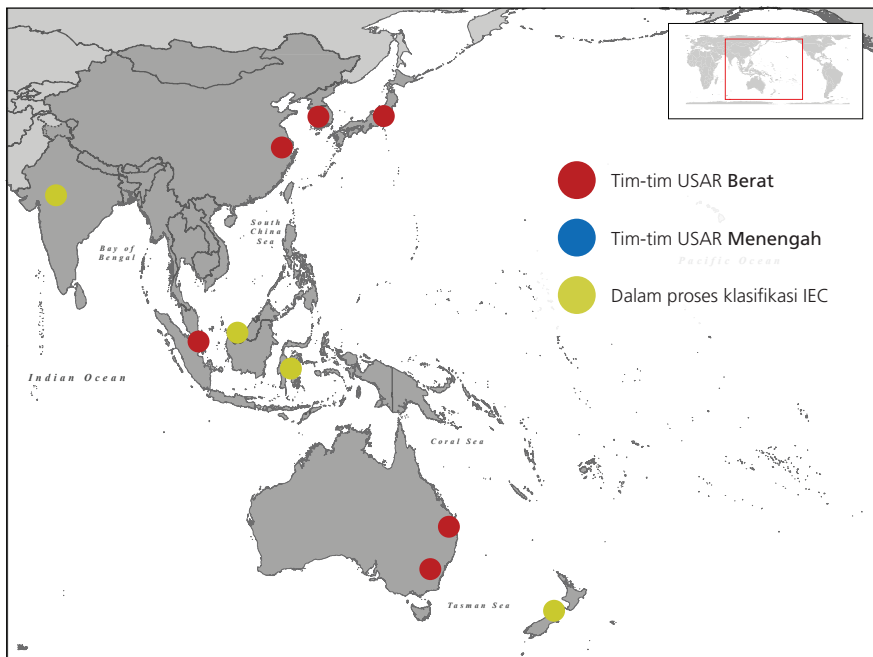
UNTUK SIAPA PELATIHAN TERSEBUT?

Pelatihan INSARAG tersedia untuk pemerintah atau organisasi yang terlibat dalam USAR.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

Negara-negara yang tertarik untuk bergabung dengan jejaring INSARAG dapat menghubungi sekretariat INSARAG di Jenewa di insarag@un.org OCHA-ROAP juga menjadi penghubung antara negara-negara di Asia dan Pasifik dan INSARAG, dan dapat dihubungi di OCHA-roap@un.org.

Negara-negara di Asia dan Pasifik yang mempunyai tim-tim USAR yang masuk klasifikasi IEC.



*Selain tim-tim USAR yang ditunjukkan dalam peta, Malaysia dan Filipina masing-masing mempunyai satu tim USAR nasional yang belum mendapatkan klasifikasi IEC atau nasional.

Pelatihan UN-CMCoord disediakan oleh OCHA melalui Bagian Koordinasi Sipil-Militer (*Civil-Military Coordination Section/CMCS*) yang berbasis di Markas Besar serta OCHA-ROAP. Para aktor nasional dan internasional dilatih dalam konsep dan prinsip-prinsip koordinasi kemanusiaan sipil militer serta penerapan praktisnya dalam keadaan darurat. Berbagai kursus yang ditawarkan adalah Kursus Pengenalan, Kursus Rutin, Kursus Lapangan dan kursus Pelatihan untuk Pelatih.

UNTUK SIAPA PELATIHAN TERSEBUT?

Pelatihan UN-CMCoord ditujukan untuk staf organisasi Pemerintah, badan-badan bantuan, unit-unit perlindungan sipil, organisasi-organisasi militer dan pertahanan sipil

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

Jadwal pelatihan dan formulir-formulir pelatihan dapat diunduh di <http://www.unocha.org/what-we-do/coordination-tools/UN-CMCoord/training-partnerships>. Informasi tambahan juga dapat diperoleh di OCHA di Jenewa di +41 22 917 34 84 atau melalui OCHA-ROAP di ocha-roap@un.org.

Pelatihan *Environmental Emergencies Centre (EEC)* memberikan gambaran tentang proses respon keadaan darurat lingkungan dan memperkenalkan perangkat untuk mengkaji risiko-risiko lingkungan, perencanaan kontinjensi dan persiapan keadaan darurat di tingkat lokal. Dengan dikelola oleh *Joint UNEP/OCHA Environment Unit*, EEC melaksanakan pembelajaran lingkungan melalui perangkat daring yang tersedia gratis, pelatihan-pelatihan dan lokakarya-lokakarya dalam kelas. Topik-topik mencakup pengelolaan limbah bencana, pengkajian lingkungan cepat dan perencanaan kontinjensi keadaan darurat lingkungan.

UNTUK SIAPA PELATIHAN TERSEBUT?

Pelatihan pengenalan dan tingkat lanjut EEC ditujukan untuk staf pemerintah-pemerintah, organisasi-organisasi PBB dan entitas-entitas sektor publik.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

EEC memberikan platform pembelajaran gratis di <http://www.eecentre.org/>. Pusat ini juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dan lokakarya-lokakarya dalam kelas. Pertanyaan dapat diajukan ke ochaunep@un.org atau melalui OCHA-ROAP di ocha-roap@un.org.

RedR mempunyai berbagai peluang pembelajaran teknis dalam respon keadaan darurat. Berbagai kursus ditawarkan melalui organisasi-organisasi anggota RedR di Asia dan Pasifik, antara lain rangkaian kursus dasar, rangkaian kursus operasional dan rangkaian kursus sektor teknis.

UNTUK SIAPA PELATIHAN TERSEBUT?

Pelatihan RedR terutama ditujukan untuk para staf LSM, namun juga dapat termasuk untuk para wakil badan-badan Pemerintah, intitusi-institusi regional dan organisasi-organisasi internasional.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang pelatihan RedR, lebih baik menghubungi organisasi anggota RedR daripada sekretariat RedR. Organisasi-organisasi anggota RedR di Asia dan Pasifik adalah RedR Australia, RedR India, RedR Sri Lanka, RedR Malaysia, dan RedR Selandia Baru. Aplikasi dapat diunduh dari situs organisasi anggota tersebut.

Pelatihan Pusat Regional untuk Kesiapsiagaan Keadaan Darurat UNHCR (eCentre)

menyediakan informasi teknis mendalam tentang isu-isu keadaan darurat per sektor tertentu, dengan fokus pada migrasi paksa dan perlindungan. Pusat pelatihan eCentre yang berbasis di Tokyo menjalankan sekitar 10 hingga 12 pelatihan per tahun yang mencakup topik-topik termasuk perencanaan kontinjensi, pengelolaan perbatasan dalam keadaan darurat kemanusiaan, keselamatan di lapangan, pengelolaan media, dan koordinasi kemanusiaan.

UNTUK SIAPA PELATIHAN TERSEBUT?

Pelatihan eCentre terutama ditujukan untuk para staf LSM, namun juga dapat untuk para wakil dari badan-badan pemerintah, institusi-institusi regional dan organisasi-organisasi internasional.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

Cara mengajukan permohonan untuk mengikuti pelatihan dapat diunduh dari situs web eCentre yaitu <http://www.the-ecentre.net/>.

Program Peningkatan Respon Keadaan Darurat (*Programme for Enhancement of Emergency Response/PEER*)

merupakan sebuah program pelatihan regional yang dijalankan oleh *Asian Disaster Preparedness Centre* (ADPC) untuk meningkatkan kapasitas para aktor nasional untuk mengelola dan bersiaga terhadap bencana. Kursus-kursus dan kurikulum yang dikembangkan di bawah keseluruhan rubrik PEER antara lain Kesiapsiagaan Rumah Sakit untuk Keadaan darurat dan *Community Action for Disaster Response* (CADRE). PEER juga melaksanakan pelatihan-pelatihan dan simulasi-simulasi CADRE dengan bekerja sama dengan Masyarakat Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dan para mitra lainnya untuk mengembangkan ketrampilan para pelaku respon bencana di tingkat masyarakat.

UNTUK SIAPA PELATIHAN TERSEBUT?

PEER ditujukan untuk LSM-LSM nasional dan Pemerintah-Pemerintah. PEER beroperasi di 10 negara Asia Pasifik: Bangladesh, Kamboja, India, Indonesia, RDR Laos, Nepal, Pakistan, Filipina, Thailand dan Vietnam.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

Informasi tentang pelatihan PEER dapat diakses dari ADPC di peer@adpc.net. Permohonan untuk mengikuti pelatihan PEER dan pelatihan-pelatihan ADPC lainnya dapat diunduh dari situs web ADPC yaitu <http://www.adpc.net/>.

PELATIHAN TEKNIS BILATERAL

Bantuan Teknis dan Pelatihan *Incident Command System* (ICS) ditawarkan melalui USAID dan *Forest Service International Program* AS untuk membantu Pemerintah memasukkan ICS ke dalam sistem-sistem respon keadaan darurat nasional mereka. Fokus utamanya adalah ICS, yang merupakan sebuah sistem yang memungkinkan integrasi fasilitas, perlengkapan, personel, prosedur, dan komunikasi yang beroperasi dalam satu struktur kelembagaan yang sama dalam satu keadaan darurat.

Forest Service AS juga menyediakan pelatihan dan bantuan teknis dalam komponen-komponen sistem pengelolaan insiden lainnya, termasuk manajemen *Emergency Operation Centre* (EOC), sistem-sistem *Multi-Agency Coordination* (MAC) dan Perancangan/Pelaksanaan/Evaluasi. Program-program bantuan teknis *Forest Service* AS biasanya meliputi satu skema pelatihan untuk pelatih, uji coba dan pelaksanaan, dan satu proses untuk mengubah sistem sesuai kebutuhan dan melembagakannya.

UNTUK SIAPA PELATIHAN TERSEBUT?

ICS, EOC, MAC dan pelatihan yang berkaitan dengan pelaksanaan langsung dan bantuan teknis ditujukan untuk pemerintah-pemerintah nasional dan organisasi-organisasi/badan-badan mitra respon.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang pelatihan ICS melalui USAID dan *Forest Service International Program* AS, hubungi USAID/Kantor Regional OFDA untuk Asia Pasifik di +66 2 257 3271, atau Kevin Misenheimer di *Forest Service International Program* AS di kmisenheimer@fs.fed.us.

INGAT

- Selain pelatihan-pelatihan teknis yang dijelaskan disini, organisasi-organisasi antar-pemerintah regional, seperti ASEAN, SAARC, dan SPC, menawarkan peluang-peluang pelatihan rutin untuk para wakil dari negara-negara anggota. Silakan merujuk ke situs web mereka untuk mengetahui tentang daftar pelatihan tersebut.
- Pelatihan-pelatihan sesuai sektor juga tersedia melalui cluster-cluster global, badan-badan PBB, LSM-LSM dan institusi-institusi pembelajaran regional. Salah satu contoh adalah Program Kepemimpinan Kemanusiaan yang disediakan oleh Save the Children Australia dan Universitas Deakin.
- Biaya-biaya pelatihan biasanya merupakan tanggung jawab peserta. Meskipun demikian, para pelamar biasanya dapat menanyakan tentang bantuan keuangan yang mungkin tersedia.

B. PERENCANAAN KESIAPAN

Istilah “perencanaan kesiapan” mengacu pada kebijakan dan kesiapan legal, perencanaan kontinjensi, pembentukan sistem-sistem komando insiden nasional dan proses-proses lain yang memperjelas peran antar para aktor kemanusiaan. Lima perangkat dan layanan kesiapan dicakup dalam bagian ini.

KESIAPSIAGAAN SECARA HUKUM

1. Kesiapsiagaan bencana secara hukum sejalan dengan Pedoman IDRL
2. *UN Model Customs Facilitation Agreement*

PAKET DAN MISI TERPADU KESIAPSIAGAAN

1. *Minimum Preparedness Package* (MPP)
2. Misi-misi kesiapsiagaan respon bencana UNDAC

BANTUAN UNTUK SISTEM-SISTEM PENGELOLAAN INSIDEN NASIONAL

1. Pengembangan *National Incident Management Systems* (NIMS)

KESIAPSIAGAAN SECARA HUKUM

Kesiapsiagaan terhadap bencana secara hukum yang sejalan dengan Pedoman IDRL (*IDRL Guidelines*) mencakup inisiasi, fasilitasi, transit dan peraturan tentang bantuan bencana internasional dan bantuan pemulihan awal. Perencanaan kesiapsiagaan dapat meliputi tinjauan dan penyusunan undang-undang penanggulangan bencana, undang-undang imigrasi, undang-undang kepabeanaan, prosedur karantina, dan proses-proses pertanggungjawaban sipil dan kriminal. Tinjauan tentang peraturan perundangan nasional tentang penanggulangan bencana yang dibantu oleh IFRC biasanya memakan waktu antara enam hingga delapan bulan. Meskipun demikian, penyusunan undang-undang baru merupakan proses jangka panjang dan undang-undang tersebut harus tunduk pada proses-proses peninjauan dan penerapan sistem hukum satu negara tertentu.

Satu model peraturan perundangan yang dikembangkan oleh IFRC untuk membantu kesiapsiagaan secara hukum terhadap bencana oleh pemerintah-pemerintah nasional adalah *Model Aturan untuk Fasilitasi dan Peraturan tentang Bantuan Bencana Internasional dan Bantuan Pemulihan Awal* (*Model Act for the Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery Assistance*). Model ini menjadi perangkat rujukan dan contoh bagi para pembuat undang-undang tentang bagaimana menyusun peraturan yang sesuai dengan situasi nasional, dengan tetap mempertimbangkan berbagai sistem respon bencana yang berbeda secara hukum antar negara.

Pelaksanaan Pedoman IDRL dan Model Aturan dirancang untuk secara signifikan meningkatkan respon yang tepat waktu selama bencana atau keadaan darurat yang terjadi tiba-tiba.

UNTUK SIAPA KESIAPSIAGAAN TERSEBUT?

Kesiapsiagaan secara hukum yang sejalan dengan Pedoman IDRL, dan Model Aturan, ditujukan untuk pemerintah-pemerintah.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

Proses kesiapsiagaan hukum biasanya diawali oleh Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Nasional dengan bekerja sama dengan pemerintah nasional dan dengan didukung oleh IFRC. Model Aturan dapat dilihat di www.ifrc.org dan juga tersedia melalui Masyarakat Nasional atau IFRC.

IDRL BERAKSI: KASUS INDONESIA, KAMBOJA DAN KEPULAUAN COOK

Antara 2004 dan 2006, IRC dan Palang Merah Indonesia melakukan serangkaian kajian dengan berkolaborasi dengan Pemerintah **Indonesia** untuk mengidentifikasi isu-isu hukum yang telah berpengaruh pada operasi-operasi bantuan darurat internasional di negara tersebut. Menyusul konsultasi-konsultasi yang intensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Pemerintah mengesahkan satu undang-undang tentang penanggulangan bencana pada 2007. Pada 2008, Presiden mengesahkan Peraturan Pemerintah No 23 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, yang banyak dipengaruhi oleh Pedoman IDRL. Pada Desember 2010, pedoman yang lebih terperinci dan spesifik disahkan tentang “Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Pada Saat Tanggap Darurat”.

Pada 2008, IFRC memulai bantuan kepada pemerintah **Kamboja** dan Masyarakat Palang Merah Kamboja dalam melaksanakan proyek bantuan teknis IDRL untuk menganalisis kerangka kerja hukum nasional untuk bantuan internasional. Menyusul tinjauan ini, Kamboja menyusun rancangan undang-undang yang baru tentang penanggulangan bencana. Jika disahkan dalam bentuknya saat ini oleh parlemen saat ini, rancangan tersebut akan menjadi undang-undang yang paling komprehensif di kawasan Asia dan Pasifik, dengan satu bab penuh khusus untuk bantuan internasional.

Pedoman IDRL juga mempunyai dampak yang penting di Pasifik. Menyusul diselesaikannya kajian IDRL di **Kepulauan Cook**, Perdana Menteri Kepulauan Cook mengangkat pentingnya Pedoman IDRL kepada para pemimpin Negara-negara Kepulauan Pasifik selama Forum Kepulauan Pasifik yang ke-43 pada Agustus 2012. *Forum Komunike* mendorong Negara-negara Kepulauan Pasifik untuk menggunakan Pedoman IDRL untuk memperkuat kebijakan nasional dan kerangka kerja kelembagaan dan hukum mereka dengan bekerja sama dengan Masyarakat-masyarakat Palang Merah Nasional mereka, IFRC, PBB dan para mitra yang relevan lainnya.

Indonesia, Selandia Baru dan Filipina telah mengesahkan undang-undang, peraturan, dan prosedur baru di tingkat nasional yang berisi pasal-pasal yang terinspirasi oleh atau sejalan dengan Pedoman IDRL. Proses-proses tinjauan hukum dan/atau telaah IDRL yang dilakukan oleh IFRC dan masyarakat-masyarakat nasional telah selesai dilakukan atau sedang berlangsung di Afghanistan, Kamboja, Kepulauan Cook, Laos, Nepal, Pakistan, Filipina, Vanuatu, dan Vietnam. Untuk mendapatkan informasi yang terperinci tentang kemajuan proyek-proyek bantuan teknis IDRL di Asia dan Pasifik, lihat <http://www.ifrc.org/en/what-we-do/idrl/idrl-around-the-world/>.

UN Model Customs Facilitation Agreement merupakan sebuah perangkat yang tersedia untuk negara-negara untuk mempercepat impor, ekspor dan transit barang-barang bantuan dan barang-barang milik personel bantuan dalam sebuah bencana. Kesepakatan ini berisi ketentuan-ketentuan tentang dokumentasi dan prosedur pemeriksaan yang disederhanakan; penghapusan pajak sementara atau permanen; pengenaan pajak untuk impor barang-barang bantuan dan perlengkapan personel bantuan, badan-badan PBB dan LSM-LSM yang terakreditasi; dan pengaturan bea cukai di luar jam kerja dan lokasi resmi.

UNTUK SIAPA KESEPAKATAN TERSEBUT?

UN Model Customs Facilitation Agreement ini ditandatangani antara sebuah pemerintah dan PBB. Negara-negara di Asia dan Pasifik yang telah menandatangani kesepakatan ini adalah Nepal, Bhutan dan Thailand.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

Informasi tentang prosedur-prosedur untuk menandatangani kesepakatan tersebut dapat diakses melalui UN RC atau HC, atau melalui OCHA-ROAP di OCHA-roap@un.org.

PAKET DAN MISI TERPADU KESIAPSIAGAAN

Minimum Preparedness Package (MPP) merupakan sebuah rangkaian layanan bantuan terpadu yang dikelola oleh OCHA dan dirancang untuk membantu pemerintah-pemerintah, RC/HC dan HCT di tingkat negara untuk meningkatkan kesiapsiagaan respon. MPP berupaya untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam kesiapsiagaan dan oleh karena itu memberikan pelatihan khusus sesuai sasaran untuk mewujudkan kesiapan mendasar dalam melakukan respon yang terkoordinasi untuk membantu pemerintah. Latihan-latihan simulasi digunakan untuk menentukan keseluruhan dampak intervensi. MPP fokus pada enam bidang yang dipandang penting untuk mewujudkan respon yang efektif dan terkoordinasi: [1] peran dan tanggung jawab dasar, [2] penyelenggaraan koordinasi, termasuk dengan pemerintah, [3] pengkajian kebutuhan, [4] pengaturan mobilisasi sumber daya, [5] komunikasi dan pelaporan, [6] pengelolaan informasi.

UNTUK SIAPA PAKET TERSEBUT?

MPP ditujukan untuk RC/HC, HCT dan pemerintah-pemerintah di tingkat negara. Di Asia dan Pasifik, MPP telah diujicobakan di Papua Nugini, RDR Laos dan RDR Korea. Aktivitas-aktivitas MPP sedang dalam persiapan di Kamboja, Mongolia dan Myanmar.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

UN RC/HC dan Pemerintah dapat meminta OCHA-ROAP untuk melaksanakan MPP. Badan-badan penanggulangan bencana nasional dan kementerian-kementerian terkait merupakan satu bagian yang penting dalam aktivitas-aktivitas dalam negeri. Informasi lebih lanjut juga tersedia di ocha-roap@un.org.

Misi-misi kesiapsiagaan respon bencana UNDAC membantu evaluasi dan memperkuat kesiapsiagaan respon nasional, termasuk kebijakan-kebijakan dan peraturan. Tim-tim kesiapsiagaan respon UNDAC terdiri dari lima hingga 10 anggota UNDAC yang terlatih dan termasuk para ahli dari organisasi-organisasi kemanusiaan PBB, Negara-negara Anggota PBB, negara-negara donor, Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dan LSM-LSM kemanusiaan. Misi-misi tersebut biasanya dilaksanakan selama dua minggu dan tim UNDAC melakukan tinjauan berkala tentang kemajuan pelaksanaan rekomendasi yang telah disepakati dengan pemerintah-pemerintah nasional.

Misi-Misi Kesiapsiagaan Respon Bencana UNDAC di Asia dan Pasifik			
Negara	Tahun	Negara/organisasi yang berpartisipasi	Ukuran tim
Sri Lanka	2011	OCHA, UNISDR, IFRC, World Bank, UNDP, Australia, Fiji, India, Italia, Malaysia, Filipina, Sri Lanka, Swedia, IHP (Norwegia)	14
Papua Nugini	2009	OCHA, IFRC, UNEP, Australia, Fiji, Jepang, Selandia Baru, Filipina, Tonga	9
Kamboja	2009	OCHA, IFRC, UNEP, Australia, Perancis, Singapura, Swiss, UNEP, IFRC	11
Bhutan	2008	OCHA, IFRC, ECHO India, Filipina, Inggris	9
Laos	2007	OCHA, IFRC, Australia, Estonia, Korea, Filipina, Swedia, Inggris	11
Filipina	2005	OCHA, IFRC Australia, China, Malaysia, Filipina, Inggris	9
Mongolia	2004	OCHA, Jepang, Belanda, Filipina, Swedia, Swiss, Inggris	8

UNTUK SIAPA MISI TERSEBUT?

Misi-misi kesiapsiagaan respon bencana UNDAC dilakukan atas permintaan dari Pemerintah dan/atau HCT.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

Pemerintah-pemerintah nasional, khususnya pemerintah dimana ada focal point UNDAC di tingkat nasional, dapat menghubungi UN RC atau HC karena mereka mempunyai panduan keseluruhan untuk misi-misi kesiapsiagaan respon bencana UNDAC. Informasi juga tersedia dari OCHA-ROAP di ocha-roap@un.org.

DUKUNGAN UNTUK SISTEM PENGELOLAAN INSIDEN NASIONAL

Pengembangan National Incident Management Systems (NIMS) dilakukan oleh USAID dan AS dengan bekerja sama dengan badan-badan Pemerintah AS lainnya. NIMS mempunyai lima komponen utama: Kesiapsiagaan, Komunikasi dan Pengelolaan Informasi, Pengelolaan Sumber Daya, Komando dan Pengelolaan (termasuk ICS), dan Perawatan dan Pengelolaan. Sebuah sistem pengelolaan insiden nasional memberikan pendekatan nasional yang konsisten untuk pengelolaan insiden yang memungkinkan para pejabat pemerintah di semua tataran dan para mitra mereka untuk bekerja bersama sebelum, selama dan setelah insiden.

UNTUK SIAPA SISTEM TERSEBUT?

Bantuan teknis NIMS ditujukan untuk pemerintah-pemerintah nasional.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

NIMS diakses melalui Kantor Regional USAID/OFDA untuk Asia Pasifik di +66 2 257 3271 atau dengan menghubungi Kevin Misenheimer di AS di *Forest Service International Program*, kmisenheimer@fs.fed.us.

INGAT

Bantuan teknis untuk perencanaan kesiapsiagaan dapat diminta sesuai yang ditawarkan. Kerangka acuan untuk bantuan teknis juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan layanan khusus dan upaya-upaya pengembangan kapasitas pemerintah-pemerintah nasional.

C LATIHAN-LATIHAN SIMULASI

Ada sejumlah latihan simulasi bencana yang dilakukan secara berkala di Asia dan Pasifik yang dirancang untuk meningkatkan kesiapan para aktor kemanusiaan untuk merespon bencana. Selain latihan-latihan simulasi koordinasi sipil-militer yang rutin dilaksanakan di tingkat nasional dan regional (berdasarkan kesepakatan bilateral/multilateral), ada sejumlah latihan simulasi antarpemerintah yang rutin dilakukan setiap tahunnya, yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi internasional atau regional.

LATIHAN-LATIHAN YANG DIPRAKARSAI ORGANISASI INTERNASIONAL

1. Latihan-latihan simulasi regional oleh USAR INSARAG
2. *IASC Inter-Agency Emergency Simulation* (IASC IAES)

LATIHAN-LATIHAN YANG DIPRAKARSAI ORGANISASI REGIONAL

1. *ASEAN Regional Disaster Emergency Response Simulation Exercises* (ARDEX)
2. *ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercise* (ARF-DiREx)

LATIHAN-LATIHAN YANG DIPRAKARSAI ORGANISASI INTERNASIONAL

Latihan-latihan simulasi **USAR INSARAG Regional** memberi peluang kepada para manajer bencana untuk mengujicobakan metodologi-metodologi dan untuk meningkatkan koordinasi antara tim-tim USAR di tingkat lokal, regional dan internasional. Latihan meliputi komponen pelatihan sebelum pelaksanaan latihan, simulasi dan pembelajaran yang berlangsung selama satu minggu.

UNTUK SIAPA LATIHAN TERSEBUT?

Latihan-latihan simulasi INSARAG ditujukan untuk para pejabat Pemerintah, termasuk tim-tim pertahanan sipil dan USAR, dan organisasi-organisasi kemanusiaan nasional dan internasional. Latihan-latihan simulasi INSARAG di tingkat regional telah dilakukan di Manila (Filipina), Kathmandu (Nepal), Padang (Indonesia) dan Agra (India).

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

Para manajer bencana yang tertarik untuk berpartisipasi dalam atau menjadi penyelenggara latihan-latihan simulasi USAR dapat menghubungi sekretariat INSARAG di Jenewa di insarag@un.org. OCHA-ROAP juga menjadi penghubung antara negara-negara di Asia dan Pasifik dan INSARAG dan dapat dihubungi di ocha-roap@un.org.

IASC Inter-Agency Emergency Simulation (IASC IAES) adalah sebuah platform simulasi antarlembaga yang bertujuan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan koordinasi keadaan darurat di tingkat negara. Simulasi meliputi satu hari pembekalan di awal, satu hari penuh latihan lapangan, dan satu hari pembekalan akhir. IAES dari IASC dirancang untuk membantu para aktor di tingkat negara untuk menguji kebijakan-kebijakan, rencana-rencana kontinjensi dan prosedur-prosedur kesiapsiagaan bencana yang ada saat ini.

UNTUK SIAPA SIMULASI TERSEBUT?

Simulasi IASC dilaksanakan di tingkat nasional. Para peserta meliputi badan-badan pemerintah dan lembaga-lembaga kemanusiaan di dalam negara. Negara-negara di Asia Pasifik yang telah berpartisipasi dalam IAES IASC ini antara lain adalah RDR Korea, India, Indonesia, RDR Laos, Myanmar, Filipina, Thailand dan Vietnam.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

Simulasi IASC dapat diminta melalui UN RC atau HC atau melalui OCHA-ROAP di ocha-roap@un.org.

Selain latihan-latihan simulasi umum seperti yang dijelaskan disini, badan-badan PBB, LSM-LSM dan *cluster-cluster* juga melakukan simulasi-simulasi tambahan sesuai sektor dan/atau di tingkat masyarakat. Beberapa simulasi antara lain adalah latihan-latihan simulasi yang diprakarsai WHO di tingkat nasional dan regional tentang respon pandemi influenza (<http://un-influenza.org/regions/asia/simex>), latihan simulasi ECB (<http://www.ecbproject.org/simulations/simulationpackage>) dan latihan simulasi bencana World Vision (<http://beta.wvi.org/myanmar/video/world-vision-myanmar-disaster-simulation-pyapon-march-2010>).

LATIHAN-LATIHAN YANG DIPRAKARSAI ORGANISASI REGIONAL

ASEAN Regional Disaster Emergency Response Simulation Exercises (ARDEX) merupakan simulasi-simulasi lapangan multi-hari yang melibatkan para wakil negara ASEAN dan mitra-mitra mereka. Latihan-latihan ini biasanya menghasilkan masukan praktis untuk pelaksanaan AADMER yang efektif, dengan fokus untuk menggunakan *Standby Arrangements and Standard Operating Procedures (SASOP)* ASEAN. Selama ARDEX, para wakil dari Negara-negara Anggota ASEAN yang berpartisipasi berupaya untuk memahami, menguji coba dan memperbaiki mekanisme-mekanisme nasional dan internasional untuk respon bencana dan keadaan darurat. ARDEX telah dilaksanakan di Malaysia (2005), Kamboja (2006), Singapura (2007), dan Indonesia (2008).

UNTUK SIAPA LATIHAN TERSEBUT?

ARDEX ditujukan untuk Pemerintah-pemerintah Negara ASEAN dan mitra-mitranya.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi AHA Centre ASEAN di info@ahacentre.org.

ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercise (ARF-DiREx) adalah simulasi bantuan bencana militer-militer dan sipil-militer multinasional berskala besar yang dilakukan selama kira-kira lima hari. ARF-DiREx membantu negara-negara yang berpartisipasi untuk memperkuat kerja sama dan meningkatkan kemampuan operasi negara-negara tersebut untuk melakukan upaya-upaya respon internasional skala besar.

UNTUK SIAPA LATIHAN TERSEBUT?

Para peserta ARF-DiREx meliputi para wakil Pemerintah dari negara-negara anggota ASEAN Regional Forum (ARF), serta staf dari AHA Centre, badan-badan PBB, dan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. ARF DiREx pertama dilakukan di Manado, Indonesia pada 2011.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

Informasi tentang ARF-DiR dapat diakses melalui daftar kontak untuk bantuan bencana di setiap negara yang bergabung dalam ARF di <http://aseanregionalforum.asean.org/contact/arf-contact-points-for-disaster-relief.html>.

Latihan-latihan simulasi sipil-militer dirancang untuk memperkuat kemampuan mitra-mitra di tingkat regional untuk merespon tantangan-tantangan keamanan yang dihadapi bersama dan kontinjensi-kontinjensi lain. Banyak latihan fokus pada dibentuknya dan/atau penguatan satu markas besar gugus tugas dengan cepat dan efektif dan meliputi pelatihan ketrampilan tentang bantuan kemanusiaan dan respon bencana. Beragam latihan dilakukan dalam setahun dan paling banyak melalui kesepakatan bilateral antara Negara-negara Asia Pasifik dan mitra-mitra dialog mereka. Beberapa contoh antara lain latihan simulasi *Cobra Gold* oleh AS dan Thailand, latihan-latihan *Tempest Express* MPAT, dan latihan-latihan *Balikatan* oleh AS dan Filipina.

UNTUK SIAPA LATIHAN TERSEBUT?

Simulasi-simulasi sipil-militer di tingkat regional ditujukan untuk pasukan militer nasional dan mitra dialog mereka.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

Informasi tentang simulasi-simulasi sipil-militer di atas dapat diakses melalui pasukan militer di negara-negara tempatan dan penyelenggara.

D ■ SISTEM PERINGATAN DINI

Saat ini semakin banyak sistem peringatan dini yang tersedia untuk para manajer bencana di Asia dan Pasifik. Ada beragam sistem peringatan dini sesuai dengan ruang lingkup geografis dan tematis dan memberikan berbagai tataran bantuan kepada pemerintah-pemerintah dan mitra-mitra mereka tentang kesadaran tentang situasi, bersiaga, dan pengambilan keputusan jajaran eksekutif. Sistem-sistem peringatan dini disini merupakan sistem-sistem regional dan internasional yang ada yang melengkapi mekanisme-mekanisme yang dijalankan oleh badan-badan meteorologi nasional dan badan-badan pemerintah lain di kawasan, termasuk badan-badan penanggulangan bencana nasional.

Bagian ini menguraikan empat belas sistem peringatan dini. Untuk memudahkan, bagian ini disampaikan dalam bentuk tabel rangkuman.

Sistem Peringatan Dini di Asia dan Pasifik		
Nama	Penyelenggara	Tujuan utama
PERAMALAN CUACA		
Joint Typhoon Warning System	Angkatan Laut AS	Memberikan penasehatan tentang cuaca dan kesiagaan terhadap siklon tropis untuk Samudra Hindia dan Pasifik
Fiji Meteorological Service	Fiji	Menyediakan layanan peramalan cuaca dan peringatan siklon di tingkat regional untuk negara-negara di seluruh Pasifik Selatan selain layanan peramalan untuk Fiji
Emergency Managers Weather Information Service (EmWIN)	AS	Menyediakan informasi tentang cuaca buruk melalui beragam metode akses data (radio, internet, satelit) dan peringatan kesiagaan melalui siaran langsung (live streaming)
Japan Meteorological Agency	Jepang	Memberikan penasehatan tentang cuaca dan peringatan kesiagaan tentang siklon tropis untuk Jepang dan negara-negara tetangga
Bureau of Meteorology)	Australia	Memberikan penasehatan tentang cuaca dan peringatan kesiagaan tentang siklon tropis untuk Australia dan negara-negara tetangga
PERINGATAN BANJIR		
Mekong River Commission Monitoring and Forecasting	Komisi Sungai Mekong	Memantau ketinggian air Sungai Mekong dan memberikan peringatan tentang banjir bandang
PERINGATAN TSUNAMI		
Pacific Tsunami Warning System (PTWS)	26 negara anggota (Pasifik Tsunami Warning Centre, yang terletak di Hawaii, merupakan pusat operasional)	Memantau stasiun-stasiun seismologi dan pasang di seluruh Ceruk Pasifik untuk mengevaluasi potensi tsunami yang dipicu oleh gempa bumi
Indian Ocean Tsunami Warning System (IOTWS)	PBB	Memberikan peringatan dini kepada negara-negara yang berbatasan dengan Samudra Hindia. Sistem ini terdiri dari 25 stasiun seismograf dan tiga sensor laut dalam
MULTI-ANCAMAN BAHAYA		
Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System (RIMES)	13 anggota dan 18 negara kolaborator (ditempatkan di Asian Institute of Technology)	Memberikan layanan peringatan dini di tingkat regional dan membangun kapasitas Negara-Negara anggotanya dalam peringatan dini tsunami dari hulu ke hilir (end to end) untuk tsunami dan ancaman-ancaman bahaya hidrometeorologis.

Sistem Peringatan Dini di Asia dan Pasifik		
Nama	Penyelenggara	Tujuan utama
Disaster Monitoring and Response System (DMRS)	AHA Centre (digerakkan oleh Disaster AWARE)	Memadukan data dari berbagai sumber, termasuk dari badan-badan pemantauan ancaman bahaya dan peringatan bencana nasional dan internasional, ke dalam satu platform tunggal. Para manajer bencana ASEAN perlu melakukan registrasi untuk dapat mengaksesnya.
Disaster AWARE	Pacific Disaster Center (PDC)	Memberikan bantuan untuk pemantauan, peringatan kesiagaan dan pengambilan keputusan tentang berbagai ancaman bahaya yang berbasis internet di tingkat global kepada organisasi-organisasi penanggulangan bencana dan internasional dan LSM. Disaster AWARE juga menggerakkan sistem-sistem peringatan di tingkat regional dan nasional Di ASEAN AHA Centre, DMC Vietnam dan NDWC Thailand ³¹
US Geological Service	AS	Menyediakan informasi tentang ekosistem dan lingkungan global dengan perhatian pada peringatan ancaman bahaya alam. USGS membantu tanggung jawab NOAA dalam menyediakan peringatan badai geomagnetis dan tsunami
Global Disaster Alert and Coordination System (GDACS)	PBB dan Uni Eropa	Menyediakan peringatan tentang ancaman-ancaman bahaya global dan perangkat-perangkat untuk membantu koordinasi respon. Sistem ini terdiri dari informasi bencana awal dan perkiraan dampak dan kerugian yang dihitung secara elektronik setelah bencana-bencana besar.
Humanitarian Emergency Warning Service	IASC (WFP)	Layanan pemantauan yang selalu dimuktahirkan tentang berbagai ancaman paling berbahaya untuk membantu kesiapsiagaan kemanusiaan.

INGAT

- Sistem-sistem peringatan dini semakin terus berkembang di kawasan. Sistem-sistem tersebut memberikan tingkat kesadaran yang sangat beragam terhadap situasi, yang tergantung pada skala GIS dan layer data lain yang tercakup.
- Hampir semua sistem yang disebutkan disini menggunakan sumber daya informasi yang sama dan berbagi pesan-pesan peringatan dan siaga satu sama lain

³¹ PDC menaungi dua aplikasi: [1] EMOPS, untuk para profesional penanggulangan bencana, dan [2] Global Hazards Atlas, untuk masyarakat umum. Sebuah aplikasi mobile yaitu Disaster Alert juga tersedia. Indonesia sedang bekerja dengan PDC untuk mengembangkan versi DisasterAWARE sendiri. Filipina dan Kamboja telah menyatakan minat untuk mendapatkan versi-versi untuk negara mereka.



BAGAIMANA MENGAkses ALAMAT-ALAMAT WEB SECARA MUDAH?

Untuk mengakses alamat-alamat web yang menjadi acuan di buku pedoman ini dengan cepat, silakan mengunjungi www.unocha.org/roap

ARSITEKTUR KEMANUSIAAN INTERNASIONAL

A. AKSI REGULASI

PERJANJIAN-PERJANJIAN REGULASI ANTAR-NEGARA YANG MENGIKAT

ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER)

- <http://www.asean.org/news/item/asean-agreement-on-disaster-management-and-emergency-response-vientiane-26-july-2005-3>

Mekanisme Respon Cepat terhadap Bencana Alam (Natural Disaster Rapid

Response Mechanism/NDRRM) dari Asosiasi Asia Selatan untuk Kerjasama Regional (*South Asian Association for Regional Cooperation/SAARC*) - <http://saarc-sadkn.org/ndrrm.aspx>

PERJANJIAN-PERJANJIAN REGULASI ANTAR-NEGARA YANG TIDAK MENGIKAT

Resolusi Sidang Umum PBB 46/182 - <http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r182.htm>

Pedoman Fasilitasi dan Regulasi Dalam Negeri tentang Bantuan Bencana Internasional dan Bantuan Pemulihan Awal (Guideline for the Domestic Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery Assistance) (juga dikenal sebagai panduan IDRL) dari IFRC - <http://www.ifrc.org/PageFiles/41203/1205600-IDRL%2520Guidelines-EN-LR%2520%282%29.pdf>

Resolusi Organisasi Kepabeanan Dunia (WCO) tentang Peran Pabean dalam Bantuan Bencana Alam - <http://www.wcoomd.org/en/about-us/legal-instruments/~media/A0C1DEE96F944E08BCD48FFDD1A7D4B7.ashx>

Perjanjian Perancis, Australia, dan Selandia Baru (France, Australia and New Zealand/Franz) - <https://www.phtpacific.org/content/franz-agreement%20>

Kode Perilaku untuk Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dan LSM dalam Bantuan Bencana (Code of Conduct for the RCRC Movement and NGOs in Disaster Relief) - <http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/code-of-conduct/code-english.pdf>

- Proyek Sphere: Piagam Kemanusiaan dan Standar-Standard Minimum dalam Respons Kemanusiaan (Buku Pegangan Sphere) [*Sphere Project: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response (Sphere Handbook)*] - <http://www.spherehandbook.org/>
- Standar-Standard HAP dalam Akuntabilitas Kemanusiaan - <http://www.hapinternational.org/pool/files/2010-hap-standard-in-accountability.pdf>
- Pedoman Operasional IASC tentang Perlindungan Orang-Orang dalam Situasi-Situasi Bencana Alam (*IASC Operational Guidelines on the Protection of Persons in Situation of Natural Disasters*) - <http://ochanet.unocha.org/p/Documents/Operational%2520Guidelines.pdf>
- Prinsip-Prinsip Panduan tentang Pengungsian Internal (*Guiding Principles on Internal Displacement*) - <https://ochanet.unocha.org/p/Documents/Operational%2520Guidelines.pdf>
- Pedoman Oslo tentang Penggunaan Aset-Aset Militer and Pertahanan Sipil Asing dalam Bantuan Bencana - <http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/8706B7B69BD77E00C1257233004F0570-OCHA-Nov2006.pdf>
- Pedoman Regional Asia Pasifik tentang Penggunaan Aset-Aset Militer Asing dalam Operasi-Operasi Respons Bencana Alam (*Asia Pasific Guidelines for the Use of Foreign Military Assets in Natural Disaster Response Operations*) - [http://ochanet.unocha.org/p/Documents/APC-MADRO%20Draft%20Guidelines%20V8.0%20\(23%20November%202010\).pdf](http://ochanet.unocha.org/p/Documents/APC-MADRO%20Draft%20Guidelines%20V8.0%20(23%20November%202010).pdf)
- Manual Lapangan tentang Pengelolaan Jenazah setelah Bencana (*Management of Dead Bodies after Disasters Field Manual*) - <http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-002-0880.pdf>
- Pedoman Keadaan Darurat Lingkungan (*Guidelines for Environmental Emergencies*) - <http://ochanet.unocha.org/p/Documents/Guidelines%20for%20Environmental%20Emergencies%20Version%201.pdf>
- Pedoman Intervensi Kekerasan Berbasis Gender dalam Situasi Kemanusiaan (*Guidelines for Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Settings*) dari IASC - http://www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content-subsidi-tf_gender-gbv
- Buku Pegangan Gender dalam Aksi Kemanusiaan (*Gender Handbook in Humanitarian Action*) dari IASC - http://www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content-subsidi-tf_gender-gbv

B. AKTOR KEMANUSIAAN

PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

- Dana-Dana, Program-Program dan Badan-Badan Khusus PBB (Badan-Badan PBB) - <http://humanitarianresponse.info/>
- Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Nasional (Masyarakat Nasional) - <http://www.ifrc.org/en/who-we-are/the-movement/national-societies>
- Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) - <http://www.ifrc.org/>
- Komite Palang Merah Internasional (ICRC) - <http://www.icrc.org/eng>

ORGANISASI-ORGANISASI DAN FORUM-FORUM ANTAR-PEMERINTAH DI TINGKAT REGIONAL

- Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nation/ASEAN*) - <http://www.asean.org/>
- Pusat ASEAN untuk Koordinasi Bantuan Kemanusiaan tentang penanggulangan bencana (*ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance/AHA Centre*) – <http://www.ahacentre.org/>
- Forum Regional ASEAN (*ASEAN Regional Forum/ARF*) - <http://aseanregionalforum.asean.org/>
- Asosiasi Asia Selatan untuk Kerjasama Regional (*South Asia Association for Regional Cooperation/SAARC*) -<http://www.saarc-sec.org/>
- Forum Kepulauan Pasifik (*Pacific Islands Forum/PIF*) - <http://www.forumsec.org/>
- Sekretariat Masyarakat Pasifik (*Secretariat of the Pacific Community/SPC*) - <http://www.spc.int/>
- Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (*Asia Pacific Economic Cooperation/APEC*) - <http://www.apec.org/>

C. MEKANISME-MEKANISME KOORDINASI INTERNASIONAL

MEKANISME TINGKAT GLOBAL

- Koordinator Bantuan Keadaan Darurat (*Emergency Relief Coordinator/ERC*) - <http://www.unocha.org/about-us/headofOCHA>
- Komite Tetap Antar-Lembaga (*Inter-Agency Standing Committee/IASC*) - <http://www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx%3Fpage%3Dcontent-about-default>

MEKANISME TINGKAT NEGARA

- Koordinator Residen dan Kemanusiaan (*Resident and Humanitarian Coordinator-RC/HC*) - <http://www.unocha.org/what-we-do/coordination/leadership/overview>
- Tim Kemanusiaan tingkat Negara (*Humanitarian Country Team/HCT*) - http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/F960ACDE981A434B8525768000567E8F-IASC_Nov09.pdf

MEKANISME “PENJEMBATAN”

- Pendekatan *Cluster* - <http://oneresponse.info/coordination/clusterapproach/Pages/Cluster%2520Approach.aspx>
- Kantor Koordinasi Urusan-Urusan Kemanusiaan (*Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/OCHA*) - <http://www.unocha.org/>

PERANGKAT DAN LAYANAN UNTUK KESIAPSIAGAAN RESPON BENCANA

A. MOBILISASI TIM TEKNIS

BILATERAL

Pusat Koordinasi Operasi di Tempat secara Virtual (*Virtual On-Site Operations Coordination Centre/Virtual OSOCC*) - <http://vosocc.unocha.org/>

Pusat Koordinasi Operasi Di Tempat (*On-Site Operations Coordination Center/OSOCC*) - <http://www.unocha.org/what-we-do/coordination-tools/osocc-rdc/overview>

ANTAR-PEMERINTAH

Tim-tim Pengkajian dan Koordinasi Bencana PBB (UNDAC) - <http://www.unocha.org/what-we-do/coordination-tools/undac/overview>

Tim-Tim Pengkajian Cepat Keadaan Darurat ASEAN (ERAT) - <http://www.ahacentre.org/>

Unit Lingkungan Gabungan OCHA/UNEP (JEU) - <http://www.unocha.org/unesp>

GERAKAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH

Tim-Tim Respon Bencana Regional (RDRT) - <http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/responding/disaster-response-system/dr-tools-and-systems/regional-disaster-response-teams>

Tim-Tim Koordinasi Pengkajian Lapangan (FACT) - <http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/responding/disaster-response-system/dr-tools-and-systems/responding-to-disasters-field-assessment-coordination-teams-fact>

Unit-Unit Respons Keadaan Darurat (ERU) - <http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/responding/disaster-response-system/dr-tools-and-systems/eru>

B. MOBILISASI PELAYANAN TEKNIS

ASET-ASET DAN PASOKAN BANTUAN DARURAT

Kemitraan Kemanusiaan Internasional (*International Humanitarian Partnership*) - <http://www.ihp.nu/>

Kemitraan Kemanusiaan Asia-Pasifik (*Asia-Pacific Humanitarian Partnership/APHP*) - <http://www.ihp.nu/about/asia-pacificamerica.html>

Jaringan Depot Respons Kemanusiaan PBB (*UN Humanitarian Response Depot Network/UNHRD*) - <http://www.unhcd.org/>

JARINGAN TEKNIS

Jaringan Hubungan Keluarga (*Family Links Network*) ICRC - <http://www.icrc.org/FAMILYLINKS>

JADWAL SIAGA DAN JADWAL SURGE

Cluster Telekomunikasi Keadaan Darurat - <http://ictemergency.wfp.org/web/ictopr/emergency-telecommunications-cluster>

Cluster Logistik - <http://www.logcluster.org/>

C. MOBILISASI SUMBER DAYA KEUANGAN

MEKANISME “DANA CEPAT”

Central Emergency Response Fund (CERF) - <http://www.unocha.org/cerf>

Disaster Relief Emergency Fund (DREF) IFRC - <http://www.ifrc.org/PageFiles/40861/DREF%2520Background%2520paper.pdf>

Emergency Cash Grant OCHA - <http://ocha.unog.ch/drptoolkit/FEmergencyCashGrant.html>

Emergency Response Fund (ERF) - <http://www.unocha.org/what-we-do/humanitarian-financing/emergency-response-funds-erf>

Asia Pacific Disaster Response Fund (APDRF) - <http://www.adb.org/site/funds/funds/asia-pacific-disaster-response-fund-apdrf>

PERANGKAT PENGGAJARAN DANA STRATEGIS

Consolidated Appeal Process (CAP) - <http://www.unocha.org/cap/about-the-cap/about-process>

D. PENGELOLAAN INFORMASI DAN PENGAJIAN

ReliefWeb - <http://reliefweb.int/>

HumanitarianResponse.info - www.humanitarianresponse.info

Financial Tracking Service (FTS) - <http://fts.unocha.org/>

ASEAN Disaster Information Network/ADInet - <http://adinet.ahacentre.org>

South Asian Disaster Knowledge Network/SADKN - <http://www.saarc-sadkn.org/about.aspx>

Pacific Disaster Net/PDN - www.pacificdisaster.net

PERANGKAT PENGAJIAN

Multi-Cluster Initial Rapid Assessment (MIRA) - <http://assessments.humanitarianresponse.info/>

PERANGKAT DAN LAYANAN UNTUK KESIAPSIAGAAN RESPON BENCANA

A. PELATIHAN TEKNIS

PELATIHAN TEKNIS INTERNASIONAL

Pelatihan UNDAC - <http://www.unocha.org/what-we-do/coordination-tools/undac/methodology-training>

Kursus pembekalan ERAT - <http://www.ahacentre.org/>

Pelatihan INSARAG - <http://www.insarag.org/en/methodology/guidelines.html>

Pelatihan koordinasi UN-CMCoord - <http://www.unocha.org/what-we-do/coordination-tools/UN-CMCoord/training-partnerships>

Pelatihan EEC - <http://www.eecentre.org/>

Pelatihan eCentre UNHCR – www.the-ecentre.net

Programme for Enhancement of Emergency Response (PEER) - <http://www.adpc.net/>

PELATIHAN TEKNIS BILATERAL

Bantuan dan pelatihan teknis *Incident Command System AS* - <http://www.fs.fed.us/global/aboutus/dmp/welcome.htm#background>

B. PERENCANAAN KESIAPAN

KESIAPSIAGAAN SECARA HUKUM

Kesiapsiagaan bencana secara hukum sejalan dengan Pedoman IDRL - <http://www.ifrc.org/dl>

Model Act for the Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery Assistance - <http://www.ifrc.org/PageFiles/88609/Pilot%2520Model%2520Act%2520on%2520IDRL%2520%28English%29.pdf>

UN Model Customs Facilitation Agreement - http://ochanet.unocha.org/p/Documents/Model_en_2011.pdf

PAKET DAN MISI TERPADU KESIAPSIAGAAN

Minimum Preparedness Package (MPP) – http://www.unocha.org/ocha2012-13/strategic-plan/objective-1_3

DUKUNGAN UNTUK SISTEM-SISTEM PENGELOLAAN INSIDEN NASIONAL

National Incident Management Systems - <http://www.fs.fed.us/global/aboutus/dmp/welcome.htm%23background>



OCHA

OCHA-ROAP

Regional Office for Asia and the Pacific,
Executive Suite, Second Floor,
UNCC Building, Rajdamnern Nok Avenue,
Bangkok 10200,
Thailand.

Tel: +66 2288 1234

E-mail: ocha-roap@un.org

For more information
www.unocha.org/roap